TAHUN EMAS UNIVERSITAS INDONESIA

Jilid 1

Dari Balai ke Universitas

TAHUN EMAS
UNIVERSITAS INDONESIA

Jilid 1
Dari Balai ke Universitas

S. Somadikarta * Tri Wahyuning M. Irsyam * Boen S. Oemarjati

Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
JAKARTA 2000

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Somadikarta, S.

Tahun Emas Universitas Indonesia/S. Somadikarta, Tri Wahyuning M. Irsyam, Boen S. Oemarjati. — Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1999
3 Jil. ; 28 cm.

ISBN 979-456-204-1 (No. Jil. Lengkap)
ISBN 979-456-205-X (Jil. 1)
ISBN 979-456-206-8 (Jil. 2)
ISBN 979-456-207-6 (Jil. 3)

1. Universitas Indonesia. I. Judul
II. Irsyam, Tri Wahyuning M. III. Umaryati, Bun S.

Cetakan Pertama Tahun 2000

Penulis: S. Somadikarta, Tri Wahyuning M. Irsyam, Boen S. Oemarjati
Desain Sampul: Novianto Handri
Pemenang Lomba Logo 50 Tahun Universitas Indonesia
Dicetak oleh: Penerbit UI Press, Jakarta
Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
Jalan Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. 335373, Fax. 330172

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih x
Kata Pengantar xi
Sambutan Rektor Universitas Indonesia xiii
Sambutan Rektor Universitas Airlangga xvii
Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin xviii
Sambutan Rektor Institut Teknologi Bandung xx
Sambutan Rektor Universitas Negeri Jakarta xxii
Sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor xxiv
Sambutan Direktur Politeknik Negeri Jakarta xxv

1 DARI GAGASAN KE PERWUJUDAN AWAL 1
A. Gagasan Mendirikan Perguruan Tinggi 1
B. Fakultas Perintis 8
C. Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) 11
D. Nood-Universiteit 13
E. Universiteit van Indonesië 15
F. Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat (BPTRIS) 18

2 CIKAL BAKAL UNIVERSITAS INDONESIA 27
A. Dari *Dokterdjawaschool* di Batavia ke *Fakulteit Kedokteran* di Jakarta 27
B. Dari *Opleidingsschool voor Inlandsche Rechtskundigen* di Batavia ke *Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masjarakat* di Jakarta 34
C. Dari *Technische Hoogeschool* di Bandoeng, ke *Fakulteit Ilmu Pengetahuan Teknik* di Bandung 36

D. Dari *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* di Batavia ke *Fakulteit Sastra dan Filsafat* di Jakarta 39
E. Dari *Faculteit van Landbouwwetenschap* di *Buitenzorg* ke *Fakulteit Pertanian* di Bogor 40
F. Dari *Faculteit der Exacte Wetenschap* di Bandoeng ke *Fakulteit Ilmu Pasti dan Ilmu Alam* di Bandung 42
G. Dari *Faculteit der Diergeneeskunde* di Buitenzorg ke *Fakulteit Kedokteran* Hewan di Bogor 43
H. Dari *Faculteit der Economische Wetenschap* di Makassar ke *Fakulteit Ekonomi* di Makassar 44
I. Dari *Faculteit der Geneeskunde* di Soerabaja ke *Fakulteit Kedokteran* di Surabaya 45
J. Dari Universiteit Indonesia ke Universitas Indonesia 45
K. Silsilah Universitas Indonesia 46

3 **TANGGAL LAHIR DAN IDENTITAS UNIVERSITAS INDONESIA** **51**
A. Tanggal Lahir yang Beragam 51
B. Pelacakan 'Akta Kelahiran' 53
C. Nama Universitas Indonesia 63
D. Lambang Universitas Indonesia 64
E. Atribut Universitas Indonesia 66

4 **PENATAAN UNIVERSITAS INDONESIA** **73**
A. Pembukaan 15 Fakultas Baru 75
B. Pengubahan Nama Lima Fakultas 104
C. Pengalihan 11 Fakultas dan 3 Lembaga 105

5 **UNIVERSITAS INDONESIA DI USIA KE-50** **113**
A. Bidang Pendidikan 117
B. Bidang Penelitian 140
C. Bidang Pengabdian pada Masyarakat 142
D. Sarana Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi 146

E. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian Dalam dan Luar Negeri 155

6 PIMPINAN UNIVERSITAS INDONESIA 159

7 PIMPINAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA 173

8 LEMBAGA KEMAHASISWAAN DAN IKATAN LULUSAN UNIVERSITAS INDONESIA 199

A. Lembaga Kemahasiswaan 199

B. Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI) 206

Daftar Pustaka 209
Indeks Nama 229
Photocredit 243
Repro Lampiran 245

BAB 1
DARI GAGASAN KE PERWUJUDAN AWAL

A. GAGASAN MENDIRIKAN PERGURUAN TINGGI

Pada permulaan abad ke-20, masalah pendirian perguruan tinggi di Hindia-Belanda menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan elite Belanda dan para pemuka bumiputra. Dari bahan bacaan yang diterbitkan di berbagai majalah, laporan, dan surat kabar (di antaranya *De Banier, Het Bondsblad, Berita Indonesia, De Centrale, Djåwå, De Indische Gids, Indologenblad, Java Bode, Koloniale Studiën, Merdeka, Nieuwsgier, Nieuw Indië, Onze Stem, Tectona, Het Tijdschrift, Timboel, Vrije Arbeid, Vrijzinnig Weekblad, Weekblad voor Indië, Verslagen der Vergaderingen van Indisch Genootschap*) terungkap banyak pendapat yang merebak dalam rentang waktu 40 tahun terakhir kolonialisme Belanda, baik yang setuju maupun yang tidak mengenai perluasan pendidikan di Hindia-Belanda. Kenyataan itu menunjukkan bahwa ada keragu-raguan dan kebimbangan di pihak pemerintah kolonial untuk mendirikan suatu perguruan tinggi di Hindia-Belanda. Hal tersebut diperkuat kenyataan bahwa hingga Pemerintah Kolonial Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942 belum ada universitas yang didirikan di Hindia-Belanda.

Pada tahun 1910, atas permintaan Dr. J. Noordhoek Hegt, pemerintah menyetujui pendirian Perhimpunan Universitas Hindia (Indische Universiteitsvereeniging atau IUV) di Batavia (Jakarta). Untuk itu kemudian dikeluarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie* (Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda) No. 27 tanggal 23 Juli 1910 (*Staatsbl. Ned. Indie* 1910 No. 414). Dalam statuta IUV disebutkan bahwa IUV bertujuan memajukan, mendirikan, dan mengurus sekolah-sekolah tinggi

Belanda Indo. Dengan demikian kemampuan pemuda bumiputra untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak perlu diragukan.

Stokvis (1911–12: 276), Pemimpin Redaksi *De Locomotief*, mengemukakan bahwa hingga tahun 1912 Menteri Jajahan belum memikirkan rencana pendirian suatu universitas di Hindia-Belanda, meskipun ada tuntutan ke arah itu. Dalam pembahasan mengenai anggaran tahun 1912 Parlemen Belanda tidak mengalokasikan dana untuk keperluan pendirian sebuah perguruan tinggi di Hindia-Belanda, mengingat masih sangat terbatasnya keinginan masyarakat Hindia-Belanda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seandainya ada yang berminat, maka lebih baik jika mereka dikirim ke universitas di Negeri Belanda, dengan bantuan dana dari pemerintah Hindia-Belanda. Lebih lanjut Stokvis (1911–12: 278) dan Geus (1911–12: 292–295) melontarkan gagasan bahwa di Hindia-Belanda seharusnya didirikan *hooger vakonderwijs* (pendidikan tinggi kejuruan), bukan suatu perguruan tinggi. Melalui pendidikan tinggi kejuruan tersebut diharapkan masyarakat Hindia-Belanda dapat menguasai keterampilan dalam bidang tertentu.

Perlu dikemukakan bahwa F. van Schuijlenburch, Ketua Pengurus Perhimpunan Indische Bond, atas nama anggotanya juga menyatakan bahwa suatu lembaga perguruan tinggi di Hindia-Belanda merupakan buah dari suatu peradaban. Oleh karena itu, pendirian suatu lembaga perguruan tinggi harus segera direncanakan (1911–12: 279). Bahkan, Ketua Perhimpunan Insulinde, dalam tulisannya yang berjudul *"Geen twijfel mogelijk"* (Tidak ada keraguan lagi) yang diterbitkan dalam majalah *Het Tijdschrift* (1, 1911–12: 292) menekankan bahwa untuk mengelola suatu pendidikan yang sempurna bagi suatu bangsa, pemerintah tidak boleh berlindung di balik dalih keuangan, kecuali jika Pemerintah Belanda bangkrut.

Pada tahun 1918, Dr. Abdul Rivai (tamatan School tot

Opleiding van Inlandsche Artsen atau STOVIA, tanggal 9 Februari 1895, dan orang bumiputra pertama yang dapat meraih gelar *Doctor in de Medicijnen, Chirurgie en Verloskunde* dari Universiteit Gent, Belgia, pada tanggal 23 Juli 1908) bersama 14 anggota Volksraad lainnya mengusulkan rencana pembentukan suatu universitas di Hindia-Belanda (Terburgh, 1918–19a: 448). Pada kesempatan itu perdebatan mengenai batasan kata *universiteit* dan *hooger onderwijs* tidak terelakkan (Terburgh, 1918–19b: 466–470). Sitsen (1919a: 629) dan Helsdingen Jr. (1920a: 595) mengingatkan bahwa berdasarkan *Hoogeronderwijswet* (Undang-Undang Pendidikan Tinggi) yang dimuat dalam *Staatsbl. Koninkrijk der Nederlanden* No. 181, suatu universitas harus memiliki lima fakultas (Pasal 76), yaitu: (1) *faculteit der godgeleerdheid* (fakultas teologi); (2) *faculteit der rechtsgeleerdheid* (fakultas hukum); (3) *faculteit der geneeskunde* (fakultas kedokteran); (4) *faculteit der wis- en natuurkunde* (fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam); dan (5) *faculteit der letteren en wijsbegeerte* (fakultas sastra dan filsafat) [Keputusan Ratu Wilhelmina tanggal 6 Juni 1905]. Dr. A.E. Sitsen, Direktur Pertama Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS) Surabaya, mengusulkan agar universitas di Hindia-Belanda terdiri dari beberapa sekolah tinggi yang didirikan tersebar di beberapa tempat. Misalnya, Sekolah Kedokteran di Batavia dan Soerabaja; Sekolah Pertanian dan Sekolah Kedokteran Hewan di Buitenzorg; Sekolah Kehakiman di Batavia; dan suatu Lembaga untuk pendidikan Insinyur didirikan di suatu tempat yang terbaik dan cocok untuk pendidikan tersebut (Terburgh, 1918–19b: 468).

Dr. Abdul Rivai (*lihat* Terburgh, 1918–19b: 469) mempertegas bahwa usulannya itu sebenarnya untuk mendirikan sekolah tinggi yang kemudian dapat bergabung menjadi suatu lembaga pendidikan universiter. Dalam majalah *Vrijzinnig Weekblad*, Dr. Abdul Rivai (1918–19: 660–664) menulis panjang lebar tentang pendirian "Hooge School" (Sekolah Tinggi) di Hindia-Belanda. Dewan Redaksi majalah *Vrijzinnig Weekblad* dalam komentar yang

dikemukakan di hlm. 664, mengatakan mereka sangat senang dapat menerbitkan tulisan Dr. A.E. Sitsen dan Dr. Abdul Rivai dalam majalahnya. Mereka mengharapkan agar *hoogeschool* di Hindia-Belanda dapat didirikan secepat mungkin, dan tahun 1920 diharapkan akan merupakan tahun pendirian *hoogeschool* pertama di Hindia-Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1920, atas prakarsa badan swasta Koninklijk Instituut van Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië, sekolah tinggi pertama di Hindia-Belanda, yaitu Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik), yang dikenal dengan singkatan namanya THS, didirikan di Bandung.

Pada tahun 1922, Indologen Vereeniging (Perhimpunan Ahli Indologi) di Leiden merayakan Lustrum ke-4 dan menerbitkan Nomor Lustrum majalah *Indologenblad* yang khusus membahas masalah 'universitas' di Hindia-Belanda. Abendanon (1922: 17) mengemukakan bahwa pada tahun 1915 ia diminta untuk memberikan ceramah dalam Kongres Ilmu Alam dan Ilmu Kedokteran Belanda (Ned. Natuur- en Geneesk. Congres) ke-15 di Amsterdam tentang pendidikan menengah dan pendidikan persiapan untuk perguruan tinggi bagi bumiputra di Hindia-Belanda. Pada waktu itu ia telah mengemukakan bahwa Hindia-Belanda memerlukan dan telah matang untuk mendirikan fakultas-fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra dan Filsafat (termasuk Sejarah dan Ilmu Bangsa-bangsa), Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan terutama Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik, yang sudah didirikan di Bandung. Fakultas-fakultas yang membangun suatu universitas tidak harus berada dalam satu kota. Misalnya, di Bogor sudah ada Kebun Raya dan sejumlah laboratorium penelitian yang penting, sehingga dapat menjadi tempat pendirian suatu fakultas. Demikian juga di Yogyakarta, dengan tutur bahasa 'murni' dan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitarnya, dapat dibuka Fakultas Sastra.

Artikel-artikel mengenai soal pendirian universitas di Hindia-Belanda, yang diterbitkan dalam Nomor Lustrum majalah

Indologenblad pada tahun 1922 itu dan di majalah lainnya, sangat menarik untuk disimak. Ada dua pendapat di antaranya yang pantas dikemukakan, yaitu pendapat R. Takahiri dan F. van Lith.

Takahiri (1911–12: 287–288) berpendapat bahwa ia untuk sementara tidak dapat menyetujui pembukaan perguruan tinggi di Hindia-Belanda, mengingat biaya pendiriannya yang sangat mahal dan memerlukan proses yang lama. Takahiri menyarankan agar para pemuda di Hindia-Belanda, yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, menuntut ilmu ke Jepang. Selain biaya pendidikan di Jepang jauh lebih murah, kualitas perguruan tinggi di Jepang pada umumnya juga sama dengan perguruan tinggi di Eropa. Kyoto dan Tokyo menawarkan persyaratan yang menarik bagi para pemuda mancanegara yang mau belajar di universitas atau di politeknik di kedua kota tersebut.

Lith (1922: 19), yang sepuluh tahun sebelumnya menentang pendirian perguruan tinggi di Hindia-Belanda, berganti haluan menyetujui dan bahkan mendukungnya. Ia mengatakan, setiap orang yang mencintai Hindia-Belanda akan menyetujui pendirian perguruan tinggi di negeri jajahan itu, meskipun kualitas universitas itu tidak serta merta akan setingkat dengan universitas di Negeri Belanda. Dikatakan olehnya, universitas di Hindia-Belanda akan dapat dianggap baik sekali, jika sudah setingkat dengan universitas terbaik di Asia Tenggara. Pengalaman Lith dalam Perang Dunia I, yang mengharuskan negerinya berperang membantu Jerman dan berada di bawah telapak kaki Jerman, telah mengubah jalan pikirannya. Dibayangkannya waktu itu, bahwa di masa yang akan datang mungkin saja Jepang akan melakukan hal yang sama terhadap Hindia-Belanda, atau bahkan Hindia-Belanda mungkin akan memproklamasikan kemerdekaannya. Karena itu, Pemerintah Hindia-Belanda harus segera memberikan segala kesempatan agar Hindia-Belanda dapat berdiri di atas kaki sendiri sedini mungkin.

B. FAKULTAS PERINTIS

Dalam kurun waktu empat tahun (1924–1927) Pemerintah Hindia-Belanda mengalami dua peristiwa penting di bidang pendidikan tinggi, yaitu (1) pada tahun 1924 menerima *Technische Hoogeschool* atau *THS* (Sekolah Tinggi Teknik)—yang didirikan tahun 1920 di Bandung oleh Koninklijk Instituut van Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië—dari lembaga swasta pendirinya; dan (2) membuka dua sekolah tinggi di Jakarta, yaitu *Rechtshoogeschool* atau *RHS* (Sekolah Tinggi Hukum) pada tahun 1924, dan *Geneeskundige Hoogeschool* atau *GHS* (Sekolah Tinggi Kedokteran) pada tahun 1927.
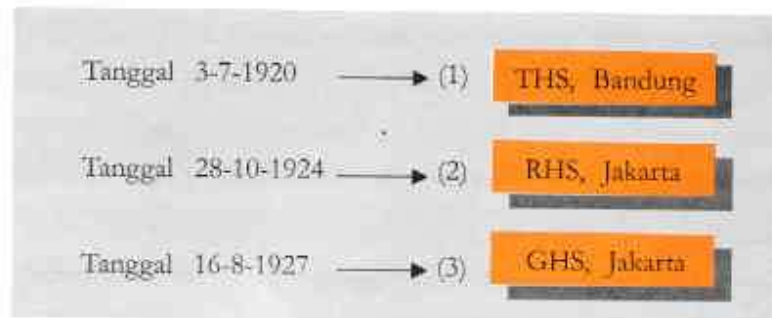
Pada akhir tahun 1929, Prof. Dr. B. Schrieke, *wde* (Pejabat) *Directeur van Onderwijs en Eeredienst* pada saat itu, telah mengajukan nota kepada Pemerintah tentang pendirian Faculteit der Letteren (Fakultas Sastra) di Jakarta dengan judul "*Nota inzake de oprichting en de organisatie van een faculteit der letteren in Nederlandsch-Indië, met kostenraming*" (Nota berkenaan dengan pendirian dan organisasi Fakultas Sastra di Hindia-Belanda, serta pembiayaannya). Nota tersebut kemudian dikenal sebagai 'Plan-1929' atau 'Nota-1929'. Namun, akibat penghematan belanja negara, anggaran biaya yang diusulkan untuk mendirikan dan mengelola fakultas tersebut tidak dicantumkan dalam Anggaran Belanja Negara tahun 1931. Anggaran itu hanya merupakan *memoriepost* (Brugmans, 1940: 357).

Dalam Bab 3 "Nota-1929" tersebut, yang berjudul *"De Faculteit der Letteren en de toekomstige ontwikkeling in Nederlandsch-Indië"* (Fakultas Sastra dan perkembangan perguruan tinggi di Hindia-Belanda pada masa yang akan datang), dikemukakan bahwa jika Faculteit der Letteren sudah dibuka, maka fakultas tersebut dapat bergabung dengan Rechtshoogeschool dan Geneeskundige Hoogeschool menjadi satu universitas, yaitu Universiteit van Batavia (Schrieke, 1930: 86).

Gagasan yang dikenal dengan nama 'Plan-1929' atau 'Nota-1929' merupakan hasil pembicaraan Prof. Dr. B. Schrieke dengan Dr. F.D.K. Bosch, Prof. Dr. R.A. Hoesein Djajadiningrat, Dr. G.W.J. Drewes, dan Prof. Mr. J. ten Kate. Gagasan tersebut diterbitkan di majalah *Djawa* tahun 1930, Vol. 10, No. 3 (hlm. 71–106). Nota yang terdiri dari lima bab itu tidak hanya mengupas secara rinci rencana pendirian Faculteit der Letteren (Fakultas Sastra), tetapi juga mengemukakan dampaknya terhadap perkembangan perguruan tinggi lainnya di Hindia-Belanda.

Selain itu juga diusulkan agar Landbouw-hoogeschool dibuka di Bandung, *tidak* di Bogor, yang sebenarnya sudah memiliki sejumlah laboratorium dan lembaga penelitian yang siap pakai serta sejumlah peneliti yang dapat diminta untuk mengajar di sekolah tinggi pertanian.

Alasan utama yang dikemukakan adalah:

> para peneliti di Bogor sudah sangat sibuk dengan tugas penelitian yang dibebankan oleh departemen atasannya [Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan], sehingga tugas mengajarnya—atau tugas menelitinya —atau kedua tugas itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Para pencetus gagasan tersebut beranggapan bahwa pendidikan untuk menghasilkan Insinyur Pertanian dapat diselenggarakan di Bandung, yang dapat merupakan bagian dari Faculteit van Technische Wetenschap, atau dapat berdiri sendiri menjadi Faculteit van Landbouwwetenschap. Dalam perkembangan selanjutnya kedua fakultas itu akan memerlukan tenaga pengajar matematika, fisika, dan biologi, serta tidak tertutup kemungkinan akan menjadi fakultas tersendiri dan dapat bergabung dengan kedua fakultas
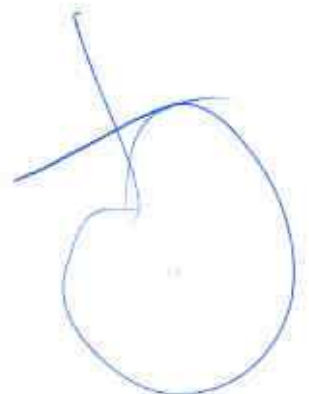
terdahulu membentuk universiteit di Bandung. Dengan demikian di Bandung seharusnya dikembangkan ilmu-ilmu pengetahuan teknik dan ilmu-ilmu matematika dan pengetahuan alam, sedangkan di Jakarta ilmu-ilmu kebudayaan dan ilmu-ilmu kedokteran (Schricke, 1930: 89–91).

Dengan *Gouvernementsbesluit* (Keputusan Pemerintah) No. 5 tanggal 4 Maret 1939, Pemerintah Hindia-Belanda menugaskan Dr. I.J. Brugmans untuk melakukan penjajakan, apakah Faculteit der Letteren dapat didirikan di Jakarta. Laporannya, yang diterbitkan di majalah *Djåwa* tahun 1940, Vol. 20, No. 6 (hlm. 355–439) sangat rinci dan persoalannya dituangkan dalam 52 Pasal yang dikelompokkan menjadi 12 bab sebagai berikut: [1] Pandangan Umum dan Arahan; [2] Kajian Ilmu-ilmu Sosial; [3] Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia; [4] Kajian Sejarah; [5] Kajian Ilmu-ilmu Bangsa; [6] Staf Pengajar; [7] Pendidikan Guru; [8] Tugas tambahan Fakultas Sastra; [9] Rencana Gedung; [10] Universitas Hindia-Belanda; [11] Pembiayaan; dan [12] Saran berkenaan dengan keadaan perang (saat laporan tersebut diajukan pada tanggal 8 Oktober 1940, Perang Dunia II masih berkecamuk).

Pendudukan Negeri Belanda oleh Jerman pada tanggal 10 Mei 1940 dalam Perang Dunia II mempercepat pembukaan *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* (Fakultas Sastra dan Filsafat) dan pendirian *Faculteit van Landbouwwetenschap* (Fakultas Pertanian) di Hindia-Belanda pada waktu itu. Kedua fakultas itu didirikan di Jakarta, masing-masing pada tanggal 1 Oktober 1940 dan tanggal 1 September 1941.
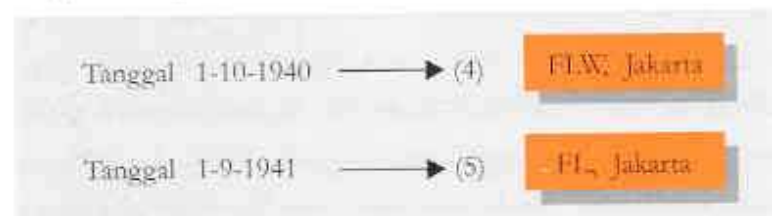
Harapan Mr. C.Th. van Deventer untuk dapat mendirikan Nederlandsch-Indische Universiteit di Hindia-Belanda, yang

dikemukakannya dalam *Algemeene Vergadering Indisch Genootschap* (di Jakarta, tanggal 1 Februari 1910), tidak terwujud sampai Hindia-Belanda diduduki Balatentara Dai Nippon (Jepang) pada tanggal 8 Maret 1942, meskipun persyaratan pendirian suatu universitas—yaitu harus terdiri dari 5 fakultas—sudah terpenuhi tahun 1941. Suasana perang dan waktu yang hanya 6 bulan (September 1941—Maret 1942) rupanya terlalu sempit bagi Pemerintah Hindia-Belanda untuk memikirkan pembukaan suatu universitas.

Dalam masa pendudukan Jepang, Rechtshoogeschool, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, dan Faculteit van Landbouwwetenschap yang pernah dibuka oleh Pemerintah Hindia-Belanda ditutup. Pemerintah Balatentara Dai Nippon kemudian membuka *Djakarta Ika Daigaku* (Sekolah Tinggi Ketabiban Djakarta) pada tanggal 29 April 1943 dan *Bandoeng Koogyoo Daigaku* (Sekolah Tinggi Teknik Bandoeng) pada tanggal 1 April 1944. Keberadaan kedua Sekolah Tinggi tersebut hanya sampai Jepang menyerah pada tahun 1945. Hikmah yang diperoleh dari masa pendudukan Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah, termasuk di Djakarta Ika Daigaku dan Bandoeng Koogyoo Daigaku. Dengan demikian, mulai saat itu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi.

C. BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA (BPTRI)

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, atas prakarsa beberapa tokoh perguruan tinggi didirikan *Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia* di Jakarta (*Perguruan Tinggi di Indonesia*, 1965: 10). Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) mempunyai dua perguruan tinggi (fakultas), yaitu *Perguruan Tinggi Kedokteran* dan *Perguruan Tinggi*

Hukum/Kesusasteraan. Ketua BPTRI adalah Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, sedangkan dr. Soetomo Tjokronegoro menjabat sebagai wakilnya.

BPTRI, 19 Agustus 1945

1. Perguruan Tinggi Kedokteran (1-10-1945), Jakarta
2. Perguruan Tinggi Hukum/Kesusasteraan, Jakarta

Perguruan Tinggi Kedokteran dibuka secara resmi pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 1945 di Jln. Salemba Raya No. 6, Jakarta. Pada hari pembukaan itu hadir dr. Boentaran Martoatmodjo (Menteri Kesehatan pertama pada Kabinet pertama RI), Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo ('Pemimpin Pergoeroean Tinggi Kedokteran'), Prof. dr. Hendarmin, serta undangan lainnya. Pada waktu itu The Netherlands Indies Civil Administration (NICA) sudah menunjukkan kekuasaannya di Jakarta, dan diduga akan menguasai seluruh kota Jakarta. Oleh karena itu, Dewan Guru Perguruan Tinggi Kedokteran mengambil keputusan untuk (1) mempertahankan kedudukan Perguruan Tinggi (Kedokteran) di Jakarta, dan (2) memindahkan sebagian kegiatan pendidikan dokter itu dengan perlengkapan dan perpustakaannya ke daerah Republik Indonesia yang masih aman. Solo dipilih sebagai tempat mendirikan Cabang Perguruan Tinggi Kedokteran, khususnya untuk tempat pendidikan klinik di bawah pimpinan Prof. dr. Asikin Widjajakusumah, dan Klaten ditentukan sebagai tempat pendidikan praklinik di bawah pimpinan

Pada tanggal 16 September 1945, Laksamana Muda W.R. Patterson, Wakil Panglima South East Asia Command (SEAC) yang bermarkas di Singapura, mendarat dengan kapal H.M.S. Cumberland di Tanjung Priok. Dalam daftar nama penumpang kapal itu tercatat nama C.H.O. van der Plas, yang mewakili Dr. H.J. van Mook, Kepala Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

Prof. Dr. Sardjito. Perlu dicatat bahwa pada waktu itu Perguruan Tinggi Kedokteran dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Diduga bahwa Bagian Kesusasteraan dari Perguruan Tinggi Hukum/ Kesusasteraan—yang tanggal pendiriannya tidak berhasil ditemukan—juga hijrah ke Yogyakarta pada masa itu, namun data yang akurat mengenai hal itu belum dapat diperoleh.

D. NOOD-UNIVERSITEIT

Dalam upaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia, Pemerintah Belanda mendirikan Nood-Universiteit (Universitas Darurat) di Jakarta. Pada tanggal 21 Januari 1946 P.A. Kerstens, *fd. Directeur van Onderwijs & Eeredienst* (pj. Direktur Jawatan Pengajaran dan Agama), mewakili Indische Regering (Pemerintah Hindia) membuka *Nood-Universiteit* di Rumah Sakit Cikini, Jalan Raden Saleh, Jakarta. Saat pembukaannya diumumkan, Nood-Universiteit terdiri dari 5 fakultas, yaitu: (1) Geneeskundige Faculteit; (2) Juridische Faculteit; (3) Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte; (4) Landbouwkundige Faculteit; dan (5) Technische Faculteit.

Nood-Universiteit, 21 Januari 1946

1. Geneeskundige Faculteit
2. Juridische Faculteit
3. Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
4. Landbouwkundige Faculteit
5. Technische Faculteit

Jumlah mahasiswa yang tercatat saat Nood-Universiteit dibuka 221 orang, yang terdiri dari 104 mahasiswa Belanda, 103 mahasiswa Tionghoa, dan 14 mahasiswa Indonesia. Presiden Nood-Universiteit adalah Prof. Dr. P.M. van Wulfften Palthe, yang memegang jabatan tersebut hingga akhir April 1946. Kemudian Prof. Dr. A. de Waart menggantikannya hingga pertengahan tahun 1947. Perkuliahan di Nood-Universiteit diadakan di

ruangan dan di kapel Rumah Sakit Cikini tersebut, karena gedung yang dikenal sekarang sebagai Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jln. Salemba Raya No. 6, pada waktu itu ditempati oleh Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia.

Nieuwsgier No. 184 yang terbit pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 1946, mencetak berita sebagai berikut (hlm. 2):

> Pada hari Senin [tanggal 18 Maret 1946], seorang perwira Belanda, yang mendapat tugas dari *geallieerde hoofdkwartier*, datang ke Jln. Salemba Raya No. 6 untuk mengambil alih gedung yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia. Perwira Belanda itu datang bersama Prof. Dr. P.M. van Wulfften Palthe (Presiden Nood-Universiteit) dan beberapa orang polisi sipil Belanda. Pada waktu itu, gedung di Jln. Salemba Raya No. 6, yang terawat dengan sangat baik, tampak kosong. Sebenarnya, dalam salah satu ruangan Prof. Soetomo Tjokronegoro sedang memberikan kuliah kepada 12 orang mahasiswa. Prof. Wulfften Palthe menjelaskan maksud kedatangannya kepada Prof. Soetomo Tjokronegoro dan dr. J. Leimena (Menteri Muda Kesehatan RI), yang segera datang ke Jln. Salemba Raya No. 6 sehubungan dengan peristiwa tersebut. Prof. Soetomo Tjokronegoro dan dr. J. Leimena mengajukan keberatan mereka. Prof. Wulfften Palthe menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mengubah keputusan tersebut dan ia akan datang keesokan harinya seraya mengatakan bahwa mulai hari Selasa [tanggal 19 Maret 1946], pukul 12.00, gedung tersebut akan berada di bawah kekuasaannya. Prof. Wulfften Palthe juga berjanji kepada Prof. Soetomo Tjokronegoro dan yang hadir pada pembicaraan hari Senin [tanggal 18 Maret 1946] itu untuk tetap mengizinkan bendera Merah-Putih berkibar di gedung tersebut. Pada saat pembicaraan berlangsung, terdengar suara letusan senapan. Ternyata, salah seorang polisi sipil telah menjatuhkan senapannya yang berisi peluru. Pada hari itu polisi-polisi sipil Belanda tetap menjaga bangunan tersebut.
>
> Keesokan harinya [Selasa, tanggal 19 Maret 1946], Prof. Wulfften Palthe datang kembali ke Jln. Salemba Raya No. 6, dan ia melihat bendera Merah-Putih telah diganti oleh Komandan Jaga Polisi Sipil menjadi bendera Merah-Putih-Biru. Karena Belanda mengingkari janji, seseorang dari pihak kaum Republik merobek warna Biru bendera itu. Prof. Soetomo Tjokronegoro diberi kesempatan untuk berkemas dan membawa segala sesuatu yang diperlukannya.

Pada bulan November 1946, Kementerian Kemakmuran RI membuka Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor. Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan tersebut kemudian dipindahkan ke Klaten ketika Pemerintah Belanda melancarkan Aksi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 (*Perguruan Tinggi di Indonesia*, 1965: 9).

> Pada hari Rabu [tanggal 20 Maret 1946], dr. Darmasetiawan (Menteri Kesehatan pada Kabinet RI ke-2), bersama Prof. Soetomo Tjokronegoro dan Boediardjo (dari Kementerian Penerangan RI) menemui Sir Archibald Clark Kerr untuk mengajukan protes tertulis dan menyatakan bahwa pencaplokan gedung Perguruan Tinggi Kedokteran RI merupakan awal pencaplokan Roemah Sakit Pergoeroean Tinggi (sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) dan instalasi dinas kesehatan lainnya.

E. UNIVERSITEIT VAN INDONESIË

Universiteit van Indonesië, yang menggantikan Nood-Universiteit, dibuka berdasarkan *Hooger-onderwijsordonantie 1946* (Ordonansi Pendidikan Tinggi 1946), *Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* (Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda) No. 1 tanggal 12 Maret 1947 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1947 No. 47). Ordonansi Pendidikan Tinggi itu berlaku surut mulai bulan November 1945. *Universiteitsreglement* 1946 (Peraturan Universitas 1946) dikeluarkan enam bulan sesudahnya berdasarkan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 3, tanggal 14 September 1947 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1947 No. 170). Perlu dicatat bahwa nama "Indonesië" sebagai pengganti "Nederlandsch-Indië" baru digunakan secara resmi oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 21 September 1948 berdasarkan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 1 (*Staatsbl. Indonesië* 1948 No. 224).

Pada tahun akademi 1949/1950, Universiteit van Indonesië mengelola sembilan fakultas dan empat lembaga pendidikan yang tersebar di lima tempat, yaitu: (1) Faculteit der Geneeskunde di Jakarta & Academisch Instituut voor Lichaamsoefening di Bandung; (2) Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van Sociale Wetenschap di Jakarta; (3) Faculteit van Technische Wetenschap di Bandung & Academisch Instituut voor Opleiding van Tekenleeraren; (4) Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte di Jakarta & Instituut voor Taal- en Cultuur Onderzoek; (5) Faculteit van Landbouwwetenschap di Bogor; (6) Faculteit

der Exacte Wetenschap (dibuka tahun 1947), yang kemudian pada tahun 1948 djubah menjadi Faculteit van Wiskunde en Natuurwetenschap di Bandung; (7) Faculteit der Diergeneeskunde di Bogor (dibuka tahun 1947); (8) Faculteit der Economische Wetenschap di Makassar (dibuka tahun 1947); dan (9) Faculteit der Geneeskunde di Surabaya & Tandheelkundig Instituut (dibuka tahun 1948).

Surat kabar *Merdeka* No. 814 yang terbit pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 1948, mengabarkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 1948 pihak Belanda telah menulis surat kepada Prof. dr. Sartono Kertopati, Direktur Roemah Sakit Pergoeroean Tinggi, untuk memberitahukan bahwa pihak Belanda pada tanggal 24 Agustus 1948 pk. 12.00 siang akan "mengambil oper semua djawatan' rumah sakit tersebut." Pada hari Selasa tanggal

Tanggal 24 Agustus 1948, dr. Darmasetiawan (Menteri Kesehatan RI saat itu) diapit dr. Hanafiah (di kanannya) dan dr. R. Slamet Iman Santoso (di kirinya) memimpin *walk-out* staf dan pegawai, saat pasukan NICA pimpinan Kolonel Drost dikirim pemerintah Belanda untuk mengambil alih Roemah Sakit Pergoeroean Tinggi "Salemba" (sekarang RS "Cipto Mangunkusumo")

24 Agustus 1948 pukul 12.00 siang, Roemah Sakit Pergoeroean Tinggi yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Kedokteran RI dan merupakan benteng pertahanan terakhir RI di Jakarta, diduduki oleh "pasukan" polisi" Belanda. Sekitar pukul 17.00 Prof. dr. Sartono Kertopati beserta 55 dokter, perawat, dan pegawai yang berjumlah kurang lebih 1.200 orang menolak bekerja dengan Belanda dan meninggalkan rumah sakit tersebut dengan kurang lebih 2.000 pasien. Di depan pintu gerbang rumah sakit, mereka berhenti sejenak dan dengan khidmat menyanyikan lagu "Indonesia Raya."

Pendudukan Perguruan Tinggi Kedokteran dan Roemah Sakit Pergoeroean Tinggi oleh Belanda tidak melunturkan semangat dalam kegiatan pendidikan di Balai Perguruan Tinggi RI di Jakarta. Perkuliahan dapat berjalan terus, meskipun harus dilaksanakan di beberapa tempat yang terpisah: di Poliklinik

Sebagian dari 1.200 pegawai Roemah Sakit Pergoeroean Tinggi "Salemba" yang melakukan *walk-out* pada tanggal 24 Agustus 1948, menentang pengambilalihan rumah sakit itu oleh pasukan NICA pimpinan Kolonel Drost

Palang Merah Indonesia (di Jln. Pecenongan) dan di rumah-rumah para guru besar, antara lain di rumah Prof. dr. W.Z. Johannes (Jln. Kramat Raya No. 47); di rumah Prof. dr. Bahder Djohan (Eijkmanweg No. 9, sekarang Jln. Kimia No. 9) dan Eijkmanweg No. 7 (sekarang Jln. Kimia No. 7, perumahan dosen Universitas Indonesia); dan di rumah Prof. dr. R. Slamet Iman Santoso (Alataslaan No. 26, sekarang Jln. Cimandiri No. 26), yang menjadi pusat administrasi, tempat kuliah, dan tempat berkumpulnya mahasiswa BPTRI. Rumah dr. Achmad Mochtar (Jln. Raden Saleh No. 44) dan rumah dr. A. Halim (Jln. Muria) menjadi tempat-tempat penampungan karyawan Roemah Sakit Pergoeroean Tinggi (sekarang RSCM).

F. UNIVERSITEIT INDONESIA/BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (BPTRIS)

Pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pengakuan itu berupa bentuk negara yang disepakati dalam beberapa perundingan sebelumnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Salah satu langkah penting yang ditempuh Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat dalam rangka merealisasikan penyerahan kedaulatan tersebut adalah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1950 tanggal 23 Januari 1950, tentang Perguruan Tinggi (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat No. 9, 1950), yang berlaku pada hari diumumkan, yaitu 30 Januari 1950. Undang-Undang Darurat tersebut mewajibkan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat mengambil segala tindakan dalam waktu sependek-pendeknya—"dan djika perlu menjimpang dari segenap peraturan jang berlaku untuk Universiteit van Indonesië"—agar

perguruan tinggi itu dapat memenuhi aturan nasional Republik Indonesia Serikat.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1950, Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, yang terdiri dari 2 fakultas (dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar) dan Universiteit van Indonesië, yang terdiri dari 9 fakultas (dengan bahasa pengantar bahasa Belanda) dan empat lembaga pendidikannya *digabungkan*, menjadi *Universiteit Indonesia* atau *Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat.*

Sejalan dengan perubahan nama universitas tersebut, nama-nama fakultasnya pun diubah.
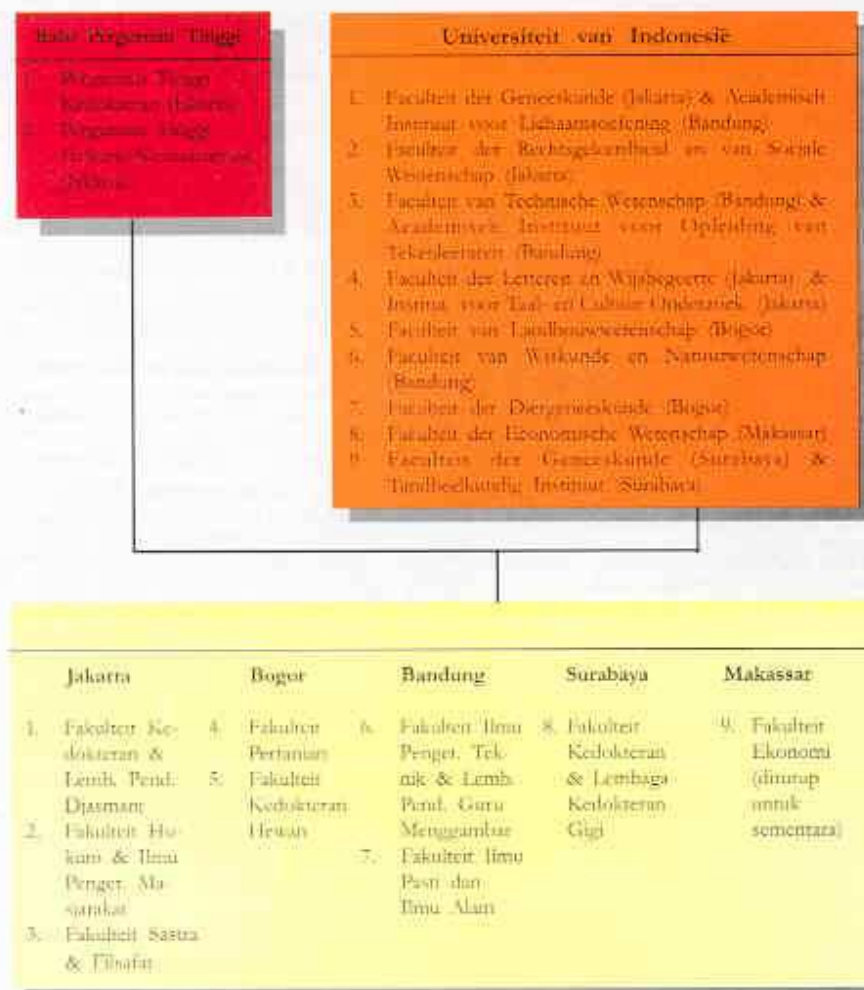
Sesuai dengan Instruksi No. 23/M mengenai Pemakaian Bahasa Nasional, yang dikeluarkan Gubernur Militer Djakarta Raya Letnan Kolonel Daan Jahja pada tanggal 17 Januari 1950, bahasa Indonesia harus digunakan "dalam segala lapangan, terutama dalam urusan pemerintahan," termasuk sebagai bahasa pengantar perkuliahan di perguruan tinggi. Keputusan tersebut, dibuat dan diumumkan Gubernur Militer Djakarta Raja, karena Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 48 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 3, 1950), tentang Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang menetapkan "Bahasa resmi Republik Indonesia Serikat adalah Bahasa Indonesia" (Bagian III, Pasal 4), baru dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1950 dan diberlakukan surut mulai tanggal 27 Desember 1949 (Pasal 197, Ayat 1).

Proses penggabungan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia dengan Universiteit van Indonesië tidak berjalan lancar. Rupanya hanya Perguruan Tinggi Kedokteran yang dapat bergabung relatif lancar dengan Faculteit der Geneeskunde, sedangkan penggabungan Perguruan Tinggi Hukum dengan Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van Sociale Wetenschap—yang pada bulan Februari 1950 namanya diubah menjadi Fakulteit Hukum & Pengetahuan Masjarakat BPTRIS/Universiteit Indonesia—baru dapat dilaksanakan ketika bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat sudah berubah kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tanda lulus *Ujian Perlengkapan Pertama* "Bagian Hukum" dari "Perguruan Tinggi Hukum/ Kesusasteraan" atas nama M. Usama Masduki tertanggal 1 November 1949, dan tanda lulus *Ujian Kandidat II* dari "Fakulteit Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masjarakat" atas nama Mohamad Oesama Masdoeki tertanggal 8 Desember 1950 masih dikeluarkan oleh Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, yang didirikan tanggal 19 Agustus 1945.

INSTRUKSI No. 23/M

Pemakaian Bahasa Nasional

PENDAHULUAN

1. Republik Indonesia Serikat sudah terbentuk dengan merdeka dan berdaulat. Dengan demikian salah suatu tudjuan nasional Indonesia telah tertjapai. Selandjutnja kita harus mulai dengan usaha-usaha nasional. Dalam hal ini sebagai langkah pertama kami perlu bersuaha menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dalam segala lapangan, terutama dalam urusan pemerintahan.

Ada orang berkata: banjak pegawai Negeri RIS tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia. Djawab kita ialah: Bukanlah Negara RIS jang harus menjesuaikan diri kepada para pegawai itu, akan tetapi merekalah jang harus menjesuaikan diri kepada Negara RIS.

Berdasarkan atas pertimbangan diatas maka kami berikan instruksi dibawah ini.

2. NAMA KANTOR-KANTOR PEMERINTAH

Kantor-kantor dan Djawatan-djawatan Pemerintah didalam lingkungan kekuasaan Gubernur Militer Djakarta Raja, baik jang bersifat militer maupun sipil, jang masih memakai nama dalam bahasa asing harus menggantinja dengan nama dalam bahasa Indonesia.

Kalau belum ada ketetapan nama baru dari pimpinan kantor atau djawatan jang lebih tinggi, maka tiap-tiap kepala kantor supaja memikirkan sendiri „nama sementara" dalam bahasa Indonesia bagi kantornja. Kalau dikemudian hari ditetapkan oleh jang wadjib nama-nama kantor jang tetap, maka „nama sementara" itu dapat diganti lagi dengan nama jang tetap itu. Nama-nama dalam bahasa asing atau singkatannja jang telah mendjadi istilah resmi dalam ketentaraan dapat dipakai terus.

Setelah difikirkan „nama sementara" itu, maka Kepala Kantor diharuskan:

a. Memasang papan nama baru itu disamping atau diatas nama-nama bahasa asing. Sesudah satu bulan papan nama jang lama dalam bahasa asing harus dihilangkan.

b. Melaporkan hal itu kepada djawatan atau kementeriannja masing-masing jang berkewadjiban.

c. Mengirimkan tembusan laporan itu kepada kami, agar kemudian dapat kami umumkan.

Instruksi ini harus sudah selesai didjalankan pada tanggal 15 FEBRUARI 1950. Sesudah tgl itu akan diadakan pemeriksaan.

3. TJAP KANTOR ATAU DJAWATAN

Berhubung dengan pergantian nama kantor-kantor dan djawatan-djawatan seperti dimaksudkan diatas, maka tjap-tjap resmi supaja diganti sesuai dengan pergantian nama itu. Lambang negara asing jang mungkin masih terpakai, harus dihapuskan.

4. SURAT-MENJURAT RESMI

Sesuai dengan pengumuman Panitya Persiapan Nasional tanggal 21 Desember 1949 No. 221213, maka semua surat-menjurat resmi dan tata usaha dari djawatan-djawatan, dan kantor-kantor Pemerintah harus dilakukan dalam bahasa Indonesia. Demikian pula harus digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar siaran radio RIS dengan tidak mengurangi pemakaian bahasa asing untuk siaran berita-berita radio untuk luar negeri.

Kalau ada suatu istilah bahasa asing jang tidak dapat diterdjemahkan dalam bahasa Indonesia, istilah dalam bahasa asing itu dapat terus dipakai dengan edjaan setjara Indonesia (tjontoh: Republiek atau Republic mendjadi Republik; national mendjadi nasional).

Untuk melaksanakan surat-menjurat dalam bahasa Indonesia itu, tidak perlu diterima pegawai baru sebagai djuru bahasa; apabila perlu tjukuplah kepala kantor menundjuk seorang pegawai jang sudah ada untuk melakukan pekerdjaan terdjemahan.

Guna mempertjepat terlaksananja pemakaian bahasa Indonesia dalam segala urusan pemerintahan, djawatan-djawatan diharap mengadakan kursus bahasa Indonesia bagi para pegawai jang membutuhkan; apabila kurang pegawai jang perlu mengikuti kursus-kursus itu, hendaknja diadakan kursus gabungan buat beberapa kantor atau djawatan. Biaja kursus-kursus itu supaja dipikul bersama oleh para jang mengikutinja, sedang alat-alatnja dapat dibiajai dari djawatan atau kantor.

5. BAHASA PENGANTAR DALAM RAPAT² RESMI

Dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan resmi harus dipakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Apabila ada seorang hadirin terpaksa menggunakan bahasa asing untuk melahirkan fikirannja, oleh karena ia tidak faham bahasa Indonesia, maka ia harus mendapat izin lebih dahulu dari pemimpin rapat atau pertemuan.

Apa jang diutarakan olehnja, kemudian harus diuraikan dalam bahasa Indonesia oleh pemimpin rapat atau pertemuan. Hal ini harus ditjatat dalam notulen.

6. NAMA TEMPAT DAN DJALAN-DJALAN

Nama kota „Batavia" telah diganti dengan „Djakarta" dan nama „Meester Cornelis" diganti dengan „Djatinegara".

Apabila sesudah tanggal 1 MARET 1950 ada surat-surat atau kiriman dari dalam Negeri dikirimkan dengan perantaraan pos atau alat perhubungan umum, masih memakai alamat „Batavia" atau „Meester Cornelis", surat atau kiriman lain itu akan dikirim kembali kepada sipengirim, atau kalau pengirimnja tidak terang, diperlakukan sebagai surat atau kiriman jang tidak terang alamatnja.

Sebelum ditetapkan nama dalam bahasa Indonesia buat djalan-djalan dan tempat-tempat jang masih memakai nama bangsa asing, maka supaja digunakan nama benda dalam bahasa Indonesia sebagai ganti nama benda dalam bahasa asing, misalnja:

„djalan" untuk mengganti „weg" atau „laan"
„djalan raya" untuk mengganti „boulevard"
„taman" untuk mengganti „plantsoen"
„lapangan" untuk mengganti „plein"

Mendahului penggantian nama jang tetap bagi djalan-djalan dan tempat-tempat, maka semua fihak resmi diharuskan memakai nama jang sudah lazim digunakan oleh rakjat untuk pengganti nama djalan atau tempat jang masih ada dalam bahasa asing, misalnja:

„Gambir (utara, timur, selatan, barat)" untuk mengganti „Koningsplein (noord, oost, zuid, west)".

7. KANTOR-KANTOR DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PARTIKULIR

Kepada para penduduk partikulir d i a n d j u r k a n, supaja mengganti atau mendampingi kata-kata bahasa asing diatas papan nama kantor atau perusahaannja dengan kata-kata bahasa Indonesia. Nama kantor atau perusahaan tidak perlu diubah atau diganti. Misalnja: Restaurant „De Groene Aap" supaja diganti atau didampingi dengan Rumah Makan „De Groene Aap".

Boekhandel „De Vlijtige Lezer" supaja diganti atau didampingi dengan Toko buku „De Vlijtige Lezer".

Apabila pada papan-papan pemberitahuan, papan-papan nama perusahaan atau nama gedung-gedung dsb. tertulis kata-kata dalam bahasa lebih dari satu matjam, maka kata-kata dalam bahasa Indonesia hendaknja ditulis diatasnja atau disebelah kanan.

Kepada perusahaan-perusahaan dan toko-toko partikulir dianjurkan pula, supaja menggunakan bahasa Indonesia dalam surat-menjurat serta dalam reklamenja, baik reclame itu dikeluarkan dalam surat chabar, madjallah, gambar hidup atau dengan djalan lain.

K e t e r a n g a n: Instruksi ini tidak berlaku untuk gedung-gedung perwakilan Negeri asing dan tempat-tempat tentara Belanda.

Istilah-istilah asing atau s i n g k a t a n - s i n g k a t a n istilah-istilah asing jang telah d i l a z i m k a n dalam T e n t a r a k i t a dapat dipakai terus (misalnja HQ, Order, Co dsb.).

Djakarta, 17 Djanuari 1950

GUBERNUR MILITER DJAKARTA RAYA
DAAN JAHJA
Lt. Kol. TNI

Kepada
1. Basis Komandan Djakarta Raya
2. Gubernur Djakarta
untuk disiarkan seluas-luasnja.

2236

Instruksi No. 23/M mengenai Pemakaian Bahasa Nasional sebagaimana tercetak dalam surat kabar *Nieuwsgier*, 4 Februari 1950, hlm. 4

M. USAMA MASDUKI

HUKUM

PERLENGKAPAN PERTAMA

Repro ijazah ketikan sendiri M. Usama Masduki

BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA

Repro ijazah Mohamad Oesama Masdoeki

Harian *Merdeka* No. 1504 Tahun ke-6, yang terbit hari Selasa tanggal 12 Desember 1950 memberitakan bahwa pada hari Senin malam, tanggal 11 Desember 1950, di Gedung Balai Perguruan Tinggi Salemba (sekarang gedung FKUI) telah diadakan upacara singkat untuk meresmikan penggabungan "Fakulteit Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masjarakat RI" dengan "Fakulteit Hukum dari Universiteit Indonesia." Pada upacara itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI (dr. Bahder Djohan) membacakan ketetapan Menteri P.P. & K. dan, atas nama Presiden RI, meresmikan penggabungan kedua fakultas tersebut serta menyatakan secara resmi berdirinya fakultas baru dengan nama "Fakulteit Ilmu Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masjarakat dari Balai Perguruan Tinggi RI." Dalam sambutannya, Menteri P.P. & K. mengatakan bahwa berhubung dengan beberapa kesulitan yang dialami, penggabungan kedua fakultas tersebut baru dapat dilaksanakan pada hari Senin malam itu. Pada saat itu pula Menteri P.P. & K. melantik para Guru Besarnya, dan Presiden Balai Perguruan Tinggi RI (Ir. Soerachman) memberikan tanda jabatan kepada Prof. Mr. Djokosoetono, yang

diangkat sebagai Ketua fakultas tersebut. Para Guru Besar dan Dosen yang dilantik pada upacara malam itu adalah: (1) Prof. Mr. Djokosoetono, Guru Besar dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Negara (Ketua Fakulteit); (2) Prof. Dr. Mr. Hazairin, Guru Besar Luar Biasa dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Sekretaris Fakulteit); (3) Prof. Mr. S. Kolopaking Sanyatavijaya, Guru Besar Luar Biasa dalam Sosiologi dan Ekonomi; (4) Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Guru Besar Luar Biasa dalam Hukum Agraria dan Politik Agraria; (5) Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Ekonomi Indonesia; (6) Prof. Mr. A.P. Funke, Guru Besar dalam Hukum Dagang; (7) Prof. Mr. W.L.G. Lemaire, Guru Besar Luar Biasa dalam Hukum Perselisihan; (8) Prof. Dr. H. Muller, Guru Besar dalam Kriminalistik; (9) Prof. Dr. D.H. Burger, Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Indonesia dengan tugas memberi "Capita Selecta" dalam mata kuliah tersebut.; (10) Prof. Mr. W.M.E. Noach, Guru Besar dalam Kriminologi; (11) Prof. Dr. R.F. Beerling, Guru Besar dalam Filsafat dan Filsafat Hukum; (12) Mr. H.Th. Chabot, Dosen Luar Biasa dalam Hukum Adat dengan tugas memberi "Capita Selecta" dalam mata kuliah tersebut; (13) Mr. R. Satochid Kartanegara, Dosen Luar Biasa dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana; (14) Mr. Koesoemadi, Dosen Luar Biasa dalam Hukum Perdata; dan (15) Mr. Soewandi, Dosen Luar Biasa dalam Hukum Notariat.

Sampai akhir tahun lima puluhan, beberapa kuliah di Universitet Indonesia masih diselenggarakan dalam bahasa Belanda, karena jumlah tenaga pengajar bangsa Belanda pada saat itu masih cukup banyak. Ijazah-Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitet Indonesia/Balai Perguruan Tinggi RI seharusnya ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi bahkan hingga akhir tahun 1952 ada yang masih ditulis dalam bahasa Belanda, dan ada juga yang ditulis dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dengan terjemahannya dalam

bahasa Belanda). Ijazah *dokter* pada saat itu ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Latin dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Perlu dicatat bahwa hingga tanggal 23 September 1952 lambang Makara-UI (*lihat* Bab 3) belum dicantumkan pada ijazah yang dikeluarkan Balai Perguruan Tinggi RI (Universitet Indonesia). Ijazah *Candidaatsexamen* (berbahasa Belanda) atas nama Soenarjo, yang dikeluarkan oleh Universiteit van Indonesië, Faculteit der Diergeneeskunde di Bogor tanggal *24 Februari 1951*, dan ijazah *Propaedeutisch examen 2e gedeelte* (berbahasa Indonesia dengan terjemahannya dalam bahasa Belanda) atas nama Soemartono, yang dikeluarkan oleh Balai Perguruan Tinggi RI, Fakultet Pertanian di Bogor tanggal *30 Agustus 1950*, masih menggunakan lambang kota Buitenzorg (Bogor).

UNIVERSITEIT van INDONESIË
Faculteit der Diergeneeskunde

SOENARJO

CANDIDAATSEXAMEN

DOCTORAALEXAMEN

24 - 2 - 1951

DE GRAAD WERD VERLEEND, HET LID

Repro ijazah Soenarjo

BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Universiteit van Indonesie
FAKULTET PERTANIAN
Faculteit van Landbouwwetenschap

Repro ijazah Soemartono

Lambang yang menyerupai lambang Rechtshoogeschool Batavia tercantum pada ijazah *Doktoral I* (berbahasa Indonesia) atas nama Mohamad Oesama Masdoeki, yang dikeluarkan Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masjarakat, Balai Perguruan Tinggi RI di Jakarta tanggal *28 Agustus 1952*.

JAARBOEKJE

RECHTSHOOGESCHOOL

BATAVIA

1940

Repro halaman judul buku *Jaarboekje der Rechtshoogeschool te Batavia 1940*

Repro ijazah Mohamad Oesama Masdoeki

Ijazah *dokter* (berbahasa Latin dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia) atas nama M. Mahar Mardjono dari Perguruan Tinggi Kedokteran di Jakarta tanggal *17 Mei 1952*, dan ijazah *Sarjana Sastra* (berbahasa Indonesia) atas nama R.M. Koentjaraningrat dari Balai Perguruan Tinggi RI, Fakultet Sastra dan Filsafat di Jakarta tanggal *23 September 1952* tidak menggunakan lambang apa pun.

REPUBLIK INDONESIA
PERGURUAN TINGGI
KEDOKTERAN

IDJAZAH DOKTER

Facultas medica DJAKARTAE
declarat et testatur
M. MAHAR MARDJONO
natum in Semarang
die VIII mensis I anni MCMXXIII

Dewan Guru pada Perguruan Tinggi Kedokteran
DJAKARTA menerangkan bahwa
M. MAHAR MARDJONO
lahir di Semarang
pada tanggal 8 Djanuari 1923
jang surat bertanda tangan dibawah ini, telah lulus udjian dokter sebagai ditetapkan dalam pasal 4 dari pada Peraturan Sementara tentang Pengadjaran Tinggi Kedokteran (disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 18 Djanuari 1947, No. 136/Um.).
Oleh karenanja ia telah mendjadi „dokter" (arts).

DJAKARTA, 17 Mei 1952

BALAI PERGURUAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta 23 September 1952

Repro ijazah M. Mahar Mardjono

Repro ijazah R.M. Koentjaraningrat

Suasana perkuliahan Anatomi di STOVIA, Hospitaalweg (1902)

BAB 2
CIKAL BAKAL UNIVERSITAS INDONESIA

Kehadiran perguruan tinggi di Indonesia, tidak terkecuali Universitas Indonesia, tidak terpisahkan dari perjuangan para perintis pendidikan bangsa kita, dukungan kaum terpelajar bangsa Belanda, dan usaha Pemerintah Hindia-Belanda dalam menjalankan Politik Etisnya hampir satu setengah abad yang lalu.

Silsilah Universitas Indonesia dapat dirunut dari sejumlah lembaga pendidikan yang didirikan jauh sebelum Universitas Indonesia dilahirkan, yaitu lembaga pendidikan yang didirikan oleh (1) Pemerintah Hindia-Belanda hingga tahun 1942; (2) Pemerintah Balatentara Dai Nippon hingga tahun 1945; (3) Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 1945; dan oleh (4) Pemerintah Pendudukan Belanda dari tahun 1946 hingga 1949.

A. Dari *Dokterdjawaschool* di Batavia ke *Fakulteit Kedokteran* di Jakarta

Pada peringatan 75 tahun (1851–1926) Pendidikan Kedokteran di Jakarta, Waart (1926: 1) mengemukakan bahwa di tahun 1847 beberapa penyakit mewabah di Keresidenan Banyumas. Dr. W. Bosch, yang pada waktu itu menjabat sebagai *Chef over den Geneeskundigen Dienst* (Kepala Jawatan Kesehatan) menekankan bahwa tenaga bumiputra sangat diperlukan untuk diperbantukan dalam menangani masalah kesehatan itu. Dalam usul yang diajukannya kepada pemerintah pada tanggal 9 Oktober dan 11 Oktober 1847, Bosch meminta pertimbangan pemerintah untuk mendidik penduduk suku Jawa di beberapa Rumah Sakit Militer di Pulau Jawa. Para pemuda Jawa yang akan diterima untuk

pendidikan tersebut "harus cakap, dapat menulis dan membaca bahasa Jawa dan bahasa Melayu, mempunyai bakat, dan mau bekerja di bidang kedokteran." Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka keluar *Gouvernementsbesluit* (Keputusan Pemerintah) No. 22 tanggal 2 Januari 1849, yang menetapkan antara lain:

1. Sejumlah 30 pemuda suku Jawa akan dididik secara cuma-cuma menjadi tenaga pembantu di bidang kedokteran dan *vaccinateur* (mantri cacar) di beberapa Rumah Sakit Militer;
2. Yang dapat diterima untuk pendidikan tersebut hanyalah pemuda santun dari keluarga baik-baik, dapat membaca serta menulis bahasa Melayu dan bahasa Jawa, mempunyai bakat, dan setelah menyelesaikan pendidikan selama dua tahun bersedia bekerja untuk pemerintah sebagai mantri cacar. Jika mereka telah mendapat banyak pengalaman dan dapat memberi pertolongan medis, mereka akan dikirim ke tempat asalnya.

Selanjutnya Waart (1926: 2–94) mengemukakan bahwa berdasarkan surat keputusan itu, pendidikan dimulai pada bulan Januari 1851 di Jakarta. Siswa yang diterima pada angkatan pertama adalah 12 pemuda suku Jawa. G. Wassink, yang waktu itu menjabat sebagai *Dirigeerend Officier van Gezondheid 1e Klasse*, menyatakan kekagumannya akan hasil pendidikan yang dinilai sangat baik dan menakjubkan (*met de meest glansrijke uitkomsten bekroond*). Kekagumannya memang layak diucapkan, lebih-lebih mengingat kenyataan bahwa siswa yang diterima hanya dapat membaca dan menulis dalam bahasa Jawa dan bahasa Melayu sekadarnya, dan tidak mengerti bahasa Belanda. Mereka dididik tidak lebih dari 2 tahun dalam sejumlah mata ajaran, yaitu: Bahasa Belanda, Berhitung, Ilmu Ukur, Ilmu Bumi (Eropa dan Hindia-Belanda), Astronomi, Kimia Anorganik, Ilmu Alam, Mekanika, Geologi, Botani, Zoologi, Anatomi dan Fisiologi, Pengantar Patologi, Ilmu

Kebidanan, dan Ilmu Bedah. Sebagai bahasa pengantar dalam kelas digunakan bahasa Melayu.

Lulusan pertama pendidikan tersebut dihasilkan pada tahun 1853. Dengan Keputusan Pemerintah No. 10 tanggal 5 Juni 1853 para lulusan itu diberi gelar *Dokter-Djawa*. Lembaga pendidikan tersebut kemudian dikenal sebagai *Dokterdjawaschool*. Dalam perkembangan selanjutnya lembaga pendidikan itu tidak hanya menerima siswa dari suku Jawa, tetapi juga menerima siswa dari suku lain. Pada tahun 1856, diterima dua siswa dari Sumatra Barat dan dua siswa dari Minahasa. Pada tahun-tahun berikutnya lembaga pendidikan tersebut sudah menerima siswa dari seluruh penjuru kepulauan.

Serangkaian upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dilakukan oleh lembaga pendidikan Dokterdjawaschool. Perbaikan itu meliputi bidang akademi dan administrasi, yaitu:

1. Pada tahun 1856 dikeluarkan Keputusan Pemerintah No. 3 tanggal 11 Mei 1856, yang menempatkan Dokter-Djawa di bawah pengawasan Civil Geneeskundigen Dienst (Dinas Kesehatan Sipil);
2. Pada tahun 1864, masa pendidikan diperpanjang dari *dua* tahun menjadi *tiga* tahun dan jumlah beban pendidikan ditambah menjadi 27 mata ajaran;
3. Pada tahun 1875, masa pendidikan diperpanjang menjadi *tujuh* tahun: *dua* tahun untuk tingkat pendidikan persiapan dan *lima* tahun untuk tingkat pendidikan kedokteran. Pelajaran bahasa Belanda di tingkat persiapan diperbanyak dan bahasa pengantar pendidikan diubah menjadi bahasa Belanda;
4. Berdasarkan *Gouvernementsbesluit* No. 2 tanggal 15 Januari 1888, Dokterdjawaschool dinamakan School tot Opleiding van Inlandsche Geneeskundigen, yaitu nama yang jarang dipakai;
5. Dalam bulan Mei 1898, Dr. H.F. Roll mengajukan usul kepada pemerintah tentang reorganisasi Dokterdjawaschool untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tamatannya. Berdasarkan usul Roll itu, nama Dokterdjawaschool diubah

menjadi School tot Opleiding van Inlandsche Artsen—lebih dikenal dengan singkatannya STOVIA—dan sejak tahun ajaran 1901–1902 tamatan sekolah tersebut diberi gelar *Inlandsch Arts*. Dalam perkembangan selanjutnya, School tot Opleiding van *Inlandsche* Artsen diubah namanya menjadi School tot Opleiding van *Indische* Artsen, sedangkan tamatannya diberi gelar *Indisch Arts*;

6. Pada tanggal 1 Maret 1902, gedung baru STOVIA di Hospitaalweg (sekarang Jln. Dr. Abdul Rachman Saleh [*sic*] No. 26 di Jakarta Pusat) resmi dibuka;

Sekolah dan asrama STOVIA (1902–1920) di Hospitaalweg, yang kemudian hanya berfungsi sebagai asrama. (Sekarang Gedung Kebangkitan Nasional, Jln. Dr. Abdul Rachman Saleh No. 26, Jakarta.)

7. Mulai tahun 1902, masa pendidikan menjadi *sembilan* tahun: *tiga* tahun di tingkat pendidikan persiapan dan *enam* tahun di tingkat pendidikan kedokteran;
8. Pada tahun 1913, kualitas pendidikan ditingkatkan lagi dengan memperpanjang masa pendidikan menjadi *sepuluh* tahun: di tingkat pendidikan persiapan tetap *tiga* tahun, sementara tingkat pendidikan kedokteran menjadi *tujuh* tahun;
9. Pada tanggal 26 Agustus 1916, peletakan batu pertama gedung baru STOVIA di Salembaweg (sekarang Jln. Salemba Raya No. 6) dilakukan oleh Gravin N. van Limburg Stirum-van Sminia. Pada tanggal 5 Juli 1920 gedung tersebut secara resmi digunakan;

Peletakan batu pertama gedung utama STOVIA di Jln. Salemba Raya No. 6, Jakarta, oleh Gravin N. van Limburg Stirum-van Sminia pada tanggal 26 Agustus 1916, disaksikan Gubernur-Jenderal

Gedung utama STOVIA di Jln. Salemba Raya No. 6, Jakarta, yang mulai digunakan tanggal 5 Juli 1920. (Sekarang Fakultas Kedokteran UI, Jln. Salemba Raya No. 6, Jakarta.)

10. Pada tahun 1927, tingkat pendidikan persiapan di STOVIA dihapus. Siswa-siswa pada tingkat itu dipindahkan ke jalur sekolah setingkat Algemene Middelbaar School atau AMS (Sekolah Menengah Atas). Tahun 1927 merupakan tahun terakhir STOVIA menerima siswa untuk tingkat pendidikan kedokteran bagi tamatan AMS-B. Pada saat itu pemuda R. Slamet Iman Santoso (kini Prof. Dr. *h.c.* Dr. *h.c.* dr. R. Slamet Iman Santoso), yang menyelesaikan pendidikan AMS-B Yogyakarta tahun 1926, merupakan salah seorang *keplek* [dari *eleve*, julukan untuk siswa STOVIA] yang duduk di 'kelas penutup pagar', *hekken sluiterit klas* (Oemarjati 1992: 75–78).

Pada tanggal 16 Agustus 1927, berdasarkan Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 4 tanggal 9 Agustus 1927 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1927 No. 396), dibuka *Geneeskundige Hoogeschool*—lebih dikenal dengan singkatannya GHS (Sekolah Tinggi Kedokteran)—di Jakarta. Pendidikan di GHS dibagi dalam tiga tahap utama, setiap tahap pendidikan diakhiri masing-masing dengan Ujian Kandidat (*Candidaatsexamen*), Ujian Doktoral (*Doctoraalexamen*), dan Ujian Dokter (*Artsexamen*). Lama pendidikan untuk menyelesaikan dua tahap yang pertama adalah lima tahun. Tamatan GHS diberi gelar *Arts*.

Dalam masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang mendirikan *Djakarta Ika Daigaku* (Sekolah Tinggi Ketabiban Djakarta) berdasarkan *Makloemat Gunseikan* No. 5 Tahun 2603 tanggal 13 bulan 4 tahun Syoowa 18 (2603), atau tanggal 13 April 1943. Sekolah Tinggi Ketabiban Djakarta itu dibuka oleh Pemerintah Balatentara Dai Nippon (Jepang) bertepatan dengan tanggal peringatan kelahiran Kaisar Tenno Heika, yaitu tanggal 29 bulan 4 tahun Syoowa 18 (2603) atau tanggal 29 April 1943. Pendidikan di Ika Daigaku dibagi dalam tiga *bu* (bagian), yaitu (1) Daigaku-*bu* (Bagian Pelajaran Tertinggi); (2) Sika Igaku Senmon-*bu* (Bagian Ilmu Tabib Gigi); dan (3) Yakugaku Senmon-*bu* (Bagian Ilmu Obat-obatan). Lama pendidikan di Daigaku-*bu* adalah 5 (lima) tahun, sedang lama pendidikan di Sika Igaku Senmon-*bu* dan di Yakugaku Senmon-*bu* masing-masing 3 (tiga) tahun. Pada saat itulah Centraal Burgelijke Ziekeninrichting (CBZ) diubah namanya menjadi Ika Daigaku Byooin. Usia Jakarta Ika Daigaku hanya kurang dari dua tahun, karena pada Perang Dunia II Pemerintah Kekaisaran Jepang menyerah kalah pada tanggal 15 Agustus 1945.

Pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 1945, *Perguruan Tinggi Kedokteran* dibuka di Jln. Salemba Raya No. 6, Jakarta. Pada saat itu juga dilakukan pembaruan mata kuliah pada Perguruan Tinggi tersebut dengan menghapus pelajaran bahasa Jepang serta meniadakan daftar hadir (*absentielijst*). Di samping itu, ditambahkan

mata ajaran bahasa Inggris (oleh Tn. Soemarno) dan pelajaran bahasa Jerman (oleh Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso). Pada saat itu juga Ika Daigaku Byooin diubah namanya menjadi Roemah Sakit Pergoeroean Tinggi.

Pada tanggal 21 Januari 1946, Pemerintah Pendudukan Belanda membuka *Geneeskundige Faculteit* sebagai salah satu fakultas dari *Nood-Universiteit*. Pada tanggal 12 Maret 1947, Geneeskundige Fakulteit (Nood-Universiteit) menjadi *Faculteit der Geneeskunde* dari *Universiteit van Indonesië* dengan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 1 tanggal 12 Maret 1947 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1947 No. 47). Faculteit der Geneeskunde kemudian diubah namanya menjadi *Fakulteit Kedokteran* pada tahun 1950. Fakultas tersebut menjadi bagian dari *Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat* (BPTRIS), yang berkedudukan di Jakarta.
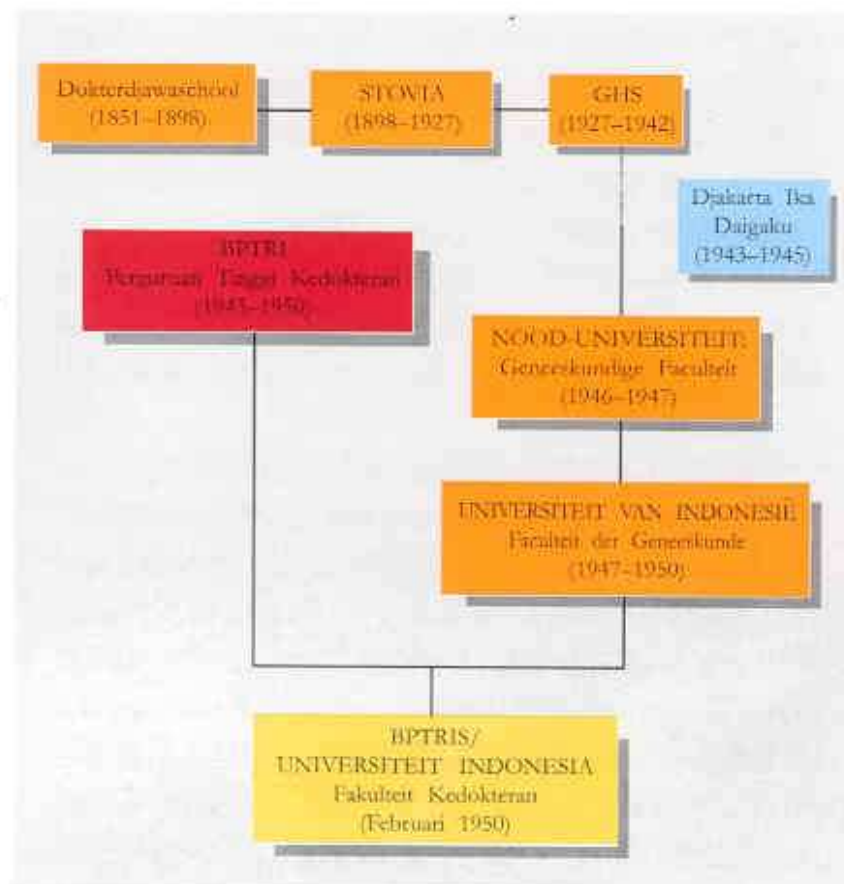
B. Dari *Opleidingsschool voor Inlandsche Rechtskundigen* di Batavia ke *Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masjarakat* di Jakarta

Opleidingsschool voor Inlandsche Rechtskundigen atau OVIR (Sekolah Pendidikan untuk Ahli Hukum Bumiputra) didirikan di Jakarta dengan Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 14 tanggal 29 Januari 1909 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1909 No. 93). Sekolah Pendidikan untuk Ahli Hukum Bumiputra tersebut baru dibuka pada tanggal 26 Juli 1909 di Koningsplein Zuid 10 (Jln. Medan Merdeka Selatan No. 10), Jakarta. Pada saat pembukaan hadir Gubernur-Jenderal J.B. van Heutsz. Pendidikan Ahli Hukum itu hanya diperuntukkan para pemuda suku Jawa dan suku Madura. Pendirian Sekolah Pendidikan untuk Ahli Hukum Bumiputra tersebut merupakan realisasi dari permintaan Bupati Serang, R.T. Achmad Djajadiningrat kepada Pemerintah pada tanggal 21 November 1903, untuk dapat menempatkan seorang bumiputra yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kewibawaan di kantor-kantor pengadilan Hindia-Belanda.

Dengan Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 24 tanggal 22 Mei 1922 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1922 No. 343) dibuka *Rechtsschool* (Sekolah Hukum) yang menggantikan Opleidingsschool voor Inlandsche Rechtskundigen. Para pemuda dari berbagai suku bangsa dapat diterima menjadi siswa Rechtsschool.

Untuk melengkapi sarana pendidikan, Rechtsschool membangun Kompleks Gedung Sekolah Hukum (*rechtsschoolgebouw*) dan Asrama Siswa Sekolah Hukum (*internaat*) di Pegangsaan Timur, yang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 20 September 1920. Pada tanggal 1 September 1926, pengelolaan asrama dan gedung Sekolah Hukum dipisahkan secara administratif. Pada saat itu Asrama Siswa Sekolah Hukum juga menerima siswa-siswa STOVIA. *Internaat* tersebut pernah digunakan untuk Asrama Mahasiswa UI hingga tahun 1994. Pada tanggal 18 Mei 1928,

di usianya yang ke-19, Rechtsschool ditutup. J. Hardeman, *Directeur van Onderwijs en Eeredienst,* hadir pada penutupan Sekolah Hukum tersebut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 1 tanggal 9 Oktober 1924 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1924 No. 456), *Rechtshoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) didirikan di Jakarta. Rechtshoogeschool dibuka secara resmi pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur-Jenderal Mr. D. Fock di Compagnieszaal, Museum van het Bataviaas Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Koningsplein West (Balai Kompeni, Museum Pusat, Jln. Medan Merdeka Barat). Pada saat itu Rechtshoogeschool belum memiliki tempat yang layak untuk perkuliahan. Perkuliahan diselenggarakan di bekas perumahan, dan secara kebetulan juga di bekas rumah Mr. D. Fock sewaktu yang bersangkutan membuka praktiknya. Prof. Mr. Paul Scholten ditunjuk untuk memimpin Rechtshoogeschool. Pada saat dibuka, Rechtshoogeschool memiliki tujuh Guru Besar, di antaranya Prof. Dr. Raden Aria Hoesein Djajadiningrat. Dengan demikian, Prof. Dr. Raden Aria Hoesein Djajadiningrat merupakan Guru Besar bumiputra pertama yang diangkat baik oleh Pemerintah Hindia-Belanda, maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ketika Pemerintah Balatentara Dai Nippon (Jepang) berkuasa di Indonesia, Rechtshoogeschool ditutup.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, *Perguruan Tinggi Hukum/ Kesusasteraan,* yang merupakan salah satu perguruan tinggi dari Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, didirikan di Jakarta.

Pada tanggal 21 Januari 1946, Juridische Faculteit dari Nood-Universiteit dibuka di Jakarta oleh Pemerintah Pendudukan Belanda. Dengan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 1 tanggal 12 Maret 1947, *Staatsbl. Ned. Indië* 1947 No. 47, Juridische Faculteit (Nood-Universiteit) menjadi *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van Sociale Wetenschap* dari *Universiteit van Indonesië*, yang dibuka oleh Pemerintah Pendudukan Belanda di

Jakarta. Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van Sociale Wetenschap kemudian diubah namanya menjadi *Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masjarakat* pada tahun 1950. Fakultas tersebut menjadi bagian dari *Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat* yang berkedudukan di Jakarta.
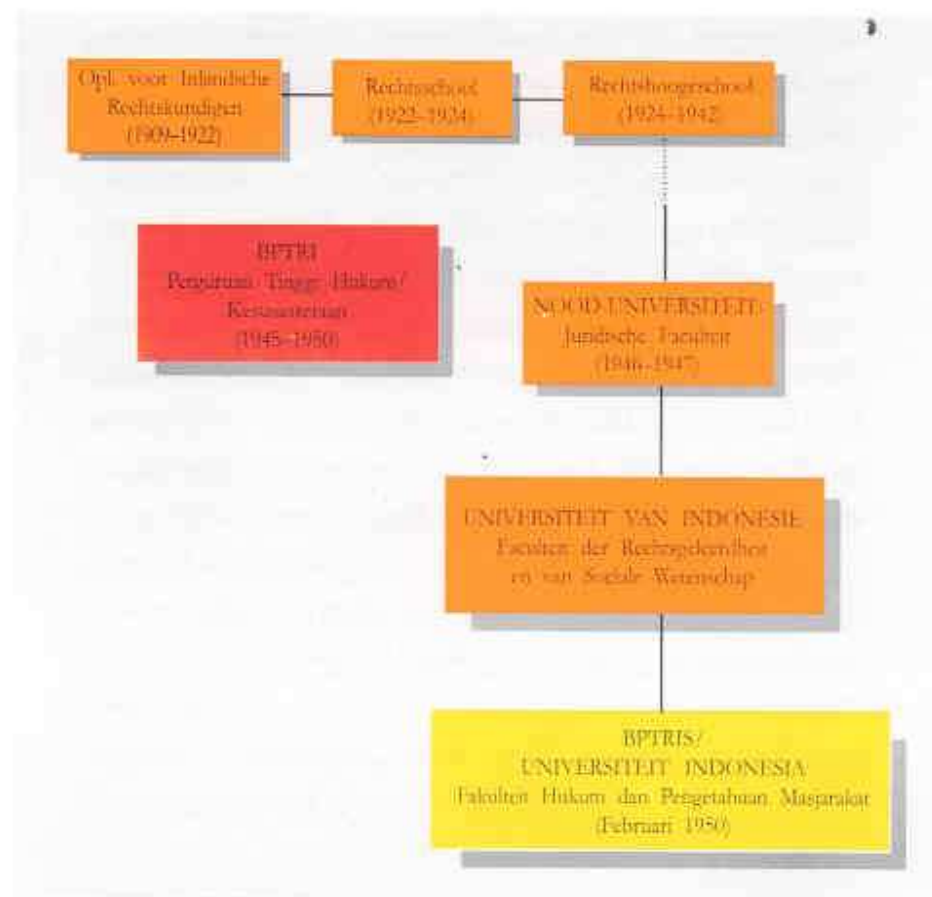
C. Dari *Technische Hoogeschool* di Bandoeng, ke *Fakulteit Ilmu Pengetahuan Teknik* di Bandung

Pada tanggal 3 Juli 1920, Koninklijk Instituut voor Technische Onderwijs in Nederlandsch-Indië mendirikan *Technische Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Dengan Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 29 tanggal 11 April 1921 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1921 No. 218), sekolah tinggi itu diberi bantuan (subsidi) oleh Pemerintah, dan kemudian dengan

Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 1 tanggal 9 Oktober 1924 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1924 No. 456) sekolah tinggi tersebut menjadi milik pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 2 tanggal 14 Oktober 1924 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1924 No. 476), tanggal 18 Oktober 1924 ditetapkan sebagai tanggal penyerahan Technische Hoogeschool dari Koninklijk Instituut van Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië kepada pemerintah.
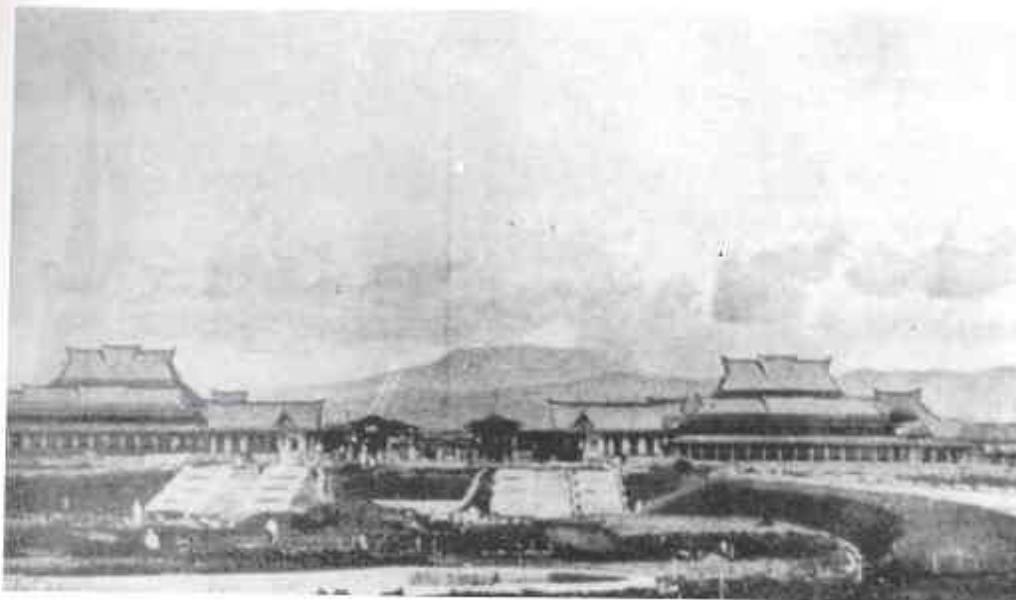
Kampus Technische Hoogeschool Bandung dipandang dari Ijzermanpark (sekarang Taman Ganesha) dan Gunung Tangkuban Perahu sebagai latar belakang (1920)

Dalam masa pendudukan Jepang, dibuka *Bandoeng Koogyoo Daigaku* (Sekolah Tinggi Teknik Bandoeng) oleh Pemerintah Balatentara Dai Nippon berdasarkan *Maklumat Gunseikan* No. 47 tertanggal 15, bulan 7 tahoen Syoowa 19 (2604), atau tanggal 15 Juli 1944. Maklumat tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 bulan 4 tahun Syoowa 19 (2604), atau tanggal 1 April 1944. Pasal 2 Maklumat itu menyebutkan bahwa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung dibagi dalam dua bagian (*bu*), yaitu Daigaku-*bu* (Bagian Pelajaran Tinggi) dan Senmon-*bu* (Bagian Pelajaran Istimewa). Pasal 4 menetapkan bahwa lama pendidikan untuk setiap *bu* adalah

3 (tiga) tahun, dan siswa yang diterima di Daigaku-*bu* adalah tamatan Kootoo Tyuugakkoo (Sekolah Menengah Tinggi), sedangkan siswa yang diterima di Senmon-*bu* adalah tamatan Tyuugakkoo (Sekolah Menengah Pertama).

Pada tanggal 21 Januari 1946, *Technische Faculteit* dan Nood-Universiteit dibuka di Jakarta oleh Pemerintah Pendudukan Belanda. Dengan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 1 tanggal 12 Maret 1947 (*Staatsbl. Ned. Indie* 1947 No. 47), Technische Faculteit (Nood-Universiteit) menjadi *Faculteit van Technische Wetenschap* dari Universiteit van Indonesië. Pada tahun 1950, Faculteit van Technische Wetenschap kemudian diubah namanya menjadi *Fakulteit Ilmu Pengetahuan Teknik* pada tahun 1950. Fakultas tersebut menjadi bagian dari Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Bandung.
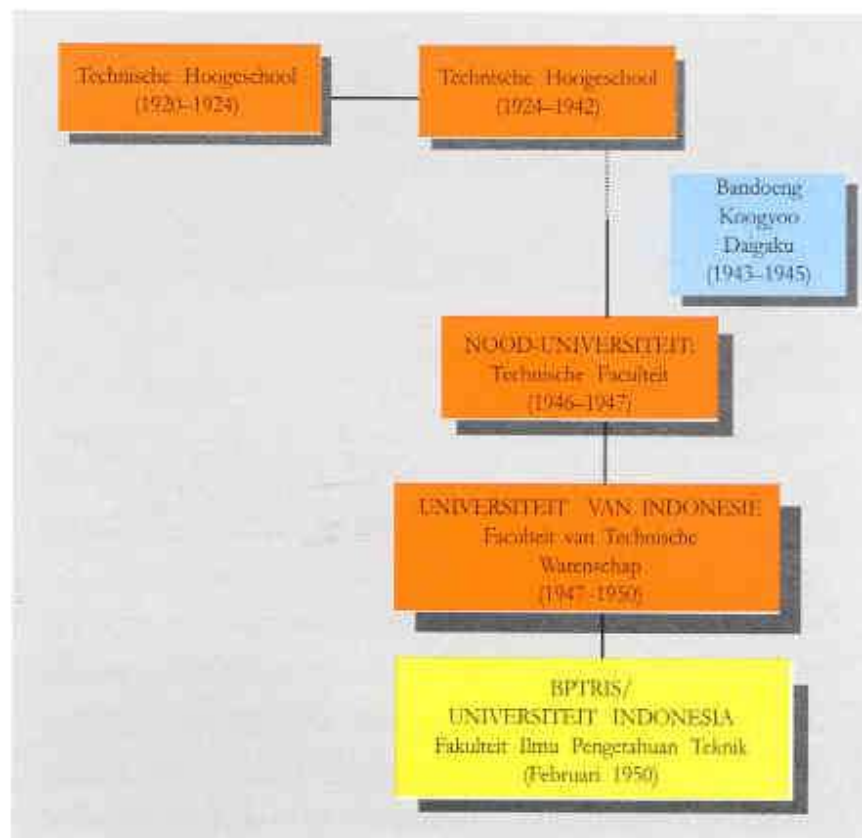
D. Dari *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* di Batavia ke *Fakulteit Sastra dan Filsafat* di Jakarta

Dengan Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 16 tanggal 21 November 1940 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1940 No. 531), *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* dibuka di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1940. Keputusan tersebut berlaku untuk satu tahun. Selanjutnya, dengan Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 3 tanggal 29 September 1941 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1941 No. 457) masa berlakunya diperpanjang menjadi dua tahun.

Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte dibuka secara resmi oleh Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, pada tanggal 4 Desember 1940 di Gedung Rechtshoogeschool (sekarang ditempati oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jalan Merdeka Barat No. 13, Jakarta). Hadir dalam pembukaan itu, selain para Guru Besar dan undangan, juga Prof. Dr. Pangeran Aria Hoesein Djajadiningrat, selaku *fd. Directeur van Onderwijs en Eerdienst.* Sebagai Voorzitter (Dekan) pertama fakultas tersebut diangkat Prof. Dr. I.J. Brugmans. Pada saat dibuka, Fakulteit der Letteren en Wijsbegeerete baru mempunyai 4 (empat) jurusan, yaitu (1) de studie van de sociale wetenschappen (Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial); (2) de studie van de Indonesische taal- en letterkunde (Jurusan Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia); (3) de studie van de geschiedenis (Jurusan Sejarah); dan (4) de studie van de volkenkunde (Jurusan Ilmu Bangsa-Bangsa).

Ketika Pemerintah Balatentara Dai Nippon (Jepang) berkuasa di Indonesia, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte ditutup.

Pada tanggal 21 Januari 1946, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte dari Nood-Universiteit dibuka di Jakarta oleh Pemerintah Pendudukan Belanda. Pada bulan Maret 1946, jurusan-jurusan yang ada di Fakulteit der Letteren en Wijsbegeerte terdiri dari (1) de studie van de Indonesische taal- en letterkunde; (2) de studie van de geschiedenis; (3) de studie van de archaeologie;

dan (4) de studie van de cultuurkunde, yang menggantikan de studie van de volkenkunde. Fakultas tersebut menjadi bagian dari Universiteit van Indonesië (Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 1 tanggal 12 Maret 1947 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1947 No. 47), yang dibuka oleh Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta. Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte kemudian diubah namanya menjadi *Fakulteit Sastra dan Filsafat* pada tahun 1950. Fakultas tersebut menjadi bagian dari Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Jakarta.
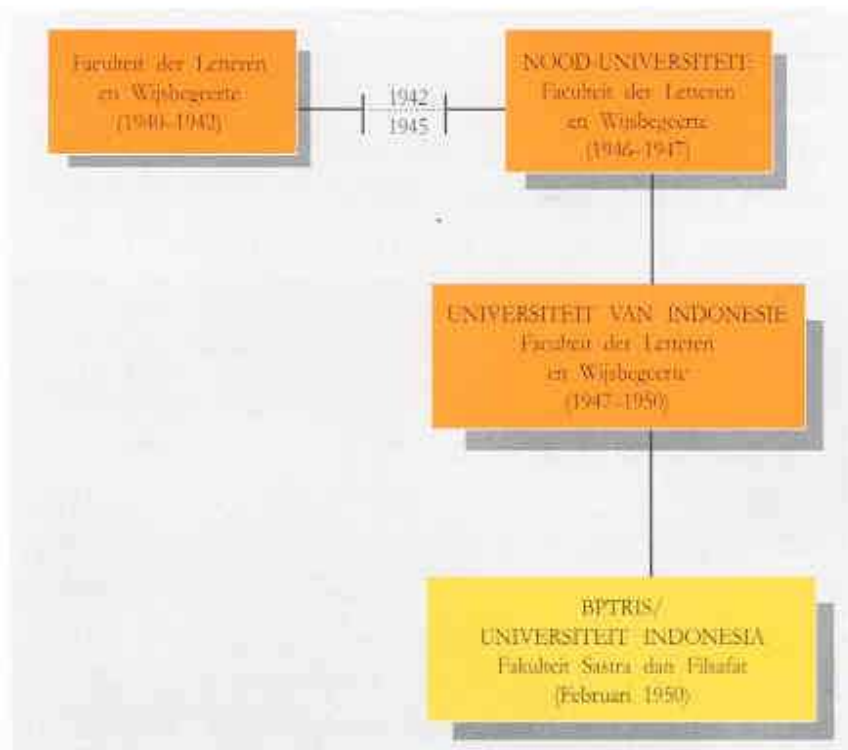
E. Dari *Faculteit van Landbouwwetenschap* di Buitenzorg ke *Fakulteit Pertanian* di Bogor

Usaha untuk mendirikan Hooger Land- en Boschbouw Onderwijs di Hindia-Belanda sebenarnya telah dipersoalkan pada tahun 1918 oleh Bussche (1917–18: 199–213), tetapi pendiriannya harus menunggu sampai Perang Dunia II pecah dan Negeri

Belanda diduduki Jerman pada tahun 1940. *Faculteit van Landbouwwetenschap* dibuka oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 1 September 1941 di Bogor, berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda No. 16 tanggal 31 Oktober 1941 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1941 No. 490). Kartu mahasiswa tahun kuliah 1941/1942 atas nama R. Rachmat Hardjosoesastro menunjukkan bahwa perkuliahan tingkat Persiapan Faculteit van Landbouwwetenschap diselenggarakan di Geneeskundige Hoogeschool di Jakarta.

Deze kaart ten allen tijde op aanvraag te vertoonen

GENEESKUNDIGE HOOGESCHOOL te BATAVIA
STUDIEJAAR 1941/1942
No. 37

De Voorzitter der faculteit verklaart dat de heer
R. Rachmat Hardjosoesastro
als student is ingeschreven en mitsdien gedurende bovenvermeld studiejaar toegang heeft tot alle lessen aan de Geneeskundige Hoogeschool.

Batavia C., 1 Augustus 1941

Handteekening van de(n) belanghebbende (te vertoonen)

Vervangt

BETAALD

1ste Kwartaal fl. (Aug./Oct.)
2de Kwartaal fl. (Nov./Jan.)
3de Kwartaal fl. (Febr./Apr.)
4de Kwartaal fl. (Mei/Juli)

300.– (Drie honderd gulden)
15 Sept 1941

(Duplicaten worden niet verstrekt.)

Kartu mahasiswa Faculteit van Landbouwwetenschap, tahun ajaran 1941/1942

Ketika Pemerintah Balatentara Dai Nippon berkuasa di Indonesia, Faculteit van Landbouwwetenschap ditutup. Pada tanggal 21 Januari 1946, *Landbouwkundige Faculteit* dari Nood-

Universiteit dibuka di Jakarta oleh Pemerintah Pendudukan Belanda. Fakultas tersebut menjadi bagian dari Universiteit van Indonesië (Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 1 tanggal 12 Maret 1947, *Staatsbl. Ned. Indië* 1947 No. 47), yang dibuka oleh Pemerintah Pendudukan Belanda di Bogor.

Faculteit van Landbouwwetenschap kemudian diubah namanya menjadi *Fakulteit Pertanian* pada tahun 1950. Fakultas tersebut menjadi bagian dari Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Bogor.
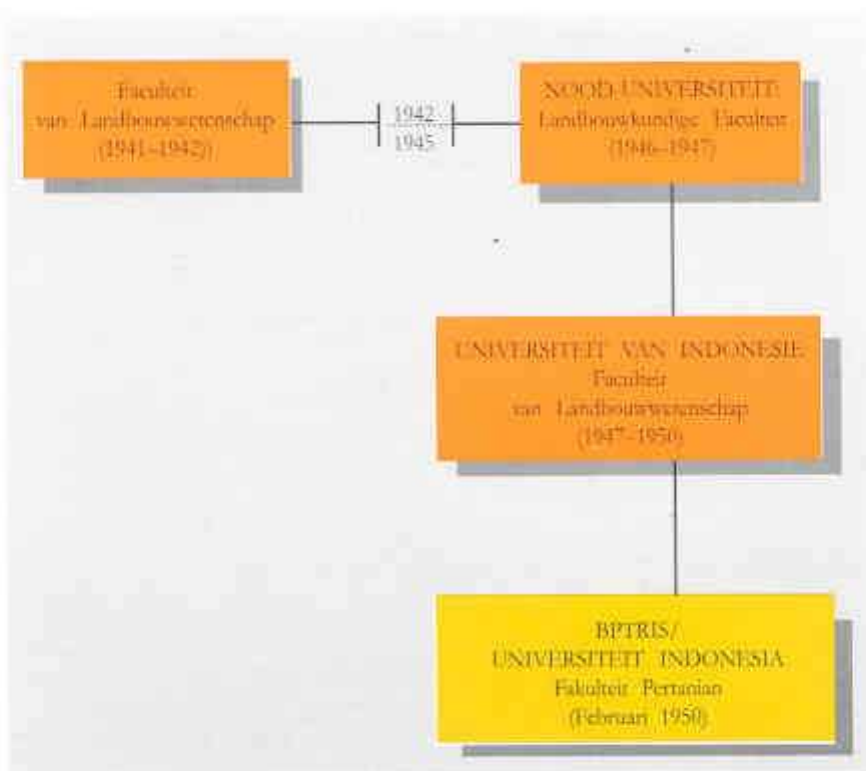
F. Dari *Faculteit der Exacte Wetenschap* di Bandoeng ke *Fakulteit Ilmu Pasti dan Ilmu Alam* di Bandung

Faculteit der Exacte Wetenschap dibuka oleh Pemerintah Pendudukan Belanda di Bandung, berdasarkan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 6 tanggal 15 Juni 1947 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1947 No. 109). Fakultas tersebut diubah

namanya menjadi *Faculteit van Wiskunde en Natuurwetenschap* berdasarkan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Indonesia (*Indonesië*) No. 6 tanggal 22 September 1948 (*Staatsbl. Indonesië* 1948 No. 229). Pada tahun 1950, nama Faculteit van Wiskunde en Natuurwetenschap kemudian diubah menjadi *Fakulteit Ilmu Pasti dan Ilmu Alam* dan menjadi bagian dari Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Bandung.
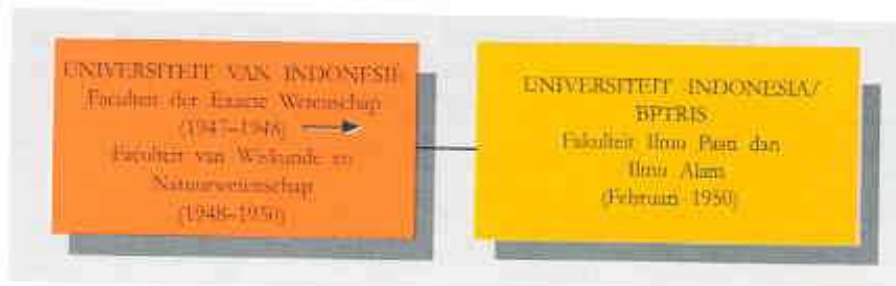
G. Dari *Faculteit der Diergeneeskunde* di Buitenzorg ke *Fakulteit Kedokteran Hewan* di Bogor

Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan—yang dibuka oleh Kementerian Kemakmuran RI di Bogor pada bulan November 1946—kemudian dipindahkan ke Klaten ketika Pemerintah Belanda melancarkan Aksi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947.

Pada tahun 1947, Pemerintah Pendudukan Belanda membuka *Diergeneeskundige Faculteit* di Bogor berdasarkan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 10 tanggal 26 Juni 1947 (*Staatsbl. Ned. Indië* 1947 No. 115). Dalam buku *Universiteit van Indonesië: Gids voor het Academiejaar 1949–1950* (Landsdrukkerij, Batavia, 1949: 111) nama fakultas tersebut dicantumkan sebagai Faculteit der Diergeneeskunde. Nama Faculteit der Diergeneeskunde kemudian diubah menjadi *Fakulteit Kedokteran Hewan* pada tahun 1950 dan menjadi bagian dari Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Bogor.
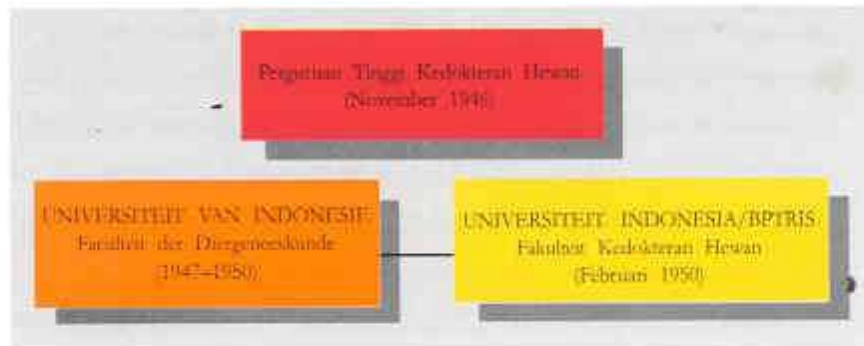
H. Dari *Faculteit der Economische Wetenschap* di Makassar ke *Fakulteit Ekonomi* di Makassar

Faculteit der Economische Wetenschap didirikan oleh Pemerintah Pendudukan Belanda di Makassar, berdasarkan Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda No. 7 tanggal 19 Juli 1947 (*Staatsbl. Ned. Indie* 1947 No. 127) dan merupakan bagian dari Universiteit van Indonesië. Peresmian pembukaannya dilaksanakan di Gedung Baraya (Dewan Perwakilan Rakyat) di Makassar pada tanggal 8 Oktober 1948 dan dihadiri oleh Sultan Kaharoedin (yang pada waktu itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 'Negara Indonesia Timur'); Komisaris Kerajaan Belanda J.J. Mendelaar, yang mewakili L. Neher (*Opperbestuur*) yang berhalangan hadir; Tjokorde Gde Raka Soekawati (yang pada waktu itu Presiden 'Negara Indonesia Timur'); Prof. Dr. A.A. Cense, Presiden Universiteit van Indonesië; Dr. E.A. Kreiken, yang mewakili Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat (*Secretaris van Staat voor Onderwijs, Kunst, en Wetenschap*); Prof. Dr. J.J. Hanrath (*Decaan,* Faculteit der Economische Wetenschap); mahasiswa, dan undangan lainnya.

Pada bulan Februari tahun 1950, nama Faculteit der Economische Wetenschap diubah menjadi *Fakulteit Ekonomi* dan menjadi bagian dari Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Makassar. Pada bulan September 1950 Faculteit Ekonomi ditutup untuk sementara karena ditinggalkan sejumlah Guru Besarnya yang berkebangsaan Belanda.

Tjokroadisoerio, yang diangkat terhitung mulai tanggal tersebut sebagai Presiden pertama Universiteit Indonesia. Tempat kedudukan Presiden Universiteit Indonesia di Jakarta, mula-mula menempati gedung Fakultas Kedokteran di Jln. Salemba Raya No. 6, kemudian pindah ke salah satu bangunan bekas pabrik madat di Jln. Salemba Raya No. 4, Jakarta.

Nama Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Universitet Indonesia/ Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia pada waktu bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (RI), tanggal 15 Agustus 1950.

K. Silsilah Universitas Indonesia

Gambaran selengkapnya mengenai cikal bakal dan pertumbuhan fakultas-fakultas, yang kemudian membentuk Universitas Indonesia, dapat dilihat pada "Silsilah Universitas Indonesia" di halaman berikut.

Gedung Rektorat Universitet Indonesia, Jln. Salemba Raya No. 4, Jakarta, pada awal tahun 1950-an

SILSILAH UNIVERSITAS INDONESIA

Keterangan

1) Sebagai tindak lanjut dari keluarnya **Gouvernementsbesluit* No. 22, tanggal 2 Januari 1849; juga dinamakan School tot opleiding van Inlandsche geneeskundigen (**Gouvernementsbesluit* No. 2, tanggal 15 Januari 1888, *lihat* Waart, 1926: 17).
2) Berdasarkan usul tentang reorganisasi Dokterdjawaschool yang diajukan oleh Dr. H.F. Roll kepada Pemerintah dalam bulan Mei 1898, nama Dokterdjawaschool diubah menjadi School tot Opleiding van Inlandsche Artsen dan tamatan tahun 1900—1902 diberi gelar Inlandsch Arts (Waart, 1926: 26). Dalam perkembangan selanjutnya nama School tot Opleiding van Inlandsche Artsen diubah menjadi School tot Opleiding van Indische Artsen dan lulusannya diberi gelar Indisch Arts.
3) Dibuka berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 14, tanggal 29 Januari 1909 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1909, No. 93).
4) Didirikan pada tanggal 1 Juli 1913, berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 42, tanggal 8 Mei 1913 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1913, No. 365).
5) *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 68, tanggal 14 Juli 1914 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1914, No. 499).
6) Dibuka oleh *Koninklijk Instituut voor Technische Onderwijs in Nederlandsch-Indië*, pada tanggal 3 Juli 1920.
7) Diberi subsidi oleh Negara berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 29, tanggal 11 April 1921 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1921, No. 218).
8) *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 24, tanggal 22 Mei 1922 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1922, No. 343).
9) Dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924, berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 1, tanggal 9 Oktober 1924 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1924, No. 456).
10) Pengalihan kepada Negara, berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 1, tanggal 9 Oktober 1924 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1924, No. 456), dan 18 Oktober 1924 sebagai tanggal pengalihannya berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië*, No. 2, tanggal 14 Oktober 1924 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1924, No. 476).
11) *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 4, tanggal 9 Agustus 1927 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1927, No. 395), dibuka pada tanggal 16 Agustus 1927, berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 4 tanggal 9 Agustus 1927, yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 1927 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1927, No. 396).
12) Didirikan pada tanggal 1 Oktober 1940, berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal* No. 16, tanggal 21 November 1940 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1940, No. 531) dan *Besluit van den Gouverneur-Generaal* No. 3, tanggal 29 September 1941 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1941, No. 457).
13) Didirikan pada tanggal 1 September 1941, berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 16, tanggal 31 Oktober 1941 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1941, No. 490).
14) Dibuka tanggal 29 April 1943 berdasarkan *Makhlumat Gunseikan* No. 5 Tahun 2603, tanggal 13 bulan 4 tahoen *Syowa* 18 (2603) atau tanggal 13 April 1943.
15) Dibuka tanggal 1 April 1944 berdasarkan *Makhlumat Gunseikan* No. 47 Tahun 2604, tanggal 15 bulan 7 tahoen *Syowa* 19 (2604) atau tanggal 15 Juli 1944.
16) Didirikan oleh para tokoh perguruan tinggi pada tanggal 19 Agustus 1945 [lihat *Perguruan Tinggi di Indonesia*. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta), 1965: 10].
17) *Opening Nood-Universiteit. Redevoeringen uitgesproken door Prof. Dr. P.M. van Wulfften Palthe, President der Nood-Universiteit en P.A. Kerstens fd. Dir. van Onderwijs & Eeredienst te Batavia op 21 Januari 1946*. J.B. Wolters, Groningen-Batavia, 1946: 15 hlm.
18) *Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 1, tanggal 12 Maret 1947 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1947, No. 47).
19) *Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Indonesië* No. 4, tanggal 22 September 1948 (*Staatsbl. Indonesië* 1948, No. 227).
20) *Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 6, tanggal 15 Juni 1947 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1947, No. 109).

21) *Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Indonesië* No. 6, tanggal 22 September 1948 (*Staatsbl. Indonesië* 1948, No. 229).

22) *Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 10, tanggal 26 Juni 1947 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1947, No. 115).

23) *Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 7, tanggal 19 Juli 1947 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1947, No. 127).

24) *Besluit van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 3, tanggal 8 Desember 1947 (*Staatsbl. Ned. Ind.* 1947, No. 211).

25) Penggabungan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia dan Universiteit van Indonesië menjadi Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat, sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 7 Tahun 1950, tanggal 23 Januari 1950 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat No. 9, 1950).

26) Pada tanggal 17 Agustus 1950 nama Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia.

27) Dibuka pada tanggal 18 September 1950; terhitung mulai tanggal 15 Januari 1951 FE secara resmi menjadi bagian dari UI berdasarkan Keputusan Menteri P.P. & K. No. 3604/B.P.T. tanggal 13 Februari 1951.

28) Dibuka di Makassar sebagai Cabang dari Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI di Jakarta berdasarkan *Keputusan Menteri P.P. & K. No. 3399/Kab., tanggal 30 Januari 1951.

29) Dibuka kembali sebagai Cabang Fakultas Ekonomi UI Jakarta berdasarkan *Keputusan Menteri P.P. & K. No. 35209/Kab. tanggal 22 September 1953.

30) Universiteit, Universitet, dan Universitit serta Faculteit, Fakultet, dan Fakultit diubah namanya menjadi Universitas dan Fakultas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 44, 1955).

31) Terhitung mulai tanggal 10 November 1954, Universitas Indonesia di Surabaya menjadi Universitas Airlangga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954, tanggal 1 November 1954 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 99, 1954).

32) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955, tanggal 27 Januari 1955 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 4, 1955) tentang pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954, tanggal 1 November 1954 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 99, 1954).

33) Keputusan Menteri P.P. & K. No. 34666/Kab., tanggal 21 Juni 1955, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1955.

34) Universitas Indonesia di Makassar dijadikan Universitas Hasanuddin pada tanggal 1 September 1956 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1956, tanggal 8 September 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 39, 1956).

35) Fakultas Sastra dan Filsafat diubah namanya menjadi Fakultas Sastra berdasarkan Laporan Ketua Presidium Universitas Indonesia Tahun Akademi 1957/1958 (hlm. 2).

36) Universitas Indonesia di Bandung menjadi Institut Teknologi Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1959, tanggal 28 Februari 1959 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 6, 1959).

37) Terhitung mulai tanggal 1 September 1963, Universitas Indonesia di Bogor menjadi Institut Pertanian Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 91 Tahun 1963, tanggal 1 Agustus 1963.

38) Didirikan berdasarkan *Keputusan Menteri P. & K. No. 109049/U.U., tanggal 21 Desember 1960.

39) Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 dipindahkan ke IKIP yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 Tahun 1963, tanggal 22 Mei 1963; keputusan Menteri P.T.I.P. ini kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden No. 274 Tahun 1965, tanggal 14 September 1965.

40) Berdasarkan *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 1968, tanggal 1 Februari 1968, Bagian Ilmu Kemasyarakatan dipisahkan dari Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan.

41) Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam diubah namanya menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 (Lembaran Negara RI No. 41, 1981) tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri, dan Keputusan Presiden RI, No. 44 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Indonesia.

42) Didirikan berdasarkan *Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964.

43) *Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 26 Tahun 1965 tertanggal 26 Februari 1965, yang kemudian diperbaiki dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 153 Tahun 1965, yang menetapkan tanggal 1 Juli 1965 sebagai tanggal berdirinya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

44) Berdasarkan *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 1968, tanggal 1 Februari 1968, Bagian Ilmu Kemasyarakatan dinyatakan sebagai fakultas yang berdiri sendiri dengan nama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, kemudian nama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan terhitung mulai tahun ajaran 1971 diubah namanya menjadi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 031/0/1972, tanggal 24 Februari 1972, serta akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981, tanggal 14 Agustus 1981 (Lembaran Negara RI No. 41, 1981) dan Keputusan Presiden RI, No. 44 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Indonesia diubah lagi namanya menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

45) Fakultas Non-Gelar Ekonomi dan Fakultas Non-Gelar Teknologi dikukuhkan keberadaannya di lingkungan UI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1982, tanggal 7 September 1982.

46) Pendirian Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 207/0/1998, tanggal 25 Agustus 1998.

47) Fakultas Pascasarjana dikukuhkan keberadaannya di lingkungan UI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1982, tanggal 7 September 1982.

48) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0311/0/1991, tanggal 6 Juni 1991, tentang penutupan Fakultas Pascasarjana dan pembukaan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas dan Institut Negeri.

49) Didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1993, tanggal 21 Oktober 1993.

50) Didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0332/0/1995, tanggal 15 November 1995.

51) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, tanggal 10 Juli 1990 (Lembaran Negara RI No. 38, 1990), Fakultas Pascasarjana diubah namanya menjadi Program Pascasarjana.

* = tidak ditemukan.

BAB 3
TANGGAL LAHIR DAN IDENTITAS UNIVERSITAS INDONESIA

A. TANGGAL LAHIR YANG BERAGAM

Peringatan Dies Natalis pertama Universitet Indonesia (1951) mungkin tidak terselenggara, sedangkan Pidato Presiden Universitet Indonesia dalam peringatan Dies Natalis kedua (1952) tidak berhasil diperoleh hingga saat buku ini dicetak. Dalam perayaan Dies Natalis ketiga, tanggal 16 Februari 1953 di Bandung, Prof. Soepomo memulai pidatonya dengan menyatakan bahwa "Pada tanggal *2 Pebruari 1953* Universitet Indonesia sebagai Universitet kepunjaan Negara Republik Indonesia berdiri 3 tahun. Kita merajakan ulang tahun (Dies Natalis) jang ketiga dari Universitet itu baru pada hari ini [16 Februari 1953], oleh karena ..." (*Tiga pidato pada Dies Natalis ketiga dari Universitet Indonesia pada tanggal 16 Pebruari 1953 di Bandung*, 1953: 3). Mungkin, karena itu jugalah maka hampir semua terbitan—termasuk laporan-laporan Rektor—yang membahas sejarah Universitas Indonesia menyebutkan bahwa tanggal lahir Universitas Indonesia adalah tanggal 2 Februari 1950. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa tanggal resmi pendirian Universitas Indonesia adalah tanggal 10 Januari 1950 atau yang menetapkan tanggal lahir Universitas Indonesia berdasarkan peristiwa pengambilalihan Universiteit van Indonesie pada bulan November 1950.

Ketiadaan dokumen resmi yang menyatakan tanggal lahir Universitas Indonesia dan perbedaan kriterium yang digunakan untuk menetapkan tanggal lahir Universitas Indonesia telah menghasilkan tanggal lahir yang berbeda-beda. Pada tanggal 17 Februari 1990 Prof. Bachtiar Rivai menulis surat kepada Rektor Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa pada "*tgl. 2 Februari 1950*

Ir. Soerachman telah diangkat sebagai Presiden (sebutan Rektor dahulu) Universitas Indonesia. Disebabkan suatu kekhilafan administratif maka tanggal *2 Februari 1950* telah terlanjur dianggap sebagai *Harjadi* Universitas Indonesia . . ." Sekalipun demikian, kebanyakan tetap menganggap 2 Februari 1950 sebagai tanggal lahir Universitas Indonesia. Petikan dari berbagai sumber di bawah ini memberikan gambaran tentang keanekaragaman kriterium dan tanggal lahir Universitas Indonesia:

1. Pengangkatan Ir. Soerachman sebagai Presiden "Universiteit Indonesia", yaitu gabungan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta dan "Universiteit van Indonesië" dengan semua cabangnya pada tanggal 2 Februari 1950. (*Perguruan Tinggi di Indonesia*, 1965: 12);
2. Hari kepindahan mahasiswa Balai Perguruan Tinggi Kedokteran RI ke FK-UI untuk meneruskan dan menyelesaikan pendidikannya, yang dikukuhkan pada tanggal 2 Februari 1950. "Tanggal 2 Februari menjadi hari lahir UI, yang senantiasa diperingati dalam bentuk peringatan Dies Natalis UI." (*Fakultas Kedokteran UI*, 1995: 4);
3. Perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah) dengan pihak Belanda, yang diadakan "pada tanggal 2 Februari 1950" di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta, "berakhir dengan kekacauan"; dan hari itulah dijadikan tanggal lahir Universiteit Indonesia, yang kemudian menjadi Universitas Indonesia (*Sejarah Singkat Universitas Indonesia*, 1967: 11; Fakultas Hukum, 1999: 3);
4. Universiteit van Indonesië diambil alih oleh Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) pada tanggal 2 Februari 1950, "dan namanya diganti menjadi Universiteit Indonesia." (Fakultas Sastra, 1999: 6);
5. "Pada tanggal 2 Februari 1950 terjadilah perundingan antara pihak RI yang diwakili antara lain oleh Dr. Abu

Hanifah dengan pihak Belanda di Aula Fakultas Kedokteran Salemba 6. Perundingan tersebut merupakan peristiwa bersejarah, karena dari perundingan itu lahirlah suatu lembaga pendidikan baru yang merupakan gabungan dari kedua lembaga pendidikan tinggi yang selama ini ada. Nama yang diberikan kepada lembaga pendidikan tinggi yang baru ini ialah Universiteit Indonesia." (*40 Tahun UI*, 1990: 9);

6. "10 Januari 1950, adalah tanggal diresmikannya pendirian Universitas Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia." (*Katalog Program Doktor PPS UI*, 1996/1997: 1); dan

7. Bulan November 1950, Universiteit van Indonesië diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, "maka perguruan tinggi Hukum jang dipimpin oleh Prof. Djokosoetono, S.H. dan Prof. Soediman, S.H. digabungkan dengan Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van Sociale Wetenschap mendjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia." (*Universitas Indonesia: Buku Pedoman 1973–1974*: 44).

B. PELACAKAN 'AKTA KELAHIRAN'

Sukar melacak arsip-arsip yang diperlukan untuk menentukan tanggal lahir Universitas Indonesia. Arsip Nasional tidak menyimpan arsip-arsip tersebut. Demikian juga, baik di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maupun di Universitas Indonesia surat-surat penting yang diperlukan untuk memastikan tanggal lahir Universitas Indonesia tidak ditemukan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh—meskipun kebenarannya masih perlu dipertanyakan—adalah mencari artikel surat kabar terbitan awal tahun 1950. Perpustakaan Nasional memiliki koleksi surat kabar-surat kabar yang diperlukan, meskipun tidak lengkap dan sudah sangat usang. Sebagian dari koleksi itu sudah tersimpan dalam bentuk mikrofilm. Dari hasil pelacakan tersebut

ditemukan artikel-artikel surat kabar *Berita Indonesia* (surat kabar pertama Indonesia yang diterbitkan setelah Negara Republik Indonesia diproklamasikan), yang terbit antara tanggal 4 Januari 1950 dan tanggal 5 Februari 1950, dalam bentuk mikrofilm sebagai berikut:

1. *Berita Indonesia* No. 1224, Rabu 4 Januari 1950, halaman 2, kolom 4–5. Dalam berita berjudul "Dr. Abu Hanifah telah duduk di Kementeriannja" [sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RIS] disebutkan bahwa pada upacara timbang-terima "pimpinan Ministerie van Cultuur, Opvoeding, en Onderwijs" dari Prof. P.A. Hoesein Djajadiningrat, hadir antara lain "President Universiteit van Indonesia dan beberapa anggota PPN."
2. *Berita Indonesia* No. 1229, Selasa 10 Januari 1950, halaman 2, kolom 1. Dalam laporan berjudul "Bahasa Indonesia dan Perg. Tinggi" diberitakan desakan Badan Kongres Mahasiswa di Bandung—yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Bandung dan Bogor, serta Persatuan Mahasiswa Djakarta—kepada Pemerintah Negara RIS agar menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di seluruh balai pengajaran tinggi di Indonesia dalam waktu sependek-pendeknya.
3. *Berita Indonesia* No. 1231, Kamis 12 Januari 1950, halaman 2, kolom 5. Berita berjudul "Putusan Sidang Kabinet Selasa Malam" [tanggal 10 Januari 1950] menyebutkan bahwa "Ir. Surachman telah ditetapkan sebagai Presiden dari Universiteit Indonesia." [Dapat ditambahkan bahwa ketika Gerrit Bras mempertahankan disertasinya untuk memperoleh *Graad van Doctor in de Geneeskunde* pada tanggal 13 Januari 1950, "President Universiteit van Indonesië" masih dijabat oleh Prof. Dr. W. Radsma (tercantum di halaman judul disertasi)].
4. *Berita Indonesia* No. 1236, Rabu 18 Januari 1950, halaman 1, kolom 1–3. Dalam artikel berjudul "1 Pebruari tanggal

antjer[2] sidang senat-parlemen RIS" tidak ada berita mengenai Universiteit Indonesia. Pemberitaan tersebut sekadar menunjukkan banyaknya kegiatan Pemerintah RIS, yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 Februari 1950, mengingat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 48 Tahun 1950 (Lembaran Negara RI 1950 No. 3), tentang Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, baru dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1950.

5. *Berita Indonesia* No. 1241, Selasa 24 Januari 1950, halaman 1, kolom 2, mencetak berita berjudul "Putusan[2] sidang Kabinet ke VI: Mulai 1 Pebruari mulai berlaku peraturan gadji baru — 'Universiteit van Indonesia' akan disesuaikan dengan aliran[2] nasional." Di dalamnya diberitakan "Pengumuman Dewan Menteri", yang dikeluarkan sesudah sidang, yang menyatakan:

> bahwa berhubung dengan penyerahan Kedaulatan kepada RIS, Dewan Menteri memandang perlu menyusun kembali Universiteit van Indonesia untuk disesuaikan dengan aliran nasional RIS. Untuk itu maka diterima baik suatu undang-undang darurat tentang kedudukan perguruan tinggi di Indonesia dalam mana Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diwajibkan mengambil segala tindakan dalam waktu sependek-pendeknya dengan—jikalau perlu—menyimpang dari segenap peraturan yang berlaku untuk Universiteit van Indonesia.

6. *Berita Indonesia* No. 1243, Kamis 26 Januari 1950, halaman 1, kolom 6–7. Dalam berita berjudul "Kementerian Kebudajaan Merentjanakan Pendirian 'Kota Mahasiswa Modern'. Dr. Abu Hanifah ..." disebutkan bahwa:

> perubahan dasar Perguruan Tinggi berjalan dengan lancar, sedangkan antara pemimpin 'Universiteit Indonesia' dengan Menteri tetap ada pengertian yang baik dalam beberapa hal. 'Universiteit Indonesia' akan diganti namanya menjadi 'Balai Perguruan Tinggi RIS', dan kini telah diangkat Presiden baru BPT itu, dewan kurator, komisi memperbaiki undang-undang Perguruan Tinggi dan beberapa pemimpin fakulteit Sekolah Tinggi.

Selanjutnya diberitakan bahwa:

> Pengangkatan-pengangkatan tersebut akan mulai berlaku pada 4 Februari yad. Daftar nama-nama guru-guru besar Perguruan Tinggi bangsa Indonesia kini katanya sedang disiapkan, di mana kepandaian, kecakapan dan karakter diambil sebanyak mungkin sebagai dasar-dasar pemilihan menjadi profesor.

7. *Berita Indonesia* No. 1247, Selasa 31 Januari 1950, halaman 3, kolom 6. Dalam berita berjudul "Kedudukan Perg. Tinggi R.I.S. Supaja tg. 1 Pebruari telah ada kepastian" dilaporkan bahwa Komite Perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi Hukum Jakarta telah mengeluarkan pengumuman, yang menerangkan bahwa mahasiswa-mahasiswa "Perguruan Tinggi Hukum (bekas RI)" hingga saat itu telantar dalam pengertian pengajaran mereka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa Perguruan Tinggi Hukum "menganggap [tanggal] *1 Pebruari 1950 sebagai titik batas (richtdatum) untuk tgl. pemastian kedudukan Perguruan Tinggi dan soal-soal jang bersangkutan.*" Mereka juga menuntut

> jika pada hari tg. *1 Februari 1950* belum juga dapat berjalan Perguruan Tinggi RIS, maka pelajaran-pelajaran diusahakan supaya berjalan seperti sediakala, sampai menunggu penyelesaian soal masalah.

Pengumuman tersebut disampaikan juga, antara lain, kepada "Perdana Menteri, Menteri Pengadjaran RIS, dan Sekretariat Perguruan Tinggi Hukum."

8. *Berita Indonesia* No. 1248, Rabu 1 Februari 1950, halaman 2, kolom 2–4. Dalam berita berjudul "Menteri Pengadjaran berusaha pindahkan Faculteit kesusasteraan Gadjah Mada?..." diterangkan soal pembentukan "Faculteit Kesusasteraan" di Jakarta, dan bahwa tenaga Dr. Prijono [yang pada waktu itu mengajar di BPT Gadjah Mada] diperlukan oleh Balai Perguruan Tinggi RIS Jakarta. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa Ir. Surachman telah diangkat sebagai "Presiden" pada Balai Perguruan Tinggi

RIS. Selain itu, sejumlah Guru Besar telah diangkat: pada "Fakultet Kedoktëran" diangkat Prof. dr. W.Z. Johannes (Ilmu Sinar); Prof. dr. Aulia (Ilmu Penyakit Dalam); Prof. dr. Asikin (Profesor Luar Biasa Ilmu Penyakit Dalam); Prof. dr. R. Slamet Iman Santoso (Ilmu Penyakit [Saraf]); Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo (Ilmu Kebidanan dan Ginekologi); Prof. dr. S. Hadibroto (Ilmu Penyakit Mata); Prof. dr. Sartono Kertopati (Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin); dan Prof. dr. Hendarmin (Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, dan Kerongkongan); pada "Fakultet Kesusasteraan dan Ilmu Filsafat" telah diangkat Prof. Dr. Prijono; dan pada "Fakultet Kehakiman dan Ilmu Sosial" diangkat Prof. Mr. Djokosoetono. Mengenai pertanyaan, "Apakah tanggal 1 Pebruari BPT RIS sudah dapat dibuka," Menteri dr. Abu Hanifah menegaskan bahwa *"mulai tg. 1 Pebruari* telah dapat diselenggarakan pendaftaran dari semua mahasiswa." Pada kesempatan itu Ir. Surachman, atas nama BPT RIS, akan mengadakan penjelasan seperlunya.

9. *Berita Indonesia* No. 1249, Kamis 2 Februari 1950, halaman 2, kolom 5. Artikel berjudul "Wongsonegoro Dan Mahasiswa" memberitakan bahwa:

> Kemarin pagi [hari Rabu, tanggal 1 Februari 1950] pukul 10, ketua Dewan Curator Balai Perguruan Tinggi [R.I.S.] Mr. Wongsonegoro, telah mengadakan pertemuan dengan semua mahasiswa dari seluruh cabang-cabang Perguruan Tinggi di kota ini [Jakarta] dengan mengambil tempat di gedung P.T. Kedokteran Salemba.

Pertemuan itu dimaksudkan sebagai pertemuan perkenalan Dewan Curator dengan mahasiswa. Dalam pertemuan itu diumumkan nama-nama anggota Dewan Curator sebagai berikut: Mr. Wongsonegoro (Ketua), dan para anggotanya dr. Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Wisaksono Wirjodihardjo, Sutan Sjahrir, Margono Djojohadikusumo, C. Katoppo, Tengku Kaliamsjah Sinaga, dan Mr. Tengku Moh. Hassan. Selain itu, juga diberitakan bahwa Ir. Surachman telah

diangkat menjadi Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat. Dalam pertemuan itu juga ditekankan bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia harus dapat mencapai tingkatan internasional, tanpa melupakan dasar kenasionalannya. Selanjutnya, penulis berita mengutip keterangan wartawan *Merdeka* yang mendapat kabar bahwa:

> pada pagi hari ini [Kamis, tanggal 2 Februari 1950] Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, dr. Abu Hanifah, akan mengadakan pertemuan dengan para mahaguru perguruan-perguruan tinggi di Jakarta.

Saat pelantikan Dewan Curator BPTRIS di Jln. Salemba Raya No. 6, Jakarta: (1) Presiden Soekarno; (2) dr. Abu Hanifah, Menteri P.P. & K (3) Ir. Soerachman, Presiden Universiteit Indonesia

Surat kabar *Berita Indonesia* yang terbit tanggal 3, 4, dan 5 Februari 1950 *tidak* memberitakan hasil pertemuan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (dr. Abu Hanifah) dengan para mahaguru perguruan tinggi, seperti yang diberitakan pada tanggal 2 Februari 1950. Akan tetapi, dr. Abu Hanifah dalam bukunya yang berjudul *Tales of a revolution* yang diterbitkan pada tahun 1972, menulis pada halaman 333–334 sebagai

berikut:

> *At the time, the backbone of the teaching staff were the Dutch professors, lecturing on very important subjects, mostly in the technical field. They began to be uneasy, and wanted to know where they stood, especially as they could get a similar job in Holland provided they applied in time. So one morning* [besar kemungkinan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 1950, seperti yang diberitakan surat kabar *Berita Indonesia* No. 1249, Kamis 2 Februari 1950, hlm. 2, kol. 5] *I had a meeting with them in the main hall of the Faculty of Medicine. For reasons of principle, I made my speech in the Indonesian language. The Dutchmen didn't understand very much of what I said and they told me so. Then I said in Dutch: 'Gentlemen, I spoke in the Indonesian language because that is the official language of the State. However, as I do not want to be misunderstood I am willing to translate my speech into Dutch.' The most important thing I had to say to them was that they could count on my goodwill to co-operate with them, if they were still willing to help me to lecture to the students as before. I would do my best to help them through the difficult times of transition and I was honest enough to tell them I needed their help to educate my young people properly. I ended: Gentlemen, I appeal to your love for your students and my beautiful country, to help me out, at least for the first few years. However, I must tell you that I wouldn't like to see any of you involved in politics. Let me handle that end and I'll give you complete freedom in the technical implementation of your work.*
>
> *We have understood each other well, gentlemen. I would like to thank you for your work in the past, and in advance for all your work in the future. I would like to convey to all of you my great thanks for your cooperation.*

Selanjutnya dr. Abu Hanifah menulis pada halaman 334, sebagai berikut:

> *When I asked the professors for their opinion they generally consented to co-operate with me. One of the oldest professors made a brief speech on behalf of his colleagues. He said they thanked me for my frank and honest statement and that they would remain as long as they were needed in Indonesia. Afterwards, I appointed Indonesian professors to replace those who had already resigned because their contract with the Government had ended.*

Kutipan tersebut serta hasil pelacakan 'akta kelahiran' Universitas Indonesia menunjukkan bahwa yang menyebutkan Dies Natalis UI tanggal 2 Februari (1950) adalah Prof. Soepomo (*lihat* hlm. 51). Sayangnya, tidak dicantumkan alasan, mengapa tanggal itu ditetapkan sebagai tanggal Dies Natalis. Mungkin, alasannya dikemukakan dalam pidato tahun 1952, yang hingga

saat ini *belum* ditemukan. Dalam pelacakan juga ditemukan 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu:

1. Keputusan Presiden RIS No. 70 Tahun 1950, tanggal 15 Februari 1950, yang mengangkat Ir. Soerachman menjadi Presiden Universitett Indonesia terhitung mulai tanggal *1 Februari 1950;* dan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

[illegible]

No. 70 [illegible] 1950.

[illegible]

[illegible]

Menetapkan :

[illegible] Ir. [illegible] menjadi Presiden Universiteit Indonesia [illegible] Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan [illegible] 1950 [illegible]

Ir. SOERACHMAN

mendjadi Presiden Universiteit Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1950 dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain akan ditetapkan lebih landjut.

Turunan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Sekretariat Perdana Menteri,
3. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
4. Kementerian Keuangan,
5. Universiteit Indonesia,
6. Djawatan [illegible] Pegawai,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Kantor Pembajaran Padjak dan

Pedjabat [illegible] untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

[illegible] PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

[illegible]

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1950.
[illegible]

A.K. [illegible]

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat mengenai pengangkatan Ir. Soerachman menjadi Presiden Universiteit Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1950

2. Keputusan Presiden RIS No. 71 Tahun 1950, tanggal 15 Februari 1950, yang memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. W. Radsma dari jabatannya sebagai Presiden Universiteit Indonesia terhitung mulai tanggal *1 Februari 1950.*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No.71 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa segala djabatan jang berhubung dengan [illegible] langsung [illegible] Pemerintah Republik Indonesia Serikat [illegible] diduduki oleh [illegible] Republik Indonesia Serikat, seperti djabatan Presiden Universiteit Indonesia;

Mengingat : putusan Presiden [illegible] 1950, tentang pengangkatan Ir. Soerachman mendjadi Presiden Balai Perguruan Tinggi [illegible] Indonesia Serikat;

Memutuskan :

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1950 memberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Presiden Universiteit Indonesia:

Prof. Dr. W. Radsma

dengan utjapan terima kasih Pemerintah Republik Indonesia Serikat [illegible] pekerdjaan dan djasa-djasa beliau dalam djabatan itu, dan [illegible] banjak terima kasih atas segala djasa-djasa dan pekerdjaan [illegible] beliau selama memangku djabatan Presiden Universiteit Indonesia dulu.

Turunan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Sekretariat Perdana Menteri,
3. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
4. Kementerian Keuangan,
5. Universiteit Indonesia,
6. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Kantor Penetapan Padjak dan

Petikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

ABU HANIFAH.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal [illegible] Pebruari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

A.K. PRINGGODIGDO.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat mengenai pemberhentian Prof. Dr. W. Radsma sebagai Presiden Universiteit Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1950

C. NAMA UNIVERSITAS INDONESIA

Sampai pertengahan tahun 1955, padanan kata *universiteit* yang digunakan adalah *universiteit* (Universiteit Indonesia), *balai perguruan tinggi* (Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia), *universitet* (Universitet Indonesia), *universitit* (Universitit Negeri Gadjah Mada), atau *universitas* (Universitas Airlangga), sedangkan untuk kata *faculteit* digunakan padanan kata *perguruan tinggi* (Perguruan Tinggi Kedokteran), fakultet (Fakultet Kedokteran), *fakultit* (Fakultit Kedokteran), atau *fakultas* (Fakultas Kedokteran). Perguruan tinggi milik negara yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, yang sekarang dikenal dengan nama Universitas Indonesia, pernah menyandang beberapa nama, yaitu:

1. *Universiteit Indonesia*, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 70 Tahun 1950, tanggal *15 Februari 1950*, tentang pengangkatan Ir. Surachman sebagai Presiden *Universiteit Indonesia*;
2. *Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat*, sebagaimana tercantum pada halaman judul disertasi yang dipertahankan oleh Geertruida Anna van Wieringen-Rauws tanggal *23 Maret 1950*;
3. *Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia* sebagaimana tercantum pada halaman judul disertasi yang dipertahankan oleh Hendrik Theodorus Chabot tanggal *30 Oktober 1950*;
4. *Balai Perguruan Tinggi Indonesia*, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1951, tanggal *17 Maret 1951*, tentang pemberhentian Ir. Sutachman sebagai Presiden *Balai Perguruan Tinggi Indonesia* atas permohonan sendiri dan penunjukan Prof. Mr. Dr. R. Soepomo sebagai Presiden *Balai Perguruan Tinggi Indonesia*, terhitung tanggal *1 Maret 1951*;
5. *Universiteit van Indonesië*, sebagaimana tercantum pada halaman judul disertasi yang dipertahankan oleh F.L. Scheepe tanggal *12 Maret 1951*;

6. *Universitet Indonesia*, sebagaimana tercantum pada halaman judul disertasi yang dipertahankan oleh Mohamad Mansjoer tanggal *27 Maret 1954*;
7. *Universitas Indonesia*, sebagaimana tercantum pada halaman judul disertasi yang dipertahankan oleh Ferdinand Jan Ormerling tanggal *1 Agustus 1955*.

Undang-Undang No. 10, yang disahkan pada tanggal 11 Juli 1955 (Lembaran-Negara RI No. 44 Tahun 1955), mengubah kata "universiteit", "universitet", dan "universitit" menjadi *universitas*, serta mengubah nama "fakulteit", "facultet", dan "fakultit" menjadi *fakultas*. Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1955 tersebut memutuskan: "Nama 'Universiteit van Indonesië' atau 'Universitet Indonesia' ditetapkan kini dalam bahasa Indonesia mendjadi 'Universitas Indonesia'." Sejak diundangkan pada tanggal 21 Juli 1955, maka *secara resmi* nama Universiteit van Indonesië, Universiteit Indonesia, atau Universitet Indonesia menjadi *Universitas Indonesia*.

D. LAMBANG UNIVERSITAS INDONESIA

Lambang Universitas Indonesia diciptakan pada tahun 1952 oleh *Sumaxtono* (nama aslinya Sumartono), mahasiswa Angkatan 1951 Seni Rupa Fakultet Teknik Universitet Indonesia, Bandung (*cf. Sejarah Singkat Universitas Indonesia*, 1967: 21). Dalam suatu wawancara, Prof. KRHT H. Srihadi Soedarsono Adhikoesoemo, M.A. membenarkan bahwa Sdr. Sumaxtono memang pencipta lambang Universitas Indonesia. Keterangan itu juga dikuatkan Prof. Dr. Sudjoko, yang mengenal baik Sdr. Sumaxtono (Lampiran 1).

Ide dasar lambang tersebut adalah *kala-makara*, yang merupakan dua kekuatan yang ada di alam: *kala* sebagai kekuatan di atas (kekuatan matahari) dan *makara* sebagai kekuatan di bawah (kekuatan bumi). Kedua kekuatan itu dipadukan dan distilir Sumaxtono menjadi *makara* yang melambangkan Universitas Indonesia sebagai baik sumber ilmu pengetahuan, maupun hasilnya, yang menyebar ke segala penjuru.

Lambang Universitas Indonesia terdiri dari dua unsur, yaitu: pohon dengan cabang-cabangnya (pada gambar: a,b) dan *makara* (pada gambar: c, d):

(a) kuncup pohon ilmu pengetahuan

(b) cabang-cabang pohon ilmu pengetahuan

(c) pancuran yang berbentuk *makara*

(d) air yang keluar dari *makara*

Makna lambang Universitas Indonesia adalah sebagai berikut:

- *Pohon berikut cabang dan kuncup* melambangkan pohon ilmu pengetahuan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuannya, sementara kuncup tersebut suatu saat akan mekar menjadi cabang ilmu pengetahuan baru. Kuncup-kuncup itu akan senantiasa mekar selama pohon ilmu pengetahuan itu hidup. Dengan demikian, Sumaxtono ingin menyatakan bahwa cabang-cabang ilmu pengetahuan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman.

- *Makara* yang mengalirkan air melambangkan hasil yang memencar ke segala penjuru. Makna yang diberikan oleh Sumaxtono adalah Universitas Indonesia sebagai sumber ilmu pengetahuan, akan menghasilkan sarjana-sarjana yang cerdas, terampil, penuh ketakwaan, berbudi luhur, dan

berkepribadian, serta bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi serta masalah yang dihadapi masyarakat, dan mampu menyelesaikannya sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, di mana pun mereka berada.

Rancangan desain berikut maknanya diperlihatkan oleh Sumaxtono kepada Srihadi (mahasiswa Seni Rupa FT-UI, Bandung Angkatan 1952) pada tahun 1952. Prof. KRHT H. Srihadi Soedarsono Adhikoesoemo, M.A.—yang juga pencipta lambang Institut Teknologi Bandung—tidak mengetahui kapan dan siapa yang mengesahkan lambang UI tersebut. Yang pasti adalah, sampul buku *Universitet Indonesia, Fakultet Teknik, Bandung: Rentjana untuk Tahun Peladjaran 1952–1953* (Percetakan AID, Bandung, 120 hlm.) menggunakan lambang Universitas Indonesia untuk pertama kali seperti yang dibuat oleh Sumaxtono (*tanpa* bingkai segilima).

E. ATRIBUT UNIVERSITAS INDONESIA

Atribut adalah tanda kelengkapan organisasi di lingkungan universitas, yang digunakan institusi dan warga universitas dalam upacara akademik maupun nonakademik.

Atribut Universitas Indonesia dan pemakaiannya ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 203/HM/IN/K-64, tanggal 6 Agustus 1964, mengenai Atribut bagi Mahasiswa. Peraturan tersebut diperbarui dengan Keputusan Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 1997, tanggal 4 Juli 1997.

Atribut Universitas Indonesia meliputi (1) Panji-panji; (2) Toga dan Topi Jabatan; (3) Kalung Jabatan; (4) Toga dan Topi Wisudawan; (5) Jaket dan Jas; serta (6) Kendi Ilmu Pengetahuan.

1. Panji-panji

Selain lambang, Universitas Indonesia juga mempunyai atribut lain, yaitu panji-panji yang bentuknya menyerupai kapak yang lazim digunakan pada zaman neolitikum. Kapak batu tersebut merupakan alat utama yang dipakai di seluruh Indonesia pada zaman itu, bahkan dipakai pula di seluruh dunia. Kapak tersebut sebenarnya kapak masa peralihan dari zaman batu ke zaman perunggu. Hal itu diartikan sebagai sifat dinamis bangsa Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Di tengah-tengah kapak tersebut terdapat lambang Universitas Indonesia yang berbentuk bulat seperti matahari, melambangkan Universitas Indonesia sebagai penyuluh dan pelopor rakyat Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan.

Lambang pada panji-panji dan bendera fakultas atau satuan organisasi di lingkungan Universitas Indonesia berwarna kuning keemasan. Warna tersebut melambangkan kebesaran dan keagungan. Warna dasar panji-panji dan bendera fakultas atau satuan organisasi disesuaikan dengan warna bendera masing-masing fakultas.

Panji-panji dan bendera Universitas Indonesia berwarna dasar kuning, sementara bendera Fakultas Kedokteran berwarna dasar hijau tua, dengan lambang UI di tengah berwarna kuning emas; bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah tua; bendera Fakultas Sastra berwarna dasar putih; bendera Fakultas Ekonomi berwarna dasar abu-abu; dan bendera Fakultas Psikologi berwarna dasar biru muda. Bendera Fakultas Kedokteran Gigi berdasar dwiwarna (vertikal) hijau tua dan putih; bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasar dwiwarna (vertikal) biru laut dan hitam. Bendera Fakultas Teknik berwarna dasar biru tua; bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna dasar jingga; bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna dasar ungu; bendera Fakultas Ilmu Komputer berdasar dwiwarna (vertikal) biru dan merah tua; bendera Fakultas

Ilmu Keperawatan berdasar dwiwarna (vertikal) biru muda dan biru tua; serta bendera Program Pascasarjana berwarna dasar cokelat.

2. **Toga dan Topi Jabatan**

Toga jabatan adalah jubah berwarna hitam yang dikenakan Rektor, para Pembantu Rektor, para Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan para Guru Besar. Topi jabatan merupakan pelengkap toga jabatan yang berupa penutup kepala berbentuk dasar segilima dan berwarna hitam dengan kuncir warna kuning. Dalam upacara, topi jabatan dikenakan pada waktu berdiri atau berjalan; saat duduk, topi jabatan harus dilepas.

Wanita yang bertoga jabatan harus mengenakan blus atau kebaya putih dengan kain panjang atau sarung berwarna hitam serta alas kaki berwarna hitam. Ketentuan bagi pria adalah bercelana panjang warna hitam dan berkemeja putih lengan panjang, yang dilengkapi dasi kupu-kupu berwarna putih atau dasi panjang berwarna hitam—tergantung sifat upacara atau ketentuan protokol—serta bersepatu warna hitam.

3. **Kalung Jabatan**

Kalung jabatan merupakan pelengkap toga jabatan, dikenakan di atas toga jabatan melingkari leher dan menutupi bahu. Kalung jabatan hanya dikenakan pemangku jabatan struktural. Dengan demikian bentuk dan warna kalung jabatan disesuaikan dengan jabatan struktural yang diemban pemakainya:

a. *Kalung Jabatan Rektor* terbuat dari logam berwarna kuning keemasan dan berbentuk rangkaian ornamen bermotifkan lambang Universitas Indonesia.

b. *Kalung Jabatan Sekretaris Senat Universitas Indonesia* serupa dengan kalung jabatan Rektor, tetapi berwarna putih perak, dengan unit rangkaian yang di tengah berwarna kuning keemasan.

c. *Kalung Jabatan para Pembantu Rektor* serupa dengan kalung jabatan Rektor, tetapi seluruh rangkaian berwarna putih perak.

d. *Kalung Jabatan para Dekan* serupa dengan kalung jabatan Rektor, tetapi seluruh rangkaian berwarna putih perak, dengan batu-batu hias kecil yang sewarna dengan bendera fakultas merangkai ornamen lambang Universitas Indonesia.

Selendang Jabatan Fungsional Guru Besar terbuat dari kain yang sewarna dengan warna bendera fakultasnya, dikalungkan di luar toga jabatan saat mengikuti upacara.

4. Toga dan Topi Wisudawan

Toga wisudawan adalah jubah berwarna hitam yang dikenakan para lulusan pada upacara Wisuda Sarjana. Universitas Indonesia mengelola bermacam-macam jenjang pendidikan, sehingga toga wisudawannya juga perlu dibedakan. Perbedaan itu terlihat pada bentuk dan warna samir toga wisudawan, yang dikenakan melingkari leher dan menutupi bahu serta bagian atas dada dan punggung, terbuat dari bahan kain dengan ukuran serta kombinasi warna tertentu yang mencerminkan strata ataupun jalur pendidikan masing-masing.

Samir wisudawan jenjang Diploma berbentuk setengah lingkaran di bagian depan dan belakang; jenjang Sarjana berbentuk setengah lingkaran di bagian depan, berbentuk segiempat di bagian belakang; jenjang Magister berbentuk setengah lingkaran di bagian depan, berbentuk segitiga terbalik di bagian belakang; jenjang Doktor berbentuk setengah lingkaran di depan, berbentuk segitiga terbalik yang meruncing sampai ketinggian pinggang di bagian belakang. Samir wisudawan jenjang Profesi berbentuk setengah lingkaran di bagian depan, berbentuk trapesium terbalik di bagian belakang. Warna dasar samir kuning keemasan, tepinya

berlapisan pita yang sewarna dengan bendera fakultas asal wisudawan.

Topi wisudawan dengan kuncirnya, yang merupakan pelengkap toga wisudawan, juga berwarna hitam.

5. Jaket dan Jas

Jaket universitas, yang merupakan kelengkapan pakaian resmi mahasiswa, berwarna dasar kuning. Pada dada jaket sebelah kiri tersemat lambang Universitas Indonesia berwarna dasar sama dengan warna bendera fakultas. Para mahasiswa mengenakannya pada kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, ekstra-kurikuler, atau kegiatan lain yang mengatasnamakan universitas.

Jaket universitas diciptakan Nugroho Notosusanto, mahasiswa Jurusan Sejarah (kemudian Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, yang pernah menjabat Rektor ke-8 Universitas Indonesia) dalam rangka konsolidasi mahasiswa Universitas Indonesia. Hal itu dirasakan perlu untuk mempertebal rasa persatuan dan *l' esprit de corps* di kalangan mahasiswa. Sebelumnya, jaket mahasiswa Universitas Indonesia berwarna-warni, sesuai dengan warna bendera masing-masing fakultas. Jaket mahasiswa Fakultas Hukum, misalnya, berwarna merah, sementara para mahasiswa Fakultas Sastra mengenakan jaket berwarna putih, dan Fakultas Kedokteran memakai jaket berwarna hijau, sedangkan jaket berwarna abu-abu dipakai oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Pemakaian bermacam-macam warna jaket dirasakan dapat menimbulkan celah dalam hubungan antarmahasiswa, bahkan antara fakultas yang satu dengan yang lainnya. Upaya penyeragaman tersebut dilaksanakan dalam rangka rasa persatuan di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia. Pada tahun 1956 Nugroho Notosusanto mengusulkan kepada Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia supaya menetapkan atribut-atribut bagi segenap mahasiswa Universitas Indonesia dalam rangka meningkatkan moral dan menumbuhkan *l' esprit de corps*-nya. Usulan tersebut menyebutkan

dua unsur sebagai dasar, yaitu warna kuning dan lambang Universitas Indonesia. Gagasan Nugroho tidak hanya sekadar menyeragamkan jaket mahasiswa Universitas Indonesia, melainkan juga perangkat lainnya berupa peci hitam dengan strip kuning, pita, dan lencana yang dipakai pada acara-acara resmi Universitas Indonesia.

Gagasan tersebut dianggap terlalu radikal, karena dianggap 'menindas' fakultas yang telah memiliki jaket sesuai dengan warna dasar bendera fakultas masing-masing. Keinginan untuk menonjolkan dan mementingkan fakultas masing-masing pada saat itu sangat terasa. Namun, gagasan tersebut dapat diterima dengan baik oleh Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, yang waktu itu dijabat oleh Hasan Rangkuty—yang lebih akrab dipanggil dengan sapaan Hasan Ry.

Jas Universitas, yang juga berwarna dasar kuning, diberi bordiran lambang UI berwarna kuning di bagian dada sebelah kiri. Jas Universitas hanya boleh dikenakan oleh mahasiswa, karyawan, dan tenaga pengajar yang bertugas sebagai anggota gugus protokol Universitas Indonesia.

6. Kendi Ilmu Pengetahuan

'Hari Sardjana-Bakaloreat' pertama di Universitas Indonesia, yang juga merupakan hari sarjana pertama dalam sejarah perguruan tinggi di Indonesia, dilangsungkan pada tanggal 18 September 1960 di Aula Universitas Indonesia, Jln. Salemba Raya No. 4. Pada upacara tersebut, selain Presiden RI Soekarno memberikan amanatnya, juga hadir Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama, Menteri P.P. & K., serta sejumlah menteri lainnya (Laporan Tahunan UI Tahun Pelajaran 1959/1960: 1 & 22; *Hari Sardjana Universitas Indonesia*, 1960; *cf. Sejarah Singkat Universitas Indonesia*, 1967: 38). Upacara Hari Sarjana, yang sekarang dikenal sebagai Wisuda Sarjana, merupakan tradisi yang intinya adalah melepas sarjana baru dan menerima mahasiswa

baru. Puncak acara upacara tersebut adalah serah terima Kendi Ilmu Pengetahuan dari mereka yang pergi (sarjana) kepada mereka yang datang (mahasiswa baru).

Kendi Ilmu Pengetahuan adalah kendi yang melambangkan tempat menampung ilmu pengetahuan dan teknologi. Serah terima Kendi Ilmu Pengetahuan pada setiap upacara wisuda melambangkan kesinambungan: wakil-wakil wisudawan sebagai generasi yang pergi dari alma maternya, menyerahkan kendi kepada wakil mahasiswa baru sebagai adik-adik generasinya. Dengan demikian makna serah terima tersebut adalah:

1. Para sarjana yang telah kenyang meneguk ilmu (air kendi) menyerahkan kendi kepada mereka yang baru datang; dan
2. Para mahasiswa yang baru datang adalah mereka yang haus akan ilmu (air kendi).

Seperti halnya jaket mahasiswa, tradisi Kendi Ilmu Pengetahuan juga merupakan ide Nugroho Notosusanto, yang waktu itu menjabat Pembantu Rektor III.

Kendi Ilmu Pengetahuan untuk upacara wisuda jenjang Diploma dan Sarjana berwarna putih perak dengan ornamen bermotifkan lambang universitas, sedangkan Kendi Ilmu Pengetahuan untuk upacara wisuda jenjang Pascasarjana dan jalur Profesi berwarna dasar putih perak dengan ornamen bermotif lambang UI berwarna kuning keemasan.

BAB 4
PENATAAN UNIVERSITAS INDONESIA

Pada tahun 1950, sembilan fakultas yang tergabung dalam Universitas Indonesia tersebar di lima tempat, yaitu di Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Keadaan itu sebenarnya kurang menguntungkan bagi perkembangan suatu perguruan tinggi, karena pengelolaannya menjadi sangat tidak efisien. Misalnya, penyelenggaraan rapat-rapat Senat dan peringatan Dies Natalis menelan biaya yang tidak sedikit. Kepulangan sejumlah tenaga pengajar bangsa Belanda, yang mengakibatkan kekosongan tenaga pengajar di Universitas Indonesia, juga merupakan masalah yang harus dihadapi oleh Pimpinan Universitas Indonesia saat itu.

Dalam pidatonya pada perayaan Dies Natalis ke-3 di Bandung tanggal 16 Februari 1953, Presiden Universitet Indonesia (Prof. Dr. Mr. R. Soepomo) menerangkan bahwa sebagian besar dari Guru Besar di Universitas Indonesia, terutama di Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam berkebangsaan asing, yaitu bangsa Belanda. Keadaan itu berbeda dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum di Jakarta, yang Guru Besarnya kebanyakan berkebangsaan Indonesia. Proses 'mengindonesiakan' para tenaga pengajar di Universitas Indonesia berjalan sangat lambat, dan bangsa Indonesia belum sanggup mengisi kekosongan tersebut dalam waktu yang singkat. Selanjutnya Prof. Soepomo menekankan bahwa untuk menjaga mutu dan kelancaran pendidikan, Universitas Indonesia harus mencari dan dapat menerima bantuan tenaga asing. Kebijakan Pemerintah pada waktu itu menyetujui rencana Universitas Indonesia melakukan afiliasi dengan perguruan

tinggi luar negeri untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar dan menjaga kelancaran serta kelangsungan mutu pendidikan di Universitas Indonesia.

Afiliasi dengan beberapa perguruan tinggi Amerika Serikat mulai dirintis pada tahun 1952. Afiliasi, yang dibiayai dengan bantuan International Cooperation Administration (ICA) dan Ford Foundation, diwujudkan antara lain oleh (1) Fakultas Kedokteran di Jakarta dengan University of California (1956–1960, bantuan ICA); (2) Fakultas Ekonomi di Jakarta dengan University of California (1956–1960; bantuan Ford Foundation); (3) Fakultas Teknik di Bandung dengan University of Kentucky (1959–1963, bantuan ICA); (4) Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di Bandung dengan University of Kentucky (1956–1963, bantuan ICA); (5) Fakultas Pertanian di Bogor dengan University of Kentucky (1957–1963, bantuan ICA); dan (6) Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor dengan University of Kentucky (1957–1963, bantuan ICA). Universitas Indonesia di Bogor dan Bandung melanjutkan afiliasinya hingga awal tahun 1966, setelah masing-masing melepaskan diri dari Universitas Indonesia (Beers, 1971: 3). Dalam rangka afiliasi itu, fakultas yang bersangkutan mendapat bantuan berupa tenaga pengajar yang telah diseleksi dengan baik, peralatan laboratorium—termasuk peralatan untuk rumah sakit pendidikan—buku teks, dan sejumlah beasiswa untuk mengirim tenaga pengajar ke Amerika Serikat dengan tugas belajar.

Dalam pidatonya pada Hari Sarjana ke-3, tanggal 29 September 1962, Presiden Universitas Indonesia melaporkan bahwa Universitas Indonesia telah ditunjuk sebagai *feeder university* oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Sehubungan dengan itu, Universitas Indonesia harus mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar dalam berbagai mata pelajaran untuk disebarkan ke berbagai perguruan tinggi. Bantuan tenaga pengajar Universitas Indonesia ke beberapa perguruan tinggi lain sebenarnya telah

dilaksanakan sejak tahun ajaran 1957/1958, antara lain ke Universitas Sumatra Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Akademi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Ketatanegaraan, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin (Laporan Ketua Presidium Universitas Indonesia tahun ajaran 1957/1958: 17). Pada tahun 1970 Universitas Indonesia telah dapat memberikan bantuan tenaga pengajar ke perguruan tinggi di Malaysia, seperti ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Penang.

Antara tahun 1950 dan tahun 1998 terjadi perubahan yang mendasar di tubuh Universitas Indonesia. Perubahan tersebut meliputi (a) pembukaan 15 (lima belas) fakultas baru; (b) pengubahan nama 5 (lima) fakultas; serta (c) pengalihan 11 (sebelas) fakultas dan 3 (tiga) lembaga ke tujuh lembaga pendidikan (universitas, institut, dan politeknik) yang baru didirikan pada saat itu.

A. PEMBUKAAN 15 FAKULTAS BARU

1. Fakultas Ekonomi yang Kedua (Jakarta, 1950)

Pemerintah berpendapat bahwa di Jakarta perlu ada suatu fakultas ekonomi. Pada hari Senin, tanggal 11 September 1950, Prof. Mr. Soenario Kolopaking Sanyatavijaya menandatangani pengumuman yang menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk mendirikan Fakulteit Ekonomi dan School for Business Administration di Jakarta. Keputusan Kementerian P.P. dan K. itu memberi jawaban akan kebutuhan suatu lembaga di Jakarta untuk mendidik calon-calon ahli dalam bidang ekonomi. Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menunjuk Prof. Mr. Soenario Kolopaking Sanyatavijaya untuk membuka kedua lembaga pendidikan itu dan sekaligus bertindak sebagai Dekan Fakulteit Ekonomi (*Java Bode*, 12 September 1950,

hlm. 2; *Merdeka*, 12 September 1950, hlm. 4).

Lama pendidikan di Fakulteit Ekonomi adalah 5 (lima) tahun dan di School for Business Administration, yang merupakan cabang *(dochterinstelling)* dari Fakulteit Ekonomi, adalah 2 (dua) tahun. Tamatan School for Business Administration dapat melanjutkan pendidikannya ke Fakulteit Ekonomi, setelah mereka melakukan kerja praktik selama 3 atau 4 tahun. Pendaftaran calon mahasiswa Fakultet Ekonomi dan School for Business Administration dibuka mulai tanggal 12 September 1950 di Jln. Eijkman No. 12 (sekarang Jln. Kimia, Jakarta), sedangkan calon mahasiswa School for Business Administration dapat juga mendaftarkan diri di Sekretariat Universitet Indonesia, Jln. Salemba Raya No. 4, Jakarta (*Java Bode*, 12 September 1950, hlm. 2).

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 17338/Kab. tanggal 14 Agustus 1950, Prof. Mr. Soenario Kolopaking Sanyatavijaya diangkat sebagai "organisator dan formateur." Pada tanggal 18 September 1950, ia meresmikan pembukaan Fakultet Ekonomi Djakarta di Aula Fakultas Kedokteran, Jln. Salemba Raya No. 4 [*sic*] (*Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1950–1975*: 7; *cf.* *35 Tahun Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 1985: 12; *45 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 1995: 2).

Pada saat pembukaan, hadir antara lain Ketua Dewan Kurator, Mr. Wongsonegoro, dan Presiden Universitet Indonesia, Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerio. Dalam acara pembukaan tersebut Ketua Dewan Kurator memberikan sambutan singkat, sedangkan Presiden Universitet Indonesia antara lain menguraikan tujuan pendirian Fakultas Ekonomi. Acara dilanjutkan dengan kuliah perdana, yang disampaikan oleh Prof. Mr. Soenario Kolopaking berjudul "Hoeboengan Antara Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Politik Negara Oemoem."

Pada saat didirikan, Fakultet Ekonomi di Jakarta hanya memiliki satu jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Perusahaan dengan
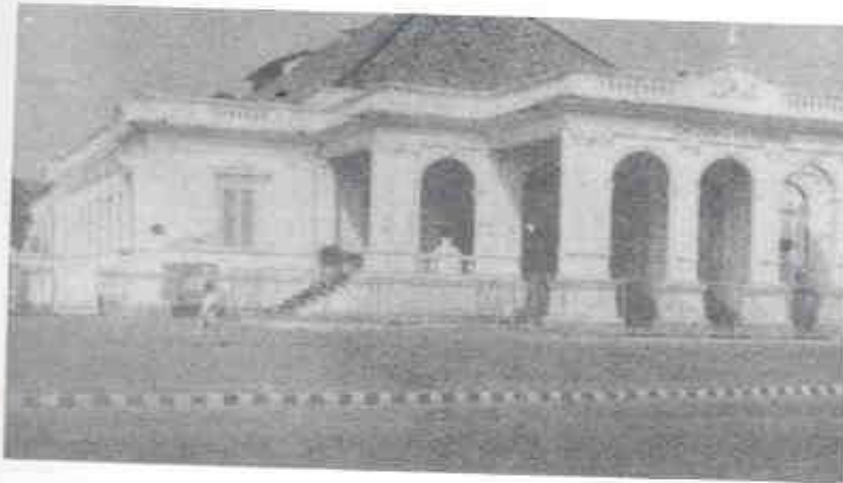
Gedung Kesenian di Pasar Baru, yang digunakan sebagai tempat kuliah Fakultas Ekonomi UI pada awal tahun 1950-an

Gedung Adhuc Stat (Jln. Taman Suropati No.2, Jakarta) yang digunakan sebagai tempat kuliah Fakultas Ekonomi pada awal tahun 1950-an (Sekarang Gedung Bappenas.)

pengajar tunggal Prof. Mr. Soenario Kolopaking. Kuliah-kuliah yang diberikan meliputi Ekonomi Umum, Ekonomi Indonesia, dan Pengantar Sosiologi. Pada bulan November 1950, Fakultet Ekonomi mendapat tambahan seorang tenaga pengajar, yaitu Prof. Mr. Djokosoetono, yang memberi kuliah dalam mata ajaran Ilmu Hukum. Pada mulanya kegiatan perkuliahan dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Aula Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (di Jln. Tambak No. 2); Gedung Kesenian Pasar Baru; di gedung Adhuc Stat (sekarang Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas) di Jl. Taman Suropati

No. 2, Jakarta Pusat; di Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Jln. Pegangsaan Timur; dan di Jln. Diponegoro 72.

Untuk tahun ajaran 1950–1951, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan membentuk sebuah panitia yang akan menyelenggarakan perkuliahan di Fakultet Ekonomi Djakarta. Pembentukan panitia tersebut ditetapkan dengan Keputusan No. 1755/B.P.T. tanggal 24 Januari 1951. Menteri P.P. dan K. kemudian mengubah keputusan tersebut dengan Keputusan No. 3603/B.P.T. tanggal 13 Februari 1951. Susunan panitia terdiri dari: (1) Prof. Mr. Soenario Kolopaking; (2) Prof. Mr. Djokosoetono;

Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UI, Jln. Pegangsaan Timur, yang juga digunakan sebagai tempat kuliah Fakultas Ekonomi UI pada awal tahun 1950-an

Gedung (di Jln. Diponegoro No. 72) yang tahun 1950–1970 digunakan berturut-turut oleh Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, dan Fakultas Psikologi UI sebagai tempat kuliah, juga oleh Fakultas Ekonomi UI di awal tahun 1950-an. (Sekarang Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jln. Diponegoro No. 82.)

(3) Prof. Dr. Mr. Hazairin; (4) Prof. Dr. D.H. Burger; (5) Prof. Dr. Mr. W.L.G. Lemaire; (6) Prof. Dr. A. Kraal; (7) Prof. Dr. Mr. W.M.E. Noach; dan (8) Dr. R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Pada hari yang sama, yaitu tanggal 13 Februari 1951, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 3604/B.P.T., yang menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 15 Januari 1951, Fakultet Ekonomi Djakarta resmi menjadi fakultas di lingkungan Universitet Indonesia. Dengan demikian Fakultas Ekonomi di Jakarta merupakan Fakultas Ekonomi kedua yang dikelola oleh Universitas Indonesia pada saat itu. Fakultas Ekonomi pertama, yang berkedudukan di Makassar, digabungkan menjadi salah satu fakultas dari Universiteit Indonesia/Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat dalam bulan Februari 1950.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo ditunjuk untuk menggantikan Prof. Mr. Soenario Kolopaking sebagai Dekan Fakultet Ekonomi, ia mulai memikirkan tentang kemungkinan dibentuknya suatu lembaga pendidikan bagi tenaga pimpinan perusahaan dan pemerintahan. Pemikiran itu kemudian direalisasikan dalam Akte Notaris Mr. Raden Soedja, Nomor 183 tanggal 26 Juli 1956 tentang pendirian Jajasan Perguruan Tinggi Ilmu Ketataniagaan dan Ketatapradjaan (Graduate Institute of Business and Public Administration). Pada mulanya mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi itu adalah mereka yang telah lulus pendidikan tingkat akademi atau tingkat sarjana muda. Pada tahun 1958, program pendidikan perguruan tinggi tersebut diubah menjadi lima tahun, sehingga mahasiswa yang dapat diterima adalah tamatan SMA. Dalam laporan tahunan Universitas Indonesia tahun pelajaran 1959/1960 (hlm. 40–41), Perguruan Tinggi Ilmu Ketataniagaan dan Ketatapradjaan—yang hampir seluruh kegiatan pendidikannya diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Fakultas

Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia—telah menghasilkan 25 orang lulusan yang diberi gelar *Master of Business Administration.*

Selanjutnya dilaporkan juga bahwa Perguruan Tinggi Ilmu Ketataniagaan dan Ketatapradjaan—yang masih merupakan perguruan tinggi swasta—telah diusulkan ke Departemen P.P. dan K. untuk dijadikan suatu *extension* dari Fakultas Ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, mulai tahun 1961 Perguruan Tinggi Ilmu Ketataniagaan dan Ketatapradjaan diubah statusnya dari Perguruan Tinggi swasta menjadi *extension* Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (*Pedoman Perguruan Tinggi Ketataniagaan dan Ketatapradjaan Djakarta Tahun Akademi 1958/1959: 7; 35 Tahun Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,* 1985: 118–119).

2. Fakultas Hukum yang Kedua (Makassar, 1955)

Pada tahun 1951 Cabang Bagian Hukum dari Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitet Indonesia di Jakarta didirikan di Makassar dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 3399/Kab., tanggal 30 Januari 1952. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1955, dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 34666/Kab., tanggal 21 Juni 1955, Cabang Bagian Hukum tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Hukum kedua yang dikelola Universitas Indonesia, berkedudukan di Makassar.

3. Fakultas Kedokteran yang Ketiga (Makassar, 1955)

Pada tanggal 22 Desember 1953, dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 49799/B.P.T./B., dibentuk suatu panitia untuk menyiapkan pendirian Fakultet Kedokteran di Makassar, sebagai Cabang Fakultet Kedokteran Universitet Indonesia di Jakarta. Panitia, yang bekerja di bawah pimpinan Prof. Dr. Soedjono D.

Menteri P.P. & K. No. 43509/Kab., tanggal 24 November 1952 Balai Psychotechnik dimasukkan ke dalam lingkungan Fakultet Kedokteran terhitung mulai tanggal 1 Desember 1952. Namanya kemudian diubah menjadi Lembaga Psychologi (*Tiga Pidato Dies Natalis ke-4 dari Universitet Indonesia,* 1954: 12). Lembaga tersebut diketuai Prof. dr. R. Slamet Iman Santoso, yang dibantu oleh Prof. Dr. R.F. Beerling, Prof. F. Weinreb, dan Ir. Drs. L.D. Teutelink.

Dalam rangka mengisi tenaga yang terdidik dalam bidang psikologi untuk keperluan Lembaga itu, Kementerian P.P. & K. kemudian membuka Kursus Asisten Psikologi (pendidikan tingkat Sarjana Muda) pada tanggal 3 Maret 1953. Prof. dr. R. Slamet Iman Santoso dipercaya untuk menyelenggarakan dan memimpin pendidikan tersebut. Dari 300 pelamar yang mendaftar untuk Kursus Asisten Psikologi itu, hanya 33 orang pelamar yang diterima. Tempat perkuliahannya berada di kompleks Fakultas Kedokteran UI.

Pada tahun 1956, Kursus Asisten Psikologi tersebut menghasilkan beberapa lulusannya. Pada saat itu pula, Lembaga Psikologi Kementerian P.P. & K. diubah namanya menjadi Jurusan Psikologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan statusnya ditingkatkan menjadi pendidikan psikologi tingkat universitas. Pada tahun 1958 pendidikan tersebut dapat menghasilkan Sarjana Psikologi pertama, yaitu Fuad Hassan (kini Prof. Dr. Fuad Hassan). Dengan lulusnya sarjana psikologi yang pertama itu, Prof. R. Slamet Iman Santoso kemudian mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan agar di Universitas Indonesia didirikan Fakultas Psikologi. Usul itu merupakan realisasi hasil pembicaraan Prof. R. Slamet Iman Santoso dengan Presiden Universitet Indonesia (Prof. Dr. Mr. R. Soepomo) sewaktu merayakan Dies Natalis UI di Bandung tahun 1952, yang sepakat membuka Fakultas Psikologi secara bertahap. Akhirnya, dengan

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 108049/U.U. tanggal 21 Desember 1960, Fakultas Psikologi didirikan di Jakarta.

Kegiatan perkuliahan di Fakultas Psikologi sudah dimulai pada tanggal 1 Juli 1960. Namun, mengingat kondisi saat itu belum memungkinkan Fakultas Psikologi memiliki gedung sendiri, maka kegiatan perkuliahan dilakukan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum menempati gedung perkuliahan eks-FS-UI di Jln. Diponegoro No. 82–84 yang mulai digunakan tahun 1960, kegiatan perkuliahan antara lain dilakukan di Bagian Psikiatri FK-UI di RSUP; di Jln. Madura No. 49 (sekarang Jln. Moh. Yamin, S.H.); di Fakultas Ekonomi serta di kediaman Kepala Tata Usaha Fakultas Psikologi UI, M. Soekanda di Jln. Salemba Raya No. 4. Kuliah di rumah M. Soekanda dilakukan hingga tahun 1981. Pada tahun 1975, Fakultas Psikologi mengalihkan kegiatan perkuliahannya dari Jln. Diponegoro ke Jln. Salemba Raya No. 4 (sebelah FT-UI Salemba), dan pada tahun 1981 kemudian menempati gedung 'baru' di Kampus UI Rawamangun. Sejak tahun 1987 seluruh kegiatan perkuliahan dipusatkan di Kampus UI, Depok.

5. Fakultas Kedokteran Gigi (Jakarta, 1961)

Fakultas Kedokteran Gigi dibuka di Jakarta pada tahun kuliah 1961/1962 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI No. 108049/U.U. tanggal 21 Desember 1960. Berdirinya FKG-UI merupakan hasil usaha dari kalangan dokter gigi di Indonesia, yang terutama dirintis oleh staf pengajar di Bagian Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran UI/Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP, sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo), antara lain Prof. Dr. Ouw Eng Liang, Prof. Dr. Moestopo, dan drg. Geri Panjaitan.

Pada awal berdirinya, FKG-UI hanya memiliki dua orang Staf Dosen Tetap dan 37 orang Dosen Tidak Tetap, yang latar

belakang pendidikannya tidak saja dari bidang kedokteran gigi tetapi juga dari berbagai disiplin ilmu kedokteran lainnya. Pada saat didirikan, FKG-UI hanya menempati satu ruangan yang dipinjam dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP), yaitu Kamar No. 1, Bagian Tata Usaha Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut RSUP. Untuk kuliah-kuliah tingkat persiapan, pelaksanaan dan tempatnya digabungkan bersama-sama mahasiswa tingkat I FK-UI, sedangkan untuk keperluan praktikum Anatomi Gigi digunakan salah satu tempat penitipan sepeda RSUP (sekarang tempat parkir Paviliun Cendrawasih, RSCM). Pada tanggal 17 Oktober 1963, sebagian ruangan depan Perpustakaan Rakyat milik Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan di Jln. Salemba Raya No. 4 diserahkan ke Fakultas Kedokteran. Pada tahun 1964 FKG-UI memperoleh ruang tambahan di bagian belakang gedung Perpustakaan Rakyat. Sebagian dari ruangan tersebut digunakan untuk praktikum praklinik, mengingat pada saat itu sudah ada mahasiswa tingkat III, yang sudah sangat membutuhkan persiapan untuk kepaniteraan klinik di tingkat IV. Pada bulan April 1965, seluruh gedung Perpustakaan Rakyat di Jln. Salemba Raya No. 4 diserahkan kepada FKG-UI. Dengan demikian sebagian besar kegiatan perkuliahan dan praktikum yang bersifat *dental*, serta kegiatan kemahasiswaan dapat diselenggarakan di gedung tersebut.

Tempat penitipan sepeda di RSUP yang digunakan untuk praktikum Anatomi Gigi FKG-UI

Pada tahun 1965, FKG-UI harus dapat menyediakan tempat untuk menjalankan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa yang duduk di tingkat IV. Untuk keperluan itu, tanggal 25 Maret 1965 FKG-UI membuka Poliklinik Gigi untuk umum yang bertempat di paviliun sebelah kanan Biro Rektor UI, Jln. Salemba Raya No. 4. Pada mulanya Poliklinik Gigi itu hanya terdiri dari Ilmu Pengawet Gigi dan Ilmu Meratakan Gigi, sedangkan bagian-bagian lain yang diperlukan dalam kepaniteraan klinik mendapat pinjaman ruangan di bagian Exodontia di kamar 22 dan Bagian Ilmu Gigi Tiruan di kamar 10 Rumah Sakit Umum Pusat. Pada tahun 1968 poliklinik FKG-UI diperluas dengan pengadaan laboratorium teknik. Pada tahun itu juga, dibuka Poliklinik Gigi yang baru di Jln. Pegangsaan Timur No. 17 sebagai realisasi kerja sama dengan bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK-UI.

Pada tahun 1971, semua kegiatan pendidikan FKG-UI—kecuali Bagian Bedah Mulut yang masih tetap bertempat di RSUP—sudah dapat dipusatkan di Gedung FKG-UI yang baru selesai dibangun. Gedung itu kemudian dikenal dengan nama Gedung A. Sejak tahun 1985, FKG-UI sudah memiliki 4 gedung, yaitu Gedung A, B, C, dan D yang semuanya berlokasi di Jln. Salemba Raya No. 4, dan untuk sementara dapat menampung semua kegiatan pendidikannya. Meskipun ada rencana untuk

Gedung B, Fakultas Kedokteran Gigi UI, Jln. Salemba Raya No. 4, Jakarta [1995]

memindahkan kegiatan pendidikan FKG-UI ke Kampus UI di Depok, hingga tahun 1999 rencana tersebut belum dapat diwujudkan.

6. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam yang Kedua (Jakarta, 1961)

Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) pertama dalam lingkungan Universitas Indonesia, yang berkedudukan di Bandung, dilepaskan dari UI. Fakultas tersebut kemudian menjadi salah satu fakultas yang dikelola oleh Institut Teknologi Bandung, yang dibuka pada tahun 1959.

Rencana pendirian FIPIA ke-2 Universitas Indonesia di Jakarta berawal dalam suatu rapat pada tanggal 18 Mei 1960, yang dipimpin Prof. Dr. Soedjono D. Poesponegoro, selaku Ketua Presidium. Rapat itu dihadiri Prof. dr. R. Slamet Iman Santoso, Prof. dr. Soetarman, Prof. dr. B. Sjahriar Rasad, Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja, Prof. dr. G.A. Siwabessy, Ir. Kuntoadji, Ir. Jasif Ilias, Dipl. Ing. Sudjito Danusaputro, dan Drs. Lauw Soan Keng. Dalam rapat tersebut Prof. Soedjono D. Poesponegoro mengemukakan bahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah meminta saran kepada Universitas Indonesia tentang kemungkinan pendirian FIPIA di Jakarta. Saran Universitas Indonesia tentang pendirian FIPIA sudah harus disampaikan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan September 1960.

Keputusan rapat adalah membentuk panitia yang diketuai oleh Drs. Lauw Soan Keng, dengan anggota Prof. dr. G.A. Siwabessy dan Ir. Kuntoadji. Tugas panitia tersebut adalah membuat laporan tentang kemungkinan mendirikan FIPIA-UI di Jakarta secepat mungkin.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungi beberapa pakar Ilmu Pasti dan Ilmu Alam yang mengajar di Universitas Indonesia di Bogor dan di Institut Teknologi Bandung

(ITB). Para pakar yang dihubungi antara lain Drs. S.A. Manus (Geologi, UI-Bogor); Dra. Sri Sabani Soemartono (Botani, UI-Bogor); Dr. S. Somadikarta (Zoologi, UI-Bogor); Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro (Kimia ITB); Prof. Dr. Ong Ping Hok (Fisika, ITB); Drs. Isjrin Noerdin (Kimia, ITB); Drs. E. Noerhadi (Botani, ITB); dan Mahargo Suprapto, Mag. Scient. (Zoologi, ITB). Mereka pada umumnya bersedia membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk mengajar di FIPIA yang akan didirikan di Universitas Indonesia, Jakarta.

Menteri P.P. & K. kemudian mengeluarkan Keputusan No. 108049/U.U. tanggal 21 Desember 1960, tentang pendirian Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di lingkungan Universitas Indonesia Jakarta setelah mendengar laporan dari Ketua Presidium Universitas Indonesia. Sebagai Dekan pertama FIPIA-UI diangkat Prof. dr. G.A. Siwabessy.

Surat ketetapan No. 06/D/UP/61 tanggal 29 Juni 1961, yang ditandatangani di Jakarta oleh Prof. dr. G.A. Siwabessy dan Prof. Dr. Soedjono D. Poesponegoro, mengangkat panitia penerimaan mahasiswa angkatan pertama FIPIA-UI, yang terdiri dari 4 orang, yaitu Drs. Lauw Soan Keng, Dr. S. Somadikarta, B. Sudarsono, M.Sc., dan Erman Nataadidjaja, B.Sc. Mereka diberi kekuasaan penuh dalam menjalankan pekerjaannya.

FIPIA-UI di Jakarta memulai kegiatan akademiknya tahun 1961/1962 dengan membuka 4 (empat) jurusan, yaitu: Jurusan Matematika, Jurusan Fisika, Jurusan Kimia, dan Jurusan Biologi. Jumlah mahasiswa yang terdaftar pada saat itu adalah 52 orang, dengan rincian 4 mahasiswa Jurusan Matematika, 6 mahasiswa Jurusan Fisika, 28 mahasiswa Jurusan Kimia, dan 14 mahasiswa Jurusan Biologi.

Kegiatan pendidikan di FIPIA-UI dipercayakan kepada 24 orang tenaga pengajar tidak tetap, dibantu 10 orang pegawai administrasi. Seluruh kegiatan pendidikan FIPIA-UI, kecuali Jurusan Biologi, dipusatkan di Lembaga Eijkman (Departemen

Kesehatan) di Jln. Diponegoro No. 69. Kegiatan pendidikan Jurusan Biologi diselenggarakan di Universitas Indonesia Bogor hingga tahun kuliah 1962/1963 dan di Institut Pertanian Bogor hingga tahun kuliah 1967/1968. Pada tahun 1969, Jurusan Biologi dipindahkan ke Jln. Salemba Raya No. 4 untuk bergabung dengan Jurusan lainnya. Dari tahun kuliah 1968/1969 hingga tahun kuliah 1977/1978, Jurusan Biologi tidak menerima mahasiswa baru, kecuali untuk tingkat Sarjana.

Pada tahun 1965, FIPIA-UI membuka Jurusan Farmasi. Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1967, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran di Bandung—yang kegiatan akademiknya ditempatkan di Gedung Direktorat Topografi Angkatan Darat, Jln. Dr. Wahidin, Jakarta—diserahkan kepada FIPIA-UI. Sejak tahun 1974, semua kegiatan pendidikan FIPIA-UI yang mengelola 6 (enam) jurusan—yaitu (1) Jurusan Matematika; (2) Jurusan Fisika; (3) Jurusan Kimia; (4) Jurusan Biologi; (5) Jurusan Farmasi; dan (6) Jurusan Geografi—dipusatkan di Kampus UI Salemba, Jakarta.

Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) diubah namanya menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
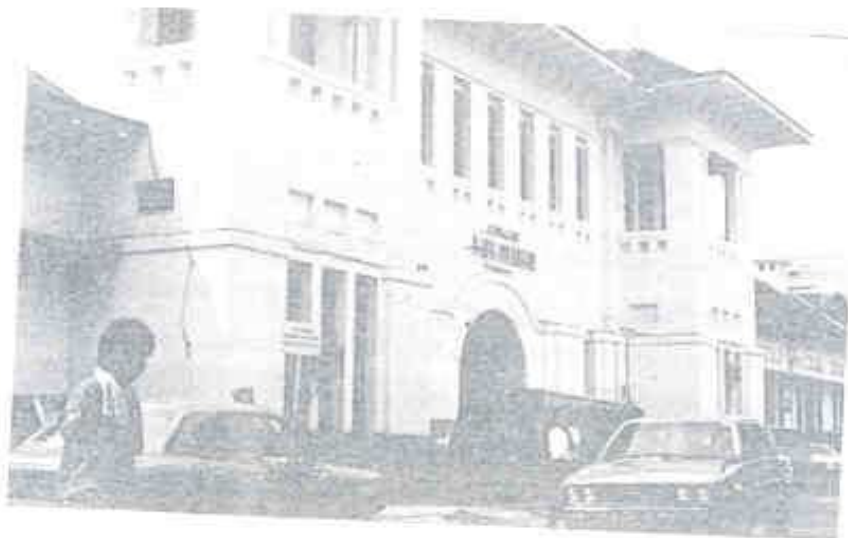
Lembaga Eijkman, Jln. Diponegoro No. 69, tempat perkuliahan FIPIA-UI [1961]

Alam (FMIPA) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981, tanggal 14 Agustus 1981 (Lembaran-Negara RI No. 41) tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri. Peraturan Pemerintah itu kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Indonesia. Sejak tahun 1987 seluruh kegiatan perkuliahan FMIPA-UI dipindahkan ke Kampus UI di Depok.

7. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Jakarta, 1961)

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (sebagai gabungan Kursus B1 dan B2) dibuka di Jakarta pada tahun ajaran 1961/1962 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 108049/UU tanggal 21 Desember 1960. Prof. Dr. R. Sugarda Poerbakawatja menjabat sebagai Dekan pertama FKIP-UI (1961–1963).

8. Fakultas Teknik yang Kedua (Jakarta, 1964)

Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik di Bandung—yang kemudian namanya diubah menjadi Fakultas Teknik—yang sejak tahun 1950 dikelola oleh Universitas Indonesia, diserahkan kepada Institut Teknologi Bandung (ITB), yang dibuka tahun 1959. Pimpinan Universitas Indonesia merasa sangat kehilangan dan merasakan pula kebutuhan untuk mendirikan pendidikan teknik tinggi di lingkungan Universitas Indonesia di Jakarta. Lima tahun setelah penyerahan Fakultas Teknik kepada ITB, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengadakan Kongres ke-8 pada tahun 1964. Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia—yaitu Ir. Slamet Bratanata, Ir. Sutami, dan Ir. Kuntoadji—mengusulkan agar Universitas Indonesia mendirikan Fakultas Teknik di Jakarta. Rektor Universitas Indonesia (Kolonel dr. Sjarif Thajeb) beserta pengurus Persatuan

Insinyur Indonesia kemudian menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang juga seorang Insinyur, yang menerima baik usul tersebut dan sekaligus menunjuk Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo sebagai Dekan pertama Fakultas Teknik-UI. Ia dibantu oleh Ir. Sutami (Pembantu Dekan I), Ir. Slamet Bratanata (Pembantu Dekan II), dan Dr. Ing. Purnomosidhi Hadjisarosa (Pembantu Dekan III). Sebagai realisasi kesepakatan Bung Karno tersebut dikeluarkanlah Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964 tentang pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Jakarta. Fakultas Teknik di Jakarta tersebut merupakan Fakultas Teknik kedua yang pernah dimiliki Universitas Indonesia.

Pada tahun 1964 itu juga, Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo membangun Kampus FT-UI di atas tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), di Jln. Salemba Raya No. 4, Jakarta. Saat itu Prof. Roosseno mempunyai proyek untuk membangun gedung Badan Perencana Urusan Pangan atau BPUP (sekarang Badan Urusan Logistik atau Bulog). Bedeng proyek gedung itu, yang didirikan di Jln. Salemba Raya No. 4, tidak dibangun seperti bedeng pada umumnya. Roosseno telah merancang bedeng tersebut sedemikian rupa, sehingga setelah proyek itu selesai, bedeng itu dapat dimanfaatkan untuk gedung Fakultas Teknik. Bedeng tersebut dibangun dalam dua bentuk, yaitu yang bahannya terdiri dari bata dengan dinding gedek (untuk ruang pimpinan, dengan ukuran 4 x 4 m^2, sebanyak 2 buah), dan yang setengah dindingnya dari kawat ayam (untuk keperluan kuliah, dengan ukuran 8 x 12 m^2, sebanyak 2 buah, dan satu ruangan berukuran 10 x 20 m^2). Di samping ruang pimpinan dan ruang kuliah, juga ada ruang administrasi dan rumah jaga.

Biaya pembangunan Kampus FT-UI—yang menyita waktu kurang lebih tiga setengah bulan—diperoleh dari proyek BPUB,

dikerjakan oleh tukang yang dibantu oleh para mahasiswa FT-UI yang tengah mengikuti Masa Prabakti Mahasiswa (Mapram). Mahasiswa angkatan pertama (tahun 1964) terdaftar 201 orang. Kegiatan pendidikan di Fakultas Teknik dengan 32 mata kuliah dipercayakan kepada seorang dosen tetap, yaitu Ir. Diyan Sigit, dan 29 orang dosen tidak tetap serta 11 tenaga nonakademis. Pada tahun 1966, Ir. Frits Bernhard Mewengkang menjadi dosen tetap kedua di FT-UI. Kuliah perdana diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 1964, sementara bedeng itu baru diresmikan pada tanggal 27 November 1964.

Mengingat kesibukan pimpinan fakultas yang dijabat oleh tenaga pengajar tidak tetap pada waktu itu, semua urusan administratif fakultas—seperti mencari tenaga pengajar, menyusun kurikulum, dan pengaturan jadwal perkuliahan—praktis ditangani Ir. Diyan Sigit. Kurikulum yang disusun adalah kurikulum Fakultas Teknik-UI di Bandung (sekarang FT-ITB), yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan Fakultas Teknik-UI di Jakarta pada saat itu. Kegiatan perkuliahan selain diselenggarakan di bedeng Jln. Salemba Raya No. 4, juga diselenggarakan di Fakultas Hukum dan di Lapangan Tembak, Senayan (terutama Jurusan Arsitektur).

Pada awalnya, Fakultas Teknik hanya mempunyai 3 Jurusan, yaitu Jurusan Sipil (Ketua: Ir. Sutami); Jurusan Mesin (Ketua: Ir. Achmad Sajoeti); dan Jurusan Listrik (Ketua: Ir. Hadinoto), dengan memanfaatkan para insinyur yang tengah menggarap proyek gedung Conference of the New Emerging Forces (Conefo, sekarang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang direkrut sebagai tenaga pengajar. Pada tahun 1965 dibuka 2 Jurusan lagi, yaitu Jurusan Metalurgi (Ketua: Dr. Ing. Purnomosidhi Hadjisarosa) dan Jurusan Arsitektur (Ketua: Ir. Sunarjo S.). Setelah 2 tahun berdiri, Jurusan Metalurgi dirasakan tidak akan dapat berkembang baik, karena sulit mencari tenaga pengajar untuk jurusan tersebut.

Anggaran FT-UI hanya Rp476.000,00 per tahun, untuk mengelola 201 mahasiswa, membayar gaji dosen tidak tetap dan pegawai, serta kebutuhan pendidikan. Dosen yang ada—seperti Ir. Ingkiriwang (alm. Prof. Ir. F.J. Ingkiriwang, mantan Menteri Perindustrian, Kabinet Djuanda 1957–1959)—hanya digaji Rp1.800,00 setiap bulannya.

Jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi masalah di Jurusan Metalurgi adalah mengirim 7 dari 14 mahasiswa Metalurgi ke ITB. Di antara 7 mahasiswa yang dikirim ke Bandung adalah Todung Barita (kemudian menjabat Dekan FT-UI periode 1989–1993 dan 1993–1997), yang akhirnya masuk Jurusan Tambang, dengan spesialisasi Metalurgi. Tujuh mahasiswa yang tetap di Jakarta antara lain Sutopo dan Bustanul Arifin. Upaya lain yang dilakukan adalah menyelenggarakan perkuliahan dengan sistem paket, yaitu berapa lama dan berapa besar biaya yang diperlukan untuk seorang dosen mengajar dan membimbing mahasiswa sampai mahasiswa lulus. Dana antara lain dicarikan melalui kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Hutama Karya.

Kesulitan di bidang dana masih terus berlanjut. Bahkan pada tahun 1967, Fakultas Teknik tidak mempunyai kertas untuk ujian mahasiswa dan akhirnya Dr. Diyan Sigit mengajak mahasiswa ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Demonstrasi mahasiswa ke Bappenas membuahkan hasil dengan dikucurkannya sejumlah dana. Dengan dana itu FT-UI dapat membangun beberapa laboratorium, di antaranya Laboratorium Elektro dan Laboratorium Sipil.

Pada tanggal 28 Januari 1971, FT-UI untuk pertama kali menghasilkan lulusannya, antara lain I.G.A. Ktut Alit, Djoko Hartanto (sekarang Prof. Dr. Djoko Hartanto, M.Sc.), Widjanarko, Leo Hendrata, F.X. Rulan, Suwondo, dan Budi Suharto. Ujiannya dipimpin Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo.

Palu bergagang hulu keris yang digunakan Prof. Roosseno untuk memimpin Sidang Ujian Sarjana FT-UI tanggal 28 Januari 1971

Palu yang digunakan dalam sidang ujian sarjana tersebut gagangnya adalah gagang keris yang dibeli dari sebuah toko penjual barang antik di Jln. Sabang (Wawancara dengan Ir. Diyan Sigit dan Ir. F.B. Mewengkang, FT-UI 9 Juli 1999).

Untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar, pada tahun 1976 Fakultas Teknik mendirikan Lembaga Teknologi, yang didukung sepenuhnya oleh para ahli dari setiap Jurusan. Dalam tahun kuliah 1985/1986, Fakultas Teknik membuka Jurusan Teknik Gas dan Petrokimia, yang merupakan gabungan dari Program Studi Teknik Gas di Jurusan Metalurgi dan Program Studi Teknik Kimia di Jurusan Mesin. Pada tahun 1986/1987 seluruh kegiatan akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia diselenggarakan di Kampus UI Depok.

9. Fakultas Kesehatan Masyarakat (Jakarta, 1965)

Sebelum Fakultas Kesehatan Masyarakat didirikan, tenaga-tenaga ahli di bidang kesehatan masyarakat di Indonesia—yang sangat dibutuhkan—adalah lulusan luar negeri, yang jumlahnya sangat sedikit. Fakultas Kedokteran pada saat itu hanya menghasilkan tenaga-tenaga spesialis di bidang kedokteran klinik.

Dokter R. Mochtar, Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan, Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia mengajukan gagasan mendirikan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Sebelum gagasannya terwujud, Dokter R. Mochtar meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat terbang di daerah Bandung pada tanggal 24 Januari 1961. Dokter Sajono, yang melanjutkan gagasan tersebut, mengajukan usul pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat kepada Rektor Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran UI, dan kepada Perwakilan World Health Organization (WHO) untuk Indonesia. Usul tersebut hingga akhir tahun 1964 tidak mendapat tanggapan. Mengingat kebutuhan akan tenaga dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat sudah sangat mendesak, Dr. Sajono kemudian mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, yang isinya mendesak agar Fakultas Kesehatan Masyarakat segera didirikan di Universitas Indonesia.

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 26 Tahun 1965, tanggal 26 Februari 1965, yang kemudian diperbaiki dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 153 Tahun 1965, menetapkan tanggal 1 Juli 1965 sebagai tanggal berdirinya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Pada mulanya, kegiatan akademi FKM-UI diselenggarakan bersama-sama dengan Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada saat itu FKM-UI tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Gedung FKM-UI di Jln. Proklamasi No. 16 baru diresmikan pemakaiannya oleh Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro, pada tanggal 16 Juni 1973. Untuk mengenang jasa almarhum Prof. R. Mochtar, gedung tersebut oleh Rektor UI diberi nama Gedung Mochtar. Pada tahun akademik 1987/1988 seluruh kegiatan FKM-UI dipindahkan ke Kampus UI Depok.

Pada awalnya, kegiatan perkuliahan di FISIP-UI tidak jauh berbeda dengan fakultas-fakultas lain, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika masih bergabung dengan Fakultas Hukum, kegiatan perkuliahan diselenggarakan di Jln. Salemba Raya No. 4, kemudian pindah ke Kampus Rawamangun. Dalam tahun kuliah 1987 seluruh kegiatan perkuliahan dipusatkan di Kampus UI Depok.

11. Fakultas Pascasarjana (Jakarta, 1982)

Dalam pidato pengarahannya pada Rapat Kerja Rektor Universitas/Institut Negeri Seluruh Indonesia, yang diadakan pada tanggal 15–17 Maret 1976 di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (dr. Sjarif Thajeb) menekankan beberapa masalah yang dihadapi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Di antara permasalahan tersebut adalah tentang perlunya meningkatkan jumlah tenaga pengajar yang bergelar doktor. Lebih lanjut dikatakan (hlm. 11) bahwa:

> Jumlah sarjana yang bergelar doktor yang mencerminkan kemampuan meneliti, yang dihasilkan oleh sistem pendidikan tinggi kita pada saat ini sangat sedikit. Bila hal ini diukur dengan jumlah biaya riset yang telah dialokasikan dari anggaran Pelita sampai dengan tahun 1976 yang berjumlah kira-kira satu miliar rupiah—belum terhitung biaya di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diperkirakan kira-kira dua kali lebih besar—sedangkan jumlah doktor yang dihasilkan hanya di bawah 100 orang, maka perlu kita pikirkan dengan cukup mendalam bagaimana cara menaikkan kemampuan kita dalam menghasilkan tenaga sarjana dengan gelar doktor ini.

Sebelum Fakultas Pascasarjana didirikan, bimbingan bagi seorang sarjana yang akan mengambil gelar Doktor dalam bidang ilmu tertentu di suatu perguruan tinggi di Indonesia—termasuk di Universitas Indonesia—dipercayakan sepenuhnya kepada seorang Guru Besar yang bertindak sebagai promotor. Pada umumnya, seorang promotor dibantu oleh beberapa orang, biasanya tidak lebih dari 2 kopromotor. Senat Guru Besar setiap fakultas diberi wewenang menentukan promotor untuk setiap promovendus

(peserta pendidikan doktor). Pada masa itu, waktu yang dapat dimanfaatkan seorang promovendus untuk menyelesaikan penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk disertasi tidak dibatasi. Karena itu, tidak mengherankan jika doktor yang dihasilkan setiap tahunnya oleh Universitas Indonesia tidaklah banyak. Dalam kurun waktu 32 tahun (hingga tahun 1982, saat Fakultas Pascasarjana dibuka), UI hanya dapat menghasilkan 152 orang doktor dalam berbagai bidang ilmu. Dengan diberlakukannya Program Pendidikan Doktor secara terstruktur, maka dalam jangka waktu 17 tahun (1983–1999) Universitas Indonesia dapat menghasilkan tidak kurang dari 290 doktor, hampir dua kali lipat dari jumlah doktor yang dihasilkan UI selama 32 tahun.

Pendidikan Program Magister dan Program Doktor terstruktur di Universitas Indonesia telah diselenggarakan sejak tahun 1977. Pada tanggal 4 Juli 1977 Universitas Indonesia membuka Program Magister dan Program Doktor dalam bidang Opto-elektronika dan Aplikasi Laser, yang secara administrasi langsung bertanggung jawab kepada Rektor. Pendirian Program Pascasarjana itu merupakan tindak lanjut dari Program Pengembangan Tenaga Ilmiah Terintegrasi Nasional, yang disusun oleh Menteri Negara Riset, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, pada tahun 1976. Pada awalnya, kegiatan pendidikan Program Pascasarjana dalam bidang Opto-elektronika dan Aplikasi Laser diselenggarakan di sebuah bedeng yang dibangun di halaman Fakultas Teknik atas gagasan Dr. Ing. Purnomosidhi Hadjisarosa, Dekan FT-UI waktu itu. Para pengajar Program Pascasarjana itu, selain staf pengajar UI juga didatangkan dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi ternama dari Jepang, antara lain dari Tokyo Institute of Technology, Universitas Chiba, Universitas Hiroshima, Universitas Hokkaido, dan Universitas Osaka. Pada tahun 1979, Program Pascasarjana tersebut telah dapat menghasilkan 14 orang bergelar Magister.

Pada tahun yang sama, Fakultas Kedokteran juga menyelenggarakan pendidikan Program Master of Science dalam bidang Ilmu Gizi *(nutrition)*. Pendidikan tersebut diselenggarakan dalam rangka kerja sama dengan South East Asian Ministry of Education Organization (SEAMEO) pada tahun 1977.

Pada tahun 1978, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI membuka Program Master of Science dalam bidang Sanitasi Lingkungan. Program Magister itu merupakan program pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama FKM-UI dengan Departemen Kesehatan RI. Berbagai pihak turut membantu penyelenggaraan program pendidikan tersebut, seperti School of Public Health, University of Hawaii, Amerika Serikat dan United States Agency for International Development (USAID).

Pada tanggal 11 Agustus 1979, Rektor UI (Prof. Dr. Mahar Mardjono) meresmikan dimulainya Pendidikan Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Kedokteran Dasar dalam bidang Biologi, Anatomi, Histologi, Biokimia, Farmakologi, Parasitologi, Mikrobiologi, dan Patologi Anatomi di Fakultas Kedokteran.

Baru pada tahun 1982, Fakultas Pascasarjana dibuka berdasarkan beberapa peraturan yang berpangkal pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980, tanggal 14 Februari 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut (Pasal 14). Fakultas Pascasarjana bertugas antara lain mengelola pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Indonesia secara terstruktur. Fakultas Pascasarjana diubah namanya menjadi Program Pascasarjana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 yang ditetapkan tanggal 10 Juli 1990 (Lembaran Negara RI No. 38, 1990). Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan.

12. Fakultas Non-Gelar Ekonomi & Fakultas Non-Gelar Teknologi (Depok, 1981)

Pendirian Fakultas Non-Gelar Ekonomi dan Fakultas Non-Gelar Teknologi di Universitas Indonesia diawali dengan

pembukaan program pendidikan Diploma Bidang Teknik dalam bentuk Politeknik dan Pusat Pengembangan Akuntansi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 03/DJ/Kep/1979 tanggal 27 Januari 1979. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980, tanggal 14 Februari 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut (Pasal 42), dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981, tanggal 14 Agustus 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri, serta Keputusan RI No. 44 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Indonesia (Pasal 3), Program Pendidikan Diploma Bidang Teknik dalam bentuk Politeknik dan Pusat Pengembangan Akuntansi dinamakan Fakultas Non-Gelar Ekonomi dan Fakultas Non-Gelar Teknologi. Pada tahun 1998, kedua fakultas non-gelar tersebut dilepaskan dari Universitas Indonesia dan dialihkan pengelolaannya kepada Politeknik Negeri Jakarta, yang didirikan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 207/0/1998, tanggal 25 Agustus 1998.

13. Fakultas Ilmu Komputer (Depok, 1993)

Perjalanan sejarah Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Indonesia diawali dengan dibukanya Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom) berdasarkan Surat Keputusan Rektor UI No. 019/SK/BR/72 tanggal 15 Maret 1972. Surat Keputusan itu, yang mulai diberlakukan tanggal 1 April 1972, menetapkan bahwa tujuan pendirian Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia adalah untuk mengembangkan tenaga kerja, kegiatan-kegiatan, dan kurikulum pendidikan dalam Ilmu Komputer dan Informasi serta ilmu-ilmu lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan komputer dan penggunaannya. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Keputusan Rektor tersebut disebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, Pusat Ilmu Komputer UI akan melaksanakan

kegiatan, yang antara lain meliputi pendidikan, penelitian, dan pelayanan pada kegiatan penelitian, kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama dengan para ahli luar dan dalam negeri, mengadakan pertemuan profesional, serta pelayanan pada ketatalaksanaan dan administrasi universitas. Mengenai pembiayaan untuk menjalankan kegiatan tersebut, Pusat Ilmu Komputer UI diberi wewenang untuk mengusahakan sumber keuangan dan bantuan lainnya dari pihak luar maupun dalam negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan Universitas Indonesia. Dalam fase permulaan pengembangannya, sebagian biaya kegiatan Pusat Ilmu Komputer UI akan dibantu oleh Ford Foundation (Pasal 3).

Dr. Indro S. Suwandi, sebagai pemrakarsa dan pendiri Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, diangkat sebagai direktur pertamanya. Pada awalnya, Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia—yang kemudian dikenal dengan nama Pusilkom-UI dan yang tidak memiliki sebuah komputer pun—menempati suatu ruangan berukuran 4 x 4 m^2 di gedung Fakultas Kedokteran UI, Jln. Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat. Jumlah pegawainya—termasuk direktur—pada saat itu hanya 3 (tiga) orang, dan komputer yang digunakan adalah fasilitas komputer yang ada di instansi lain, seperti di kantor Pemerintah Daerah Khusus Ibukota

Dr. Indro S. Suwandi, pemrakarsa dan pendiri Pusat Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Jakarta, Departemen Pekerjaan Umum, dan di Biro Pusat Statistik.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Pusilkom-UI adalah penyusunan Sistem Informasi Manajemen atau SIM-UI—yang mencakup Registrasi Mahasiswa, Data Akademik, pendataan masalah yang berhubungan dengan Personalia, Keuangan, dan Perlengkapan—serta pengolahan ujian masuk UI dan memberikan konsultasi. Dr. Indro S. Suwandi menyadari sepenuhnya bahwa untuk pengembangan ilmu komputer diperlukan staf yang tangguh sebagai sumber daya pokok. Selama dua tahun berikutnya, Pusilkom-UI merekrut sejumlah orang staf (dari FT-UI, FE-UI, dan FMIPA-UI), sehingga jumlah pegawai pada tahun 1974 bertambah menjadi 7 (tujuh) orang. Luas ruang kerja—meskipun masih menumpang di Fakultas Kedokteran UI—juga bertambah menjadi 50 m^2. Dalam perkembangan selanjutnya, Pusilkom-UI mengirim dua orang staf ke Amerika Serikat untuk tugas belajar. Dengan bantuan Ford Foundation, Pusilkom-UI mendapat 2 buah *punch machine*. Meskipun peralatan tersebut bukan mesin komputer, namun kehadiran *punch machine* sangat membantu kegiatan staf dalam rangka pengembangan program-program komputer.

Pada tahun 1975, Pusilkom-UI memperoleh sebuah gedung berlantai 3 di Kampus UI Salemba, yang kemudian ditambah menjadi 4 lantai. Setahun kemudian, lima universitas negeri yang tergabung dalam Sekretariat Kerja sama Antar Lima Universitas (SKALU)—yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga—melaksanakan ujian masuk secara serentak. Bersamaan dengan itu pula, Pusilkom-UI memperoleh bantuan hibah dari Departemen Dalam Negeri berupa seperangkat peralatan komputer Data General NOVA/3D dan Data General Eclipse C/300. Dengan demikian pengolahan ujian masuk untuk kelima perguruan tinggi itu dapat sepenuhnya dilaksanakan di Pusilkom-UI. Pusilkom-UI mengalami perkembangan pesat pada akhir

dasawarsa 1970-an, terutama di bidang sumber daya manusia. Lima orang staf dikirim lagi ke Amerika Serikat untuk tugas belajar. Sementara itu, ujian masuk perguruan tinggi diperluas hingga mencakup 10 perguruan tinggi negeri. Dengan demikian peran Pusilkom-UI bertambah luas, baik dalam hal pengolahan data maupun dalam memberikan konsultasi, serta menyelenggarakan berbagai program pendidikan. Hal itu tampak, antara lain, dengan dipercayakannya pengolahan data ujian masuk seluruh perguruan tinggi negeri, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi Nasional, dan beberapa kegiatan penting lainnya kepada Pusilkom-UI.

Dasawarsa 1980-an ditandai dengan mulai kembalinya beberapa orang staf dari tugas belajar. Peralatan komputer yang dibutuhkan juga sudah mulai terpasang. Sementara itu, Pusilkom-UI semakin besar perannya dalam pengembangan Ilmu Komputer di Indonesia.

Dalam rangka menunjang penerapan dan pengembangan teknologi komputer di Indonesia, Pusilkom-UI juga menyelenggarakan sebuah program alih teknologi yang kini telah melibatkan lebih dari 10 buah perusahaan komputer, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai unit organisasi yang dianggap cukup kuat sumber dayanya, maka Pusilkom-UI ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pusat Antar Universitas di bidang Ilmu Komputer pada tahun 1985. Pemusatan sumber daya manusia, peralatan, dan fasilitas perpustakaan di bidang Ilmu Komputer di Pusilkom-UI mengakibatkan timbulnya desakan dari berbagai pihak kepada Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan Program Studi Ilmu Komputer. Pada waktu itu, Ilmu Komputer merupakan suatu cabang ilmu baru dan dianggap oleh sebagian masyarakat ilmiah di dunia sebagai suatu disiplin baru. Ilmu itu mencakup berbagai disiplin ilmu yang sudah ada, misalnya teknik, matematika, ekonomi, manajemen, linguistik, dan psikologi. Oleh karena itu, sangat sulit meletakkan

program studi baru itu di salah satu fakultas yang sudah ada di lingkungan UI.

Pada tahun 1986, Pusilkom-UI membuka Program Studi Ilmu Komputer (Prosilkom) untuk jenjang Sarjana. Melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPT), pada tahun 1986 diterima 18 orang lulusan SMA sebagai mahasiswa angkatan pertama Program Studi Ilmu Komputer. Mulai tahun kuliah 1988/89, Pusilkom-UI juga diberi tugas untuk mengelola Program Studi Ilmu Komputer pada jenjang Magister di bawah naungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Mulai tahun 1988, kegiatan pendidikan Ilmu Komputer dipusatkan di Kampus UI Depok. Pada tanggal 21 Oktober 1993, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI resmi terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1993, tanggal 21 Oktober 1993.

14. Fakultas Ilmu Keperawatan (Jakarta, 1995)

Keberadaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia diawali dengan dibukanya Program Studi Ilmu Keperawatan, yang dikembangkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pendirian Program Studi Ilmu Keperawatan merupakan hasil upaya bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Kesehatan. Lokakarya Nasional Keperawatan yang diadakan pada bulan Januari 1983 menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan tenaga keperawatan pada jenjang Sarjana.

Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan Kelompok Kerja Keperawatan di Konsorsium Ilmu Kesehatan, dengan bantuan teknis dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang keperawatan. Penunjukan itu dituangkan dalam Keputusan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 339/D2/1985 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 07/DIKTI/Kep/1986.

Program Studi Ilmu Keperawatan, yang dikelola oleh Fakultas Kedokteran UI dibuka pada bulan Agustus 1985. Pada awalnya, Program Studi tersebut membuka 2 (dua) program, yaitu Program A (lama pendidikan 8 semester) dan Program B (lama pendidikan 4 semester). Program A menerima mahasiswa melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan PPKB (Program Pemerataan Kesempatan Belajar), sedangkan Program B menerima mahasiswa lulusan Diploma III Akademi Keperawatan melalui ujian masuk yang ditentukan Universitas Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0332/0/1995 tanggal 15 November 1995, Program Studi Ilmu Keperawatan ditetapkan menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di Kampus UI Salemba.

Selain membuka 14 (empat belas) fakultas, Universitas Indonesia juga membuka program Ekstensi. Pembukaan Program Ekstensi dimaksudkan untuk dapat menampung minat masyarakat yang semakin meningkat, terutama mereka yang sudah bekerja untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Universitas Indonesia membuka program ekstensi di tujuh fakultas sebagai berikut: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Ilmu Keperawatan. Program Ekstensi Universitas Indonesia yang pertama adalah Ekstension Fakultas Ekonomi yang dibuka pada tahun 1961.

B. PENGUBAHAN NAMA LIMA FAKULTAS

Antara tahun 1957 dan tahun 1990, Universitas Indonesia mengubah nama lima fakultasnya:

1. Fakultas Sastra dan Filsafat diubah namanya menjadi Fakultas Sastra. (*Laporan Ketua Presidium Universitas Indonesia Tahun Akademi* 1957/1958: 2).
2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 42 Tahun 1968, tanggal 1 Februari 1968, "Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan" diubah namanya menjadi Fakultas Hukum.

3. Bagian Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan dipisahkan dari Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan dan dinyatakan menjadi fakultas yang berdiri sendiri dengan nama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 031/0/1972 tanggal 24 Februari 1972 mengubah nama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan menjadi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Kemudian, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran-Negara RI No. 41, 1981) tanggal 14 Agustus 1981, nama Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
4. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) diubah namanya menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran-Negara RI No. 41, 1981) tanggal 14 Agustus 1981. Di lingkungan Universitas Indonesia, nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam mulai digunakan pada tahun akademi 1983/1984.
5. Fakultas Pascasarjana diubah namanya menjadi Program Pascasarjana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 yang ditetapkan tanggal 10 Juli 1990 (Lembaran-Negara RI No. 38, 1990).

C. PENGALIHAN 11 FAKULTAS DAN 3 LEMBAGA (1954–1998)

1. Pengalihan Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Surabaya ke Universitas Airlangga (1954)

Pada tahun 1954, dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954, tanggal 1 November 1954 (Lembaran-Negara RI

No. 99, 1954), *Universitas Airlangga* didirikan di Surabaya pada tanggal 10 November 1954. Peraturan Pemerintah itu menetapkan bahwa "(1) Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaja dipisahkan dari Universitet Indonesia; dan (2) Tjabang Bagian Hukum di Surabaja dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik dipisahkan dari Universitit Negeri Gadjah Mada (Pasal 1)."

Universitas Airlangga yang baru didirikan itu meliputi fakultas-fakultas berikut: (a) Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya; (b) Fakultas Hukum, Sosial, dan Politik di Surabaya; (c) Perguruan Tinggi Pendidikan di Malang; (d) Fakultas Ekonomi di Surabaya; dan (e) fakultas-fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan uraian Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam rapat dengan Universitet Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 September 1954 dan dengan Universitit Negeri Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 18 September 1954 tentang maksud Pemerintah mendirikan Universitas Airlangga di Jawa Timur.

Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya rupanya tidak selancar seperti yang diduga, terutama yang berhubungan dengan pemisahan Fakultas Kedokteran Universitet Indonesia di Surabaya dan Cabang Bagian Hukum dari Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada di Surabaya, yang digabungkan menjadi fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Airlangga. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955, tanggal 27 Januari 1955 (Lembaran-Negara RI No. 4, 1955) menetapkan bahwa

> Sebelum pelaksanaan pemindahan Fakulter Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi dan Cabang Bagian Hukum dari Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik selesai, segala sesuatu, termasuk pelajaran-pelajaran dan ujian-ujian, masih diselenggarakan masing-masing oleh Universitet Indonesia dan Universitit Gadjah Mada.

Dalam Pasal 1, No. 1 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955 ini disebutkan juga pengubahan nama dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik menjadi Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik. Hingga saat pencetakan buku ini, peraturan yang mengganti Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955 belum berhasil ditemukan.

Gedung Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS), yang menjadi Gedung Universitas Indonesia di Surabaya tahun 1950

2. Pengalihan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, serta Fakultas Kedokteran di Makassar ke Universitas Hasanuddin (1956)

Pada tahun 1950, Fakulteit Ekonomi, Universiteit Indonesia di Makassar ditutup untuk sementara, sehubungan dengan kembalinya beberapa tenaga pengajar bangsa Belanda ke negerinya. (Harian *Java Bode*, Tahun ke-99, No. 21, 26 September 1950). Lebih lanjut *Java Bode* memberitakan bahwa Fakulteit Ekonomi tidak akan dipindahkan ke Jakarta.

Namun, tiga tahun kemudian—yaitu pada tahun 1953—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 35209/Kab., tanggal 22 September 1953 yang menetapkan membuka kembali Fakulter Ekonomi di Makassar, sebagai

Cabang Fakultet Ekonomi di Jakarta. Dua tahun kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 34666/Kab., tanggal 21 Djuni 1955 yang menetapkan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia di Makassar terpisah dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia di Jakarta terhitung mulai tanggal 1 Juli 1955.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1956, tanggal 8 September 1956 (Lembaran-Negara RI No. 39, 1956) menetapkan tanggal 1 September 1956 sebagai tanggal pendirian Universitas Hassan Uddin (sekarang *Universitas Hasanuddin*) di Makassar. Dengan demikian maka 3 (tiga) fakultas—Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Kedokteran di Makassar—yang dilepaskan dari Universitas Indonesia dipindahkan ke Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 10 September 1956, Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta, meresmikan pembukaan Universitas Hasanuddin di Gubernuran Makassar. Pada saat didirikan, Universitas Hasanuddin telah memiliki Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (di Tondano). Sementara itu, Universitas Hasanuddin dapat mendirikan fakultas lain, yang jenis dan tempatnya akan ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

3. Pengalihan Fakultas Teknik & Lembaga Pendidikan Guru Menggambar, dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia di Bandung ke Institut Teknologi Bandung (1959)

Pada tanggal 28 Februari 1959, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1959 (Lembaran-Negara RI No. 9, 1959), ditetapkan bahwa Universitas Indonesia di Bandung menjadi *Institut Teknologi* di kota Bandung (kemudian dikenal dengan nama *Institut Teknologi Bandung*). Pada tanggal 2 Maret 1959, pembukaannya diresmikan oleh Presiden Republik

Indonesia, Soekarno. Pasal 3 Peraturan Pemerintah itu menetapkan bahwa Institut Teknologi—yang merupakan gabungan dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di Bandung yang dipisahkan dari Universitas Indonesia—terdiri dari Departemen Ilmu Teknik, Departemen Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, dan Departemen Ilmu Kimia dan Ilmu Hayat.

4. Penyerahan Lembaga Pendidikan Jasmani di Bandung kepada Universitas Padjadjaran di Bandung (1961)

Dalam pidato Presiden Universitas Indonesia, yang disampaikan pada Hari Sarjana ke-3 tanggal 29 September 1962, dilaporkan bahwa Akademi Pendidikan Jasmani telah dilepaskan dari Universitas Indonesia pada tahun 1961.

5. Pengalihan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia di Jakarta ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta (1963)

Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 Tahun 1963, tanggal 1 Mei 1963 menetapkan pembukaan *Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan* di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Prof. dr. R. Slamet Iman Santoso menjadi Ketua Presidium IKIP Jakarta dari tahun 1963 hingga tahun 1965. Keputusan tersebut diperkuat Keputusan Presiden RI No. 274 Tahun 1965, yang ditetapkan tanggal 14 September 1965 dan mengesahkan pendirian Institut Negeri di Jakarta, yang diberi nama Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP) Jakarta. Keputusan Presiden RI No. 274 Tahun 1965 itu *tidak* menyebutkan pengalihan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dari Universitas Indonesia ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, mulai tanggal 4 Agustus 1999, IKIP Jakarta berubah statusnya menjadi *Universitas Negeri Jakarta*, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 93 Tahun 1999.

6. Pengalihan Fakultas Pertanian & Kehutanan, dan Fakultas Kedokteran Hewan & Peternakan Universitas Indonesia di Bogor ke Institut Pertanian Bogor (1963)

Terhitung mulai tanggal 1 September 1963, *Institut Pertanian di Bogor* (kemudian dikenal dengan nama *Institut Pertanian Bogor*) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahun No. 91 Tahun 1963 tanggal 1 Agustus 1963. Fakultas Pertanian & Kehutanan dan Fakultas Kedokteran Hewan & Peternakan—yang dipisahkan dari Universitas Indonesia di Bogor—dipindahkan ke Institut Pertanian Bogor. Pada saat didirikan, Institut Pertanian Bogor terdiri dari 5 departemen, yaitu (1) Departemen Pertanian; (2) Departemen Kedokteran Hewan; (3) Departemen Kehutanan; (4) Departemen Peternakan; dan (5) Departemen Perikanan (Perikanan Darat dan Perikanan Laut).

Nederlandsch-Indische Veeartsenschool di van Imhoffsplein 1 (Taman Kencana 1) Bogor, yang diresmikan pembukaannya tanggal 30 Juni 1928 dan menjadi Gedung Universitas Indonesia di Bogor tahun 1950

7. Pengalihan Fakultas Non-Gelar Ekonomi dan Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Indonesia ke Politeknik Negeri Jakarta (1998)

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 207/0/1998, tanggal 25 Agustus 1998 menetapkan Fakultas Non-Gelar Ekonomi dan Fakultas Non-Gelar Teknologi UI menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Pada saat didirikan, Politeknik Negeri Jakarta terdiri atas tiga jurusan, yaitu Jurusan Teknik Sipil,

Jurusan Teknik Mesin, dan Jurusan Teknik Elektro. Kemudian ditambahkan 3 jurusan lagi, yaitu Jurusan Akuntansi, Jurusan Administrasi Niaga, dan Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, sesuai dengan ralat yang dikeluarkan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan No. 01304/A6.I/HK/1998, tanggal 17 September 1998.

*

Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan bahwa fakultas-fakultas yang dilepaskan dari Universitas Indonesia antara tahun 1954 dan 1998 tersebut sebenarnya merupakan cikal bakal Universitas Airlangga di Surabaya (1954), Universitas Hasanuddin di Makassar (1956), Institut Teknologi di Bandung (1959), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Jakarta (1963) yang kemudian menjadi Universitas Negeri Jakarta (1999), Institut Pertanian di Bogor (1963), dan Politeknik Negeri Jakarta di Depok (1998).